YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P.
Peran Sterad Mengoptimalkan Satkowil Dalam Menyiapkan Komponen Pendukung

Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si.
Kodam IV/Diaponegoro Menembus Keterisolasian Melalui Pembangunan Jembatan Merah Putih

ISSN 2086-9320
9772086932001

EDISI SEPTEMBER 2024

PERESMIAN JEMBATAN GANTUNG
MERAH PUTIH

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.E., M.M.
(Kadispenad)

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 44 Nomor III Edisi September 2024. Jurnal ini menyajikan beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari para Pati, Pamen dan Pama TNI AD yang bertugas di Satuan jajaran TNI AD.

Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca dimana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.E., M.M.

Pemimpin Redaksi
Kolonel Arh Sudrajat, S.H., M.I.P.

Sekretaris Redaksi
Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.

Koordinator Liputan
Letkol Caj Triyono, S.I.P.

Redaktur Bahasa & Editor
Mayor Caj (K) Besarah Septiana M., S.S.

Redaktur Pracetak
PNS Listin

Fotografer
Serma Taufik Armanto

Desain Grafis
Sertu (K) Intan Indah Permatasari

Editor
PNS Kuseri

YUDHAGAMA
MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Alamat Redaksi
Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300

Alamat Email
palaganyudhagama@gmail.com,
dispenad@mabesad.mil.id

Website
https://www.tniad.mil.id

Youtube
TNI Angkatan Darat

Facebook
https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI

Twitter (X)
https://twitter.com/TNI_AD_Official

Instagram
https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat

Tiktok
https://www.tiktok.com/@tni.angkatan.darat

Majalah Digital
https://militer-angkatandarat.com

Daftar Isi

Peran Sterad Mengoptimalkan Satkowil Dalam Menyiapkan Komponen Pendukung 6
Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P.

Kodam IV/Diponegoro Menembus Keterisolasian Melalui Pembangunan Jembatan Merah Putih 13
Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si.

Antisipasi Terhadap Kerawanan Kebocoran Data 19
Brigjen TNI Yudha Fitri

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul TNI AD 25
Brigjen TNI Dr. Rachmat S., S. Si., M.M., M.Tr. (Han)

Menghidupkan Lahan Mati: Urban Farming Bawang Merah di Korem 051/Wijayakarta 31
Brigjen TNI Riyanto, S.I.P

Ancaman Judi Online Terhadap Personel TNI AD di Era Digital 38
Brigjen TNI Sugiyono

Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Oleh Satuan Komando Kewilayahan 43
Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si.

Napak Tilas Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia 51
Kolonel Inf Ali Imran

Inovasi Korps Peralatan Dalam Menjaga dan Melestarikan Alam 56
Kolonel Cpl Daniel Cristof Hutubessy, S.Sos.

Peran Kodam V/Brawijaya Dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur 61
Kolonel Kav Donan Wahyu

Aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat di Era Modern 65
Letkol Inf Roberth Ngadiran, S.E.

TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah Bantul Projotamansari 72
Letkol Inf Muhidin, S.H., M.I.P.

Peran Kodim 0615/Kuningan Melalui Cutter Khitan Sonix 76
Letkol Arh Kiki Aji Wiryawan

Pengabdian TNI di Ujung Timur Indonesia "Kitorang Basudara" 81
Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, S.I.P.

PERAN STERAD MENGOPTIMALKAN SATKOWIL DALAM MENYIAPKAN KOMPONEN PENDUKUNG

UNTUK MEWUJUDKAN KESADARAN NASIONAL GUNA MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER

Oleh: Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P.
(Aster Kasad)

Menurut Carl Von Clausewitz "Perang adalah tindakan kekerasan tanpa batas, perang juga diartikan sebagai tindakan kekerasan untuk memaksa lawan memenuhi keinginan kita, perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain." Sedangkan menurut Horace M. Kallen dalam bukunya *On War and Peace*;1984 "Perang adalah pertempuran bersenjata antara dua atau lebih lembaga berdaulat (negara) yang dilakukan secara terorganisir. Penggunaan kekuatan militer dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut."

Mengutip dari pengertian di atas, perang disini dapat dimaknai adanya dua negara yang berdaulat yang saling berselisih paham dan mengerahkan kekuatan bersenjata atau kekuatan militer reguler masing-masing untuk saling berhadapan serta mengancam satu sama lain. Hingga saat ini perang selalu mewarnai peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, perang dapat dimaknai tidak hanya melibatkan dua negara dengan kekuatan militer masing-masing, namun perang dapat melibatkan pihak mana saja, terjadi dimana saja dan kapan saja.

Perang menjadi suatu ancaman dunia yang semakin tidak mempunyai suatu bentuk baku lagi, asimetris dan bersifat *hybrid*. *Hybrid warfare* atau perang hibrida adalah teori strategi militer yang pertama kali diusulkan oleh Frank Hoffman seorang Anggota Dewan Penasihat di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Konsep *hybrid warfare* memadukan perang politik, perang konvensional, perang tidak teratur serta perang dunia maya *(cyber warfare)* baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, serta perang informasi.

Perang hibrida dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika ruang pertempuran yang fleksibel dan kompleks yang membutuhkan respons yang sangat mudah beradaptasi dan tangguh. Oleh karena itu, menghadapi kemungkinan ancaman perang hibrida, TNI beserta seluruh kementerian lembaga serta seluruh komponen bangsa harus segera beradaptasi dengan situasi yang berkembang agar dapat mengantisipasi serta mengatasinya secara lebih cepat dan tepat dengan menyiapkan segenap sumber daya nasional guna dapat mencegah dan mengatasi secara dini. Hal ini menuntut kesadaran dan pemahaman seluruh komponen di tengah kompleksnya dinamika kehidupan berbangsa. Namun pada kenyataannya beberapa ancaman yang terjadi masih membutuhkan kesadaran dan koordinasi serta kerjasama yang lebih optimal dalam menghadapinya, tidak terlepas juga bagi satuan komando kewilayahan. Hal ini menuntut tidak hanya TNI sebagai komponen utama pertahanan yang berada di garda terdepan, justru

trend ancaman saat ini lebih condong ke ancaman non militer yang menuntut kementrian lembaga lain untuk lebih pro aktif sesuai bidangnya. Seperti trend ancaman menonjol yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara lain pandemi covid-19, ancaman iklim ekstrim yang berpengaruh pada ketahanan pangan dan ancaman serangan *cyber* (serangan *hacker* ke institusi negara) menuntut peran aktif seluruh kementrian lembaga dan seluruh komponen bangsa.

Sterad sebagai staf yang mempunyai tugas memberikan saran dan masukan kepada pimpinan TNI AD dalam konteks teritorial sebagai fungsi utama TNI AD dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis khususnya ancaman non militer, Sterad merasa perlu untuk mengelola sumber daya nasional sehingga terwujud kesadaran secara nasional dalam menghadapi setiap ancaman. Satuan Komando Kewilayahan merupakan unsur ujung tombak TNI AD dalam upaya mengelola sumber daya nasional yang senantiasa dioptimalkan peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara. Di dalamnya tertuang melalui kegiatan Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung, Pembentukan Komponen Cadangan, Penguatan Komponen Utama serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Sehingga dari uraian di atas sesuai dengan tugas dan fungsi Sterad khususnya dalam penataan komponen pendukung (Komduk) maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan yaitu:

- **Pertama,** belum optimalnya pemahaman Apkowil tentang PSDN;
- **Kedua,** belum terbentuknya SDM terlatih yang siap dimobilisasi dan Demobilisasi sebagai Komduk;
- **Ketiga,** belum tersajinya data *update* Komduk di Satkowil (Data Komduk masih dalam bentuk tabulasi data manual).

Dari identifikasi persoalan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Sterad mengoptimalkan satkowil dalam menyiapkan komponen pendukung untuk mewujudkan kesadaran nasional guna menghadapi ancaman non militer.

Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Sterad membantu dalam mewujudkan komponen pendukung yang dapat diberdayakan dalam pertahanan untuk menghadapi ancaman non militer melalui peran Satkowil jajarannya. Sedangkan tujuan dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi saran masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Tulisan ini memiliki arti penting jika penataan komponen pendukung dilaksanakan dengan baik diharapkan terwujud kesadaran nasional dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa khususnya ancaman non militer. Metode dalam penulisan ini adalah dengan analisa deskripstif, pengalaman empiris di lapangan serta pendekatan studi pustaka. Tulisan dibatasi pada pembahasan komponen pendukung mempedomani UU RI Nomor 23 tahun 2019.

Peningkatan Pemahaman Apkowil Tentang PSDN

Warga negara atau sumber daya manusia yang dimaksud adalah warga negara Republik Indonesia sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Sumber daya manusia memegang peran yang penting karena pada hakekatnya apapun bidang pekerjaanya jika memiliki jiwa nasionalisme dan semangat bela negara maka segenap sumber daya yang ada dalam bidang pekerjaannya dapat diarahkan untuk semaksimal mungkin memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Kesadaran bela negara tersebut yang perlu senantiasa disiapkan melalui perencanaan dan penataan.

Belajar dari pengalaman nasional pada awal tahun 2020 saat terjadi pandemi *Covid-19* Indonesia sama halnya dengan negara lain di dunia dikejutkan oleh wabah yang melanda dan sangat berpotensi mengancam keutuhan serta keselamatan bangsa dan negara. Penanganan pandemi dilaksanakan secara nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam berkoordinasi untuk perencanaan sampai dengan penganggulangan. Dalam

hal ini Kementerian Kesehatan sebagai leading sector dengan didukung seluruh kementrian lembaga dan TNI.

Pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 secara acak juga telah terjadi serangan *cyber* yang merugikan sampai dengan tingkat institusi negara. Tercatat pada Kamis 20 Juni 2024 telah terjadi pembobolan data di Pusat Data Nasional (PDN). Gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia yang menyebabkan gangguan lainnya pada sejumlah layanan publik. Dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo sebagai l*eading sector*.

Selain itu fenomena judi online juga merupakan suatu bentuk ancaman yang jika tidak ditangani dengan baik akan berpengaruh pada mental dan kesadaran warga negara. Selanjutnya pada tahun 2023 akibat dari dampak fenomena badai El Nino mengakibatkan terjadinya musim kering yang berkepanjangan sehingga beberapa wilayah mengalami gagal panen yang mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Dalam hal ini Kementan RI menjadi *leading sector* yang harus didukung oleh seluruh kementerian lembaga dan seluruh komponen bangsa.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang mengawaki apapun dan dimanapun bidang tugasnya yang dituntut memiliki semangat juang tinggi dan kesadaran dalam bela negara. Warga Negara atau sumber daya manusia yang dimaksud terdiri dari:

- **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- **Warga terlatih yang terdiri dari:**
  - Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Anggota Resimen Mahasiswa;
  - Anggota satuan polisi pamong praja;
  - Anggota polisi khusus;
  - Anggota satuan pengamanan;
  - Anggota perlindungan masyarakat; dan
  - Anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih;
- **Tenaga ahli. Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni;**
- **Warga lain unsur Warga Negara meliputi:**
  - Anggota veteran Republik Indonesia;
  - Aparatur sipil negara; dan
  - Individu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara Pasal 21 penataan komponen pendukung dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu:

- **Tahap penyiapan** yang terdiri dari: pendataan; pemilahan; pemilihan; dan verifikasi; dan
- **Tahap penetapan.**

Kewenangan pentahapan tersebut menjadi domain dari Kementerian Pertahanan RI, namun dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan tersebut tidak akan terlepas dari peran satuan kewilayahan (khususnya kegiatan penyiapan). Hal ini membutuhkan koordinasi yang melekat yang secara tidak langsung melibatkan Sterad dalam merumuskan kegiatan yang dapat dikemas dalam kegiatan program maupun non program yang mengarah pada penyiapan SDM sebagai bagian dari sumber daya nasional. Di satu sisi pemahaman aparat komando kewilayahan tentang PSDN dirasakan masih perlu ditingkatkan. Undang-Undang RI No 23 tahun 2019 perlu disosialisasikan secara kontinyu dan bertahap kepada seluruh aparat komando kewilayahan. Dengan pemahaman yang utuh diharapkan tugas penyiapan Komduk oleh Satkowil dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

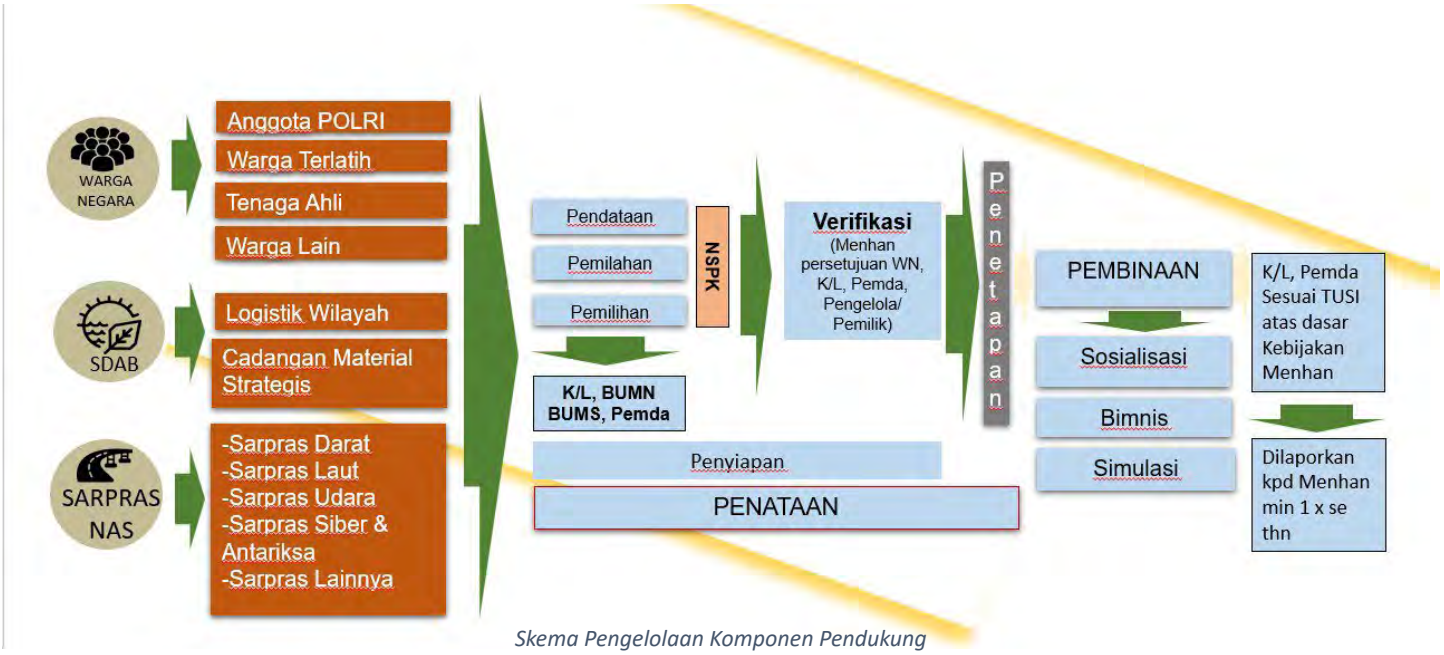

Skema Pengelolaan Komponen Pendukung

Sebagai langkah awal Sterad dalam menyikapi perubahan hakekat ancaman untuk menyiapkan penataan warga negara dalam hal bela negara dibutuhkan peran satuan kewilayahan yang berfungsi sebagai ujung tombak yang langsung terjun bersama-sama dengan warga negara. Dengan demikian dibutuhkan pertama-tama adalah pemahamanan satuan kewilayahan terkait pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Sebagai tindak lanjut Sterad telah mengadakan yaitu Kegiatan Sosialisasi Komponen Pendukung sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN. Kegiatan tersebut secara terprogram dilaksanakan secara terpusat oleh Sterad, maupun tersebar oleh Kodam. Dengan harapan aparat teritorial dimulai dari Aster Kodam, Kasiter Korem, Pasiter Kodim, Danramil dan Babinsa memiliki pemahanan yang sama. Dengan demikian mereka dapat dijadikan duta-duta dalam upaya sosialisai, pengenalan sampai dengan pendataan terhadap warga negara di wilayahnya. Materi yang dibawakan dalam Sosialisasi Komponen Pendukung antara lain: pengetahuan binter; sosialisasi PSDN; dan penataan dan pembinaan komduk.

Peningkatan SDM Terlatih

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung sedangkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat

komponen utama. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya pasal 2, 6, 7 dan 8. Dalam hal ini penyiapan komponen pendukung sangat dibutuhkan baik dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer. Guna menghadapi ancaman militer komponen pendukung harus ditingkatkan menjadi komponen cadangan untuk dapat dimobilisasi. Guna menghadapi ancaman non militer, warga negara yang sudah disiapkan menjadi komponen pendukung memegang peranan dalam bidang tugas dan pekerjaan masing-masing sesuai dengan proyeksi ancaman dimana kementerian lembaga memiliki *leading sector*.

Hal yang menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen bangsa diluar komponen utama pertahanan dalam hal bela negara adalah bela negara tidak selalu diwujudkan dengan "memanggul senjata" sebagai keanggotan komponen utama (TNI aktif). Namun kesadaran bela negara dapat diwujudkan dalam bidang pekerjaan masing-masing. Sebagai implementasinya penataan komponen pendukung dalam hal sumber daya manusia perlu dibentuk suatu warga negara yang terlatih yang telah terorganisir dan dibekali dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan sebagai kekuatan nyata komponen pendukung yang siap untuk ditingkatkan menjadi komponen cadangan guna dimobilisasi jika diperlukan.

Kegiatan Kader Warga Terlatih

Kegiatan Kader Warga Terlatih

Langkah yang telah diambil oleh Sterad adalah memberdayakan Satkowil dalam membantu menyiapkan dan melatih Komduk dalam hal pembinaan Komduk dari segi sumber daya manusia. Secara program Sterad telah mengadakan Penyelenggaraan Kegiatan Kader Warga Terlatih Terpusat melalui Pembinaan Rakyat Terlatih (Ratih). Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada warga negara terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur warga negara. Upaya pembinaan penyiapan pengkaderan komponen pendukung dalam bidang warga terlatih yang terdiri dari Purnawirawan TNI dan Polri, Resimen Mahasiswa (Menwa), Satpol PP, Polisi Khusus (Polsus), Satuan Pengamanan (Satpam), Pelindung Masyarakat (Linmas), dan Organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih ini bertujuan untuk menciptakan potensi sumber daya manusia yang berjiwa nasionalisme, patriotisme, peduli, dan cinta tanah air yang dimana para kader nantinya akan dibekali materi pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut sehingga diharapkan para kader yang sudah mencapai tingkat inti akan diarahkan menjadi pendamping atau pembina pada kegiatan kader warga terlatih di wilayah dan dapat juga bersinergi dengan aparat komando kewilayahan dalam membentuk jaring teritorial serta merekrut kader yang baru di wilayah dalam rangka pertahanan negara aspek darat. Kader warga terlatih yang sudah didata dan dibina oleh TNI AD berjumlah 943 orang dilaksanakan terpusat dan 4.125 orang tersebar di seluruh wilayah Korem yang dimana kader-kader inilah yang nantinya siap untuk ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung dari bidang warga terlatih.

Digitalisasi Pemetaan Komduk

Data merupakan salah satu faktor utama dalam bidang penyiapan komponen pendukung. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Pasal 21 terkait penataan komponen pendukung dilaksanakan khususnya tahap penyiapan yang terdiri dari pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi, data sangat dibutuhkan dan dapat dijadikan sebagai acuan pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian data-data tentang komponen pendukung harus valid, update dan akuntabel.

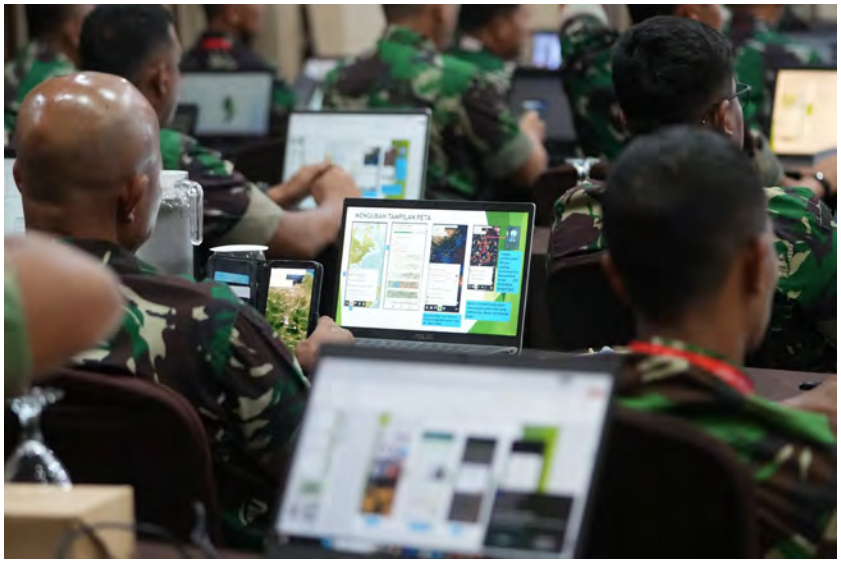

Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pemetaan Komduk

Dalam pelaksanaan pendataan sebagai pelaksana di wilayah, satuan komando kewilayahan memiliki peran yang menentukan. Dalam fungsi pembinaan teritorial satuan kewilayahan juga bertugas melakukan pendataan wilayah. Dari data tersebut satuan kewilayahan dapat membuat analisa dalam penyiapan wilayah guna mendukung kepentingan pertahanan negara. Hal tersebut secara simultan sekaligus juga data-data terkait komponen pendukung. Data-data tersebut meliputi data SDM (warga negara), Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) yang terdiri dari logistik wilayah (Logwil) dan Cadangan Materiil Strategis (Cadmatstrat) serta Sarana dan Prasarana Nasional (Sarprasnas).

Data Logwil terdiri dari: bekal makanan; bekal bahan bakar dan pelumas; bekal bahan bangunan dan konstruksi; bekal amunisi dan bahan peledak; bekal kesehatan dan bekal suku cadang. Sedangkan Cadmatstrat terdiri dari: mineral logam; batubara; minyak bumi; kondensat; gas bumi; hasil pengolahan minyak bumi; listrik, panas bumi; dan hasil petro kimia. Sarprasnas terdiri dari Sarpras matra (darat, laut dan udara) yang meliputi: sarana transportasi; prasarana transportasi; bengkel pemeliharaan dan perbaikan; sarpas darat lainnya yang memiliki nilai strategis dan sarpras lainnya yang meliputi: sarpras kesehatan; sarpas pergudangan; sarpas depo logistik; industri nasional pendukung sarpasnas utk pertahanan negara (PP RI NO 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU RI No 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk Hanneg).

Dari beragam dan kompleksnya data yang diuraikan tersebut, data yang terhimpun di Satkowil masih berupa tabulasi data manual. Hal ini akan mempengaruhi tingkat validitas, akuntabilitas serta kecepatan waktu dalam meng update. Dengan demikian diperlukan suatu sistem data yang dapat menyajikan data secara valid, tepat waktu, update dan akuntabel serta relevan.

Sebagai implementasinya Sterad telah mengadakan kegiatan Sosialisasi digitalisasi pemetaan Komduk kepada satuan komando kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim) dan menggandeng Topografi Kodam dalam rangka menyiapkan data perlawanan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara baik pada masa damai maupun kepentingan perang. Kegiatan sosialisasi digitalisasi pemetaan komduk diselenggarakan dalam rangka menyiapkan data komponen pendukung menuju transformasi teknologi digital untuk menghasilkan data yang valid, aplikatif, dan update sebagai bahan analisa dan evaluasi pimpinan guna menentukan kebijakan strategis di bidang penyiapan komponen pendukung. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari staf teritorial Kodam dan Korem yang diharapkan dapat menjadi kader dalam mensosialisasikan kepada satuan jajaran masing-masing sampai dengan tingkat Kodim.

Langkah yang telah diambil Sterad secara terprogram mengoptimalkan Satkowil dalam menyiapkan komponen pendukung untuk mewujudkan kesadaran nasional guna menghadapi ancaman non militer antara lain yaitu

- Melaksanakan kegiatan Sosialisasai Komduk secara terpusat dan tersebar;
- Melaksanakan kegiatan Kader Warga Terlatih Terpusat dan
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pemetaan Komduk.

Seluruh kegiatan tersebut melibatkan satuan komando kewilayahan sebagai garda terdepan.

Dengan demikian diharapkan satuan komando kewilayahan memiliki pemahaman yang mendalam tentang PSDN dan mampu menyiapkan secara optimal komponen pendukung baik SDM, SDAB maupun Sarprasnas di wilayahnya. Selain untuk antisipasi sewaktu-waktu menghadapi ancaman militer, hal ini juga berfungsi untuk membantu mewujudkan kesadaran nasional dalam menghadapi ancaman non militer yang dihadapi oleh bangsa dalam segala dimensi kehidupan.

Kegiatan Sosialisasi Komduk Terpusat (Mabesad)

Kegiatan Sosialisasi Komduk Tersebar (Kodam)

KODAM IV/DIPONEGORO MENEMBUS KETERISOLASIAN MELALUI PEMBANGUNAN JEMBATAN MERAH PUTIH

Oleh: Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si.
(Pangdam IV Diponegoro)

TNI selain Ia sebagai alat Negara adalah pula warganegara Republik Indonesia, yang disamping tugasnya sebagai alat pengamanan negara, berkewajiban pula memberikan darma baktinya dalam bidang manapun juga. TNI mempunyai kewajiban untuk turut serta secara aktif mendorong lebih tercapainya tujuan Pembangunan.

- A.H. Nasution -

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di pusat pembangunan dan perekonomian nasional yang menjadikan daerah tersebut sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan perekonomian suatu wilayah. Kondisi geografis Jawa Tengah dan DIY beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah, dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah, dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Wilayah Jawa Tengah dan DIY masuk ke dalam rangkaian ring of fire dimana sampai dengan saat ini wilayah tersebut banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, selain itu wilayah Jawa Tengah dan DIY juga dilalui oleh beberapa sungai besar seperti sungai Bengawan Solo, sungai Serayu, sungai Progo, dan sungai Oyo.

Wilayah Jawa Tengah dan DIY sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang terisolir/terpencil yang sulit dijangkau seperti di wilayah pegunungan dan perbukitan yang belum memiliki akses jalan maupun jembatan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang kurang memadai, jembatan yang terbatas, serta akses transportasi yang sulit menjadi kendala utama yang menghambat mobilitas masyarakat di daerah-daerah tersebut. Kondisi geografis yang menantang ini berdampak langsung pada berbagai

aspek kehidupan masyarakat. Aksesibilitas yang terbatas membuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau serta berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Sesuai dengan amanah pelaksanaan tugas TNI yang termuat dalam UU RI No. 34 tahun 2004, Kodam IV/Diponegoro terpanggil untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi keterisolasian suatu wilayah yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pelibatan TNI AD (Kodam IV/ Diponegoro) dalam pembangunan jembatan gantung Merah Putih di Kabupaten Brebes dan Tegal ini bukan berarti mengambil alih peran Pemerintah Daerah, namun sebagai wujud kepedulian TNI AD dalam membantu program pembangunan Pemerintah Daerah untuk membuka daerah/wilayah yang terisolir. Pelibatan prajurit Kodam IV/Diponegoro dalam membantu pembangunan jembatan gantung diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat di wilayah tersebut sehingga roda perekonomian masyarakat akan meningkat, sarana pendidikan serta kesehatan mudah diakses oleh masyarakat. Secara internal, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Delapan Wajib TNI khususnya pada butir kedelapan yang berbunyi “Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.” Keterlibatan TNI dalam membantu pelaksanaan program pemerintah daerah ini sangat diharapkan, mengingat TNI memiliki kekuatan, kemampuan, dan kemauan dalam memberikan dukungan khususnya dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Kekuatan komando yang terurai tegak lurus dari atas sampai ke bawah secara terstruktur, memungkinkan TNI untuk berperan secara aktif dalam membantu pemerintah, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes dan Tegal hingga saat ini masih memiliki beberapa wilayah yang terisolir, hal ini dikarenakan banyaknya aliran sungai yang memisahkan desa-desa sehingga menyebabkan akses transportasi untuk menuju suatu desa ke desa lain membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan akses jalan yang ada saat ini harus memutar. Keterisolasian ini juga menyebabkan berbagai masalah lain dalam kehidupan masyarakat diantaranya anak-anak di wilayah tersebut harus menunggu air sungai surut sebelum mereka bisa pergi ke sekolah atau harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah, pengiriman hasil panen penduduk terlambat yang berpengaruh terhadap hasil panen yang sudah tidak segar dikarenakan lamanya proses perjalanan dari petani ke pasar serta kesulitan menjual produk mereka di pasar yang lebih luas, proses evakuasi orang sakit yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat hal ini berisiko dapat memperburuk kondisi pasien yang memerlukan perawatan medis segera, dan lain-lain. Jika keterisolasian terhadap wilayah tersebut dibiarkan terus-menerus maka akan mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi lokal yang akan berimbas terhadap kesejahteraan

masyarakat, kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan serta pendidikan.

Dari permasalahan tersebut, Kodam IV/Diponegoro mengambil inisiatif dan langkah efektif untuk membuka keterisolasian suatu wilayah dengan melaksanakan pembangunan Jembatan Merah Putih di daerah-daerah yang masih terisolir. Pembangunan jembatan ini merupakan manifestasi dari itikad baik TNI AD dalam membantu mengatasi keterisolasian dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Di bawah pimpinan Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., bekerja sama dengan penggiat jembatan gantung asal Bogor, Bapak Suntana. Kodam IV/Diponegoro memprakarsai pembangunan jembatan di titik-titik daerah yang terisolir seperti Pedukuhan Wadas Gumantung, Desa Kalinusu, dan Pedukuhan Cisa'at di Kabupaten Brebes, serta Pedukuhan Karangsari, Desa Wotgalih, dan daerah sekitarnya di Kabupaten Tegal.

Atas dasar kebijakan dan itikad baik Pangdam IV/Diponegoro inilah, Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si beserta Bapak Suntana bergerak dengan cepat untuk mengecek secara langsung beberapa titik daerah yang terisolir dan membutuhkan pembangunan jembatan gantung. Dari hasil pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Dandim 0713/Brebes, Pj Bupati Brebes, dan Dinas terkait, terdapat tiga lokasi yang membutuhkan jembatan sebagai penghubung antar Pedukuhan dan Desa yakni Pedukuhan Wadas Gumantung Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu, dan Dukuh Cisa'at Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung.

Dengan semangat gotong royong dan Kemanunggalan TNI-Rakyat, prajurit Kodam IV/Diponegoro bersama warga dan relawan dari Brebes Selatan bergotong royong mengangkut batu dan pasir serta melaksanakan kegiatan pengecoran tiang pancang jembatan gantung. Hasilnya, dalam waktu hanya 90 hari, Jembatan Gantung Merah Putih 1 di Pedukuhan Wadas Gumantung berhasil diselesaikan dan dapat digunakan oleh warga. Dengan berdirinya jembatan gantung ini, keterisoliran warga Pedukuhan Wadas Gumantung dapat teratasi. Sebelumnya, ketika Sungai Glagah meluap, warga tidak bisa menuju Kecamatan Tonjong karena arus sungai yang deras sehingga dapat mengancam keselamatan warga. Setelah pembangunan jembatan selesai dilaksanakan dan jembatan tersebut berdiri dengan kokoh, warga dapat menyeberang kapan pun tanpa rasa takut akan terseret arus Sungai Glagah.

Dampak nyata juga dirasakan langsung oleh warga Desa Kalinusu setelah Jembatan Gantung Merah Putih 2 akhirnya berdiri kokoh dan sesuai harapan yaitu berkurangnya jarak tempuh

antara Desa Kalinusu ke Kecamatan Bantarkawung, yang semula sejauh 20 Km kini dapat ditempuh dengan jarak 2 KM. Selama proses pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih 2 terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan jembatan tersebut berlangsung dengan waktu yang lebih lama diantara pembangunan tiang pancang jembatan dengan pondasi jembatan setinggi enam meter, hal ini dikarenakan kontur bentangan sungai yang lebar serta banjir yang sempat menghantam patok-patok bambu yang digunakan sebagai tiang penyangga, sehingga perkembangan pembangunan jembatan tersebut terhambat.

Pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih 3 yang berada di Pedukuhan Cisa'at, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dilaksanakan secara gotong royong antara personel Kodam IV/Diponegoro dengan melibatkan sekitar 30 warga Pedukuhan Cisa'at. Proses pembangunan jembatan tersebut hanya membutuhkan waktu singkat yaitu sekitar 120 hari pembangunan jembatan tersebut telah selesai dilaksanakan. Dengan selesainya pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih 3 semula jarak antara Pedukuhan Cisa'at ke Kecamatan Bantarkawung sejauh 26 Km saat ini menjadi sejauh 6 Km. Berkat kerja keras dan kerjasama antara personel Kodam IV/Diponegoro dan warga Pedukuhan Cisa'at, jembatan yang selama ini mereka mimpikan akhirnya dapat terwujud. Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.IP., M.Si., berserta istri dan jajarannya hadir untuk meresmikan pembangunan jembatan gantung tersebut. Dalam kesempatan peresmian tersebut, Pangdam IV/Diponegoro berpesan kepada masyarakat agar selalu menjaga jembatan ini, sehingga dapat memberi manfaat jangka panjang serta menjadi bagian dari program berkelanjutan menuju Jawa Tengah yang Maju dan Berkeadilan Menuju Indonesia Emas 2045.

Program pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih tidak hanya dirasakan oleh warga Kabupaten Brebes tetapi juga dirasakan oleh warga Kabupaten Tegal khususnya warga Pedukuhan Karang Sari, Desa Wotgalih, Kecamatan Jati Negara. Saat ini setidaknya 300 kepala keluarga Pedukuhan Karang Sari sudah bisa merasakan manfaat dengan hadirnya Jembatan Gantung Merah Putih diantaranya kemudahan dalam memasarkan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, aktivitas sehari-sehari menjadi lebih mudah, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta pendidikan lebih terjamin.

Dengan terwujudnya pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih dibeberapa wilayah Jawa Tengah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar daerah tersebut mulai meningkat.

Penduduk dapat menjual produk hasil pertanian ke pasar yang lebih luas untuk meningkatkan daya jual yang secara otamatis akan meningkatan pendapatan mereka, serta mendorong kelancaran roda perekonomian di wilayah tersebut. Peningkatan konektivitas juga membuka peluang untuk investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. "Alhamdulillah Pangdam IV/ Diponegoro mengutus anggota yang berhati malaikat untuk menjawab doa kami," ungkap Warno, kepala Dukuh Karangsari, sambil meneteskan air mata. Sujud syukur pun dilakukan oleh warga Pedukuhan Karangsari dan masyarakat desa Banjar Agung saat peresmian dua jembatan gantung Merah Putih di Kabupaten Tegal. Pada kesempatan yang sama, Pangdam IV/Diponegoro juga melaksanakan peletakan batu pertama tanda dimulainya proses pembangunan jembatan gantung di Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, dan Desa Wanasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Selain jembatan gantung, dalam rangka membuka keterisolasian wilayah tersebut, Kodim 0712/Tegal berinisiatif membangun jalan perintis sepanjang 3,4 KM yang melintasi hutan jati milik Perhutani. Jalan ini memainkan peran penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya transportasi pengiriman hasil pertanian, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, sehingga akan berdampak positif pada ekonomi secara keseluruhan.

Jembatan Gantung Merah Putih Adalah Implementasi Kemanunggalan TNI-Rakyat Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta

Jembatan Gantung Merah Putih merupakan contoh nyata dari implementasi kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta. Dalam konteks ini, TNI tidak hanya berperan sebagai pelindung negara dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara TNI dan masyarakat ini memperlihatkan bagaimana kekuatan pertahanan dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Melalui kerjasama yang harmonis ini, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam membuka keterisolasian wilayahnya, terutama akses seperti jalan dan jembatan.

Program pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih tidak hanya memberikan dampak fisik berupa infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dengan TNI. Pekerjaan ini bukan sekadar pembangunan jembatan secara fisik, tetapi juga jembatan sosial yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, menciptakan solidaritas, dan rasa kebersamaan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa saling memiliki dan

tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Dengan adanya Jembatan Merah Putih tersebut masyarakat kini memiliki sarana penunjang transportasi yang lebih baik, kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan maksimal, serta peningkatan roda perekonomian, yang semuanya merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Kodam IV/Diponegoro dalam pelaksanaan program ini menegaskan pentingnya pendekatan pertahanan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Melalui pendekatan ini, TNI dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dan bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan dari pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas nasional. Mencermati fungsinya yang esensial dan manfaatnya yang luar biasa bagi masyarakat, Pangdam IV/Diponegoro beserta pemangku kepentingan terkait bertekad untuk terus membangun lebih banyak jembatan gantung di daerah-daerah terisolir di wilayah Jawa Tengah dan DIY, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Inisiatif ini juga menjadi bukti nyata bahwa pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup pembangunan masyarakat yang kuat dan mandiri, serta menjadi simbol bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya didorong oleh kekuatan ekonomi atau politik semata, tetapi juga oleh semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemananggulan antara TNI dan rakyat.

ANTISIPASI TERHADAP KERAWANAN KEBOCORAN DATA

Oleh: Brigjen TNI Yudha Fitri
(Danpussansiad)

Di era tahun 2000-an insiden kebocoran data kerap terjadi namun tidak semarak di era digital saat ini yang terus berkembang, dimana kebocoran data telah menjadi masalah dan perhatian serius, melindungi informasi sensitif dari ancaman yang semakin kompleks, organisasi dan individu harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi dan mengurangi kerawanan kebocoran data yang telah menjadi isu strategis di ruang siber.

Banyaknya celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan peretas atau *hacker*, pembajakan *(cracking)* maupun phishing melalui media sosial dan media online dengan tujuan untuk membobol data pribadi. Selain itu, kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi peretas menjalankan aksinya.

Kebocoran data merujuk pada peristiwa dimana informasi sensitif atau pribadi diakses, diperoleh, atau dibagikan tanpa izin yang sah. Ini dapat mencakup data pribadi seperti nomor identitas diri, jaminan sosial, rincian kartu kredit, rekening, informasi medis dan data strategis institusi yang bersifat terbatas dan rahasia. Penyebab kebocoran data dapat disebabkan adanya ancaman dan serangan siber, kesalahan manusia akibat bekerja tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya kerentanan pada sistem yang tidak diperbarui, kebijakan dan prosedur yang tidak ketat sehingga meningkatkan risiko kebocoran data dan faktor internal yang tidak mempunyai budaya serta kebiasaan untuk menerapkan keamanan data dan literasi digital secara fisik, non fisik dan sosial.

Pemerintah sudah memprediksi dampak yang akan terjadi dikemudian hari dan di tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Ancaman non-militer khususnya di ruang siber telah menyebabkan kemampuan negara dalam bidang *soft* dan *smart power* pertahanan harus ditingkatkan melalui strategi penangkalan, penindakan dan pemulihan pertahanan siber dalam rangka mendukung penerapan strategi nasional keamanan siber yang dimotori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Indikasi ancaman terjadi bila peretas berusaha mendapatkan akses tidak sah ke jaringan untuk melancarkan serangan siber. Ancaman ini dapat diketahui mulai dari mencari tahu dan mendapatkan

[1]TNI AD (2022). *Keamanan Siber.* Keputusan Kasad Nomor Kep/1066/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 tentang Keamanan Siber.

informasi penting korban dengan cara memberikan email palsu, memata-matai, rekayasa sosial dan penipuan untuk dapat masuk ke dalam sistem pertahanan korban dan menaruh file tersembunyi yang berguna untuk menjalankan kode berbahaya menyusup serta melewati keamanan siber yang aktif di jaringan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa sepengetahuan korban yang akhirnya terjadi pencurian data.

Indonesia mengalami kebocoran data meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan motif pada umumnya adalah finansial, di tahun 2019 saat Pilpres terjadi kebocoran data pribadi sebanyak 2 juta termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimuat di situs gelap *(darkweb)*, tahun 2020 kebocoran data Tokopedia sebanyak 91 juta akun, alamat email berikut kata sandi. Tahun 2021 terjadi pada situs *Jobstreet* yang memuat data pribadi pelamar kerja, di tahun yang sama data BPJS kesehatan mengalami kebocoran di internet yang memuat identitas pribadi dan informasi medis. Tahun 2022 terjadi kebocoran data pada perusahaan jasa keuangan Indonesia berupa data informasi pelanggan dan transaksi keuangan, di tahun yang sama data Tokopedia untuk kedua kali mengalami kebocoran dengan jumlah 8 juta pengguna.

Di tahun 2023 menjadi tahun dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 35 kasus dan di tahun 2024 terjadi kebocoran pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dibobol oleh grup *Ransomware Brain Chiper*, serangan ini mengunci data di 282 kementerian/lembaga dan meminta tebusan 8 juta dolar AS atau Rp. 131 miliar dengan target sektor Pemerintahan.

Memperhatikan situasi di ruang siber, di tahun 2014 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Pedoman ini mewujudkan kerangka penyelenggaraan pertahanan siber yang harus dipahami dan dipedomani oleh institusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan terbitnya Pedoman tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan terkait hendaknya dapat menghayati dan mempedomani sehingga terdapat kesamaan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin keamanan jaringan dan muatannya di sektor pertahanan.

Untuk menjalankan amanah tersebut, di tahun 2019 TNI AD mengeluarkan kebijakan membentuk unit satuan kerja yang dapat menangkal, memulihkan dan menindak terhadap kemungkinan ancaman dan serangan siber yaitu Pusat Sandi dan Siber TNI AD disingkat Pussansiad.

Pussansiad sebagai institusi yang membidangi Sandi dan Siber di TNI AD sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat Lampiran XXX Organisasi dan Tugas Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Uji Coba) yang saat ini sudah direvisi menjadi Keputusan Kasad Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan personel serta fungsi sandi dan siber dalam rangka mendukung tugas TNI AD.

Perkembangan Ancaman Dan Serangan Siber Saat Ini Serta Dampak Terhadap Kebocoran Data

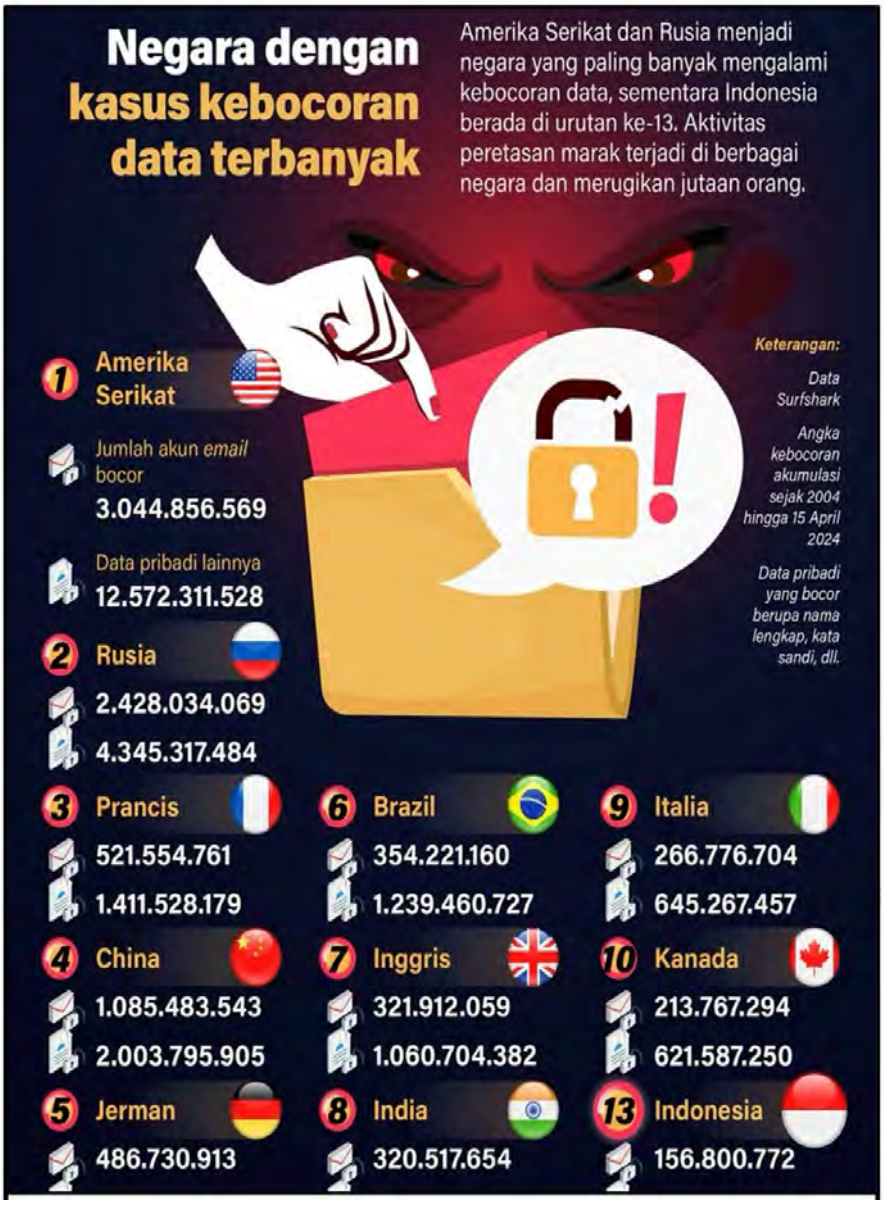

Sumber : https://www.antaranews.com/infografik/4179057/negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak

Ancaman siber adalah keinginan dan kemampuan dari pihak tertentu baik aktor negara maupun aktor non negara yang mempunyai potensi dan kemungkinan untuk bermanifestasi dalam bentuk serangan di ruang siber yang terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan infrastruktur, lapisan jaringan logika dan lapisan sosial (Sumber BSSN, 2021, Rancangan Strategi Keamanan Siber Nasional RI).

Serangan siber adalah manifestasi dari ancaman siber yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi kedaulatan ruang siber yang terdiri dari serangan teknis dan serangan sosial. Serangan teknis merupakan serangan yang ditujukan kepada lapisan fisik untuk mendapatkan akses ilegal pada jaringan dan sistem ruang siber dengan tujuan untuk menghancurkan, mengubah, mencuri dan memanipulasi data dan informasi. Sedangkan serangan sosial adalah upaya untuk mempengaruhi dan memanfaatkan kelemahan Emosi, Sikap, Tingkah laku, Opini dan Motivasi (ESTOM) manusia melalui ruang siber guna mendapatkan informasi penting yang bersifat kredensial. Adapun bentuk serangan siber berupa *Advanced Persistent Threats (APT), Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Service (DDoS), Defacement, Phishing, Malware* dan *Spam*.

Serangan siber dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk mencuri, mengekspos, mengubah, melumpuhkan atau menghancurkan aset melalui akses tidak sah ke sistem komputer.

Kebocoran Data Melalui Hardware, Software Dan Suku Cadang

Potensi kebocoran data mencakup berbagai risiko yang dapat mengakibatkan pembocoran informasi sensitif. Kebocoran data dapat terjadi di berbagai tingkat dan melalui berbagai saluran, mulai dari sistem internal organisasi hingga perangkat pengguna akhir *(end point)*, meliputi :

- **Sistem Internal**. Data yang tersimpan dan dikelola oleh sistem organisasi seperti server, database dan aplikasi internal yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi ancaman dan memudahkan peretas untuk melakukan serangan.

- **Perangkat pengguna.** Sebagai media akses yang digunakan user seperti komputer, *smartphone* dan tablet dalam bertransaksi dan mengolah data, apabila sudah terinveksi virus dan *malware* akan rentan pencurian data.

- **Sistem rantai pasokan (suku cadang).** Suku cadang melibatkan pihak ketiga (mitra) sebagai pemasok, menjadi rentan terhadap adanya injeksi kode berbahaya yang disisipkan pada *software* atau *hardware* selama proses distribusi.

- **Jaringan dan komunikasi data.** Media komunikasi data seperti email, pesan singkat dan komunikasi *online (chat)* menjadi rentan bila tidak ada sistem pengaturan yang baik dan aman, menimbulkan serangan yang mengintersepsi data saat bertransaksi di jaringan komunikasi data (*Intercept* dan *Man-in-the-Middle Attacks*).

- **Kesalahan manusia.** Kelalaian personel dalam menjaga data kredensial dan tidak mempedomi keamanan data digital dapat menyebabkan kebocoran data, seperti mengirim email dengan alamat dan lampiran yang salah, pengaturan akses yang tidak benar, lemahnya literasi digital dan hilangnya perangkat.

- **Adanya serangan siber.** Serangan terjadi adanya celah keamanan pada sistem keamanan data digital yang dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan akses secara ilegal, seperti *ransomware*, *DDoS* dan eksploitasi sistem aplikasi.

- **Ancaman dari dalam.** Ancaman berupa personel dari dalam yang memiliki akses tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok dengan menjual atau memanipulasi data.**Kesalahan**

pengaturan dan konfigurasi. Pengaturan sistem keamanan yang tidak benar menjadi ancaman pada jaringan, data dan manusia sehingga memberikan peluang peretas untuk mendapatkan hak akses secara ilegal.

Potensi kebocoran data berasal dari berbagai sumber dan dapat memiliki dampak signifikan pada individu dan organisasi. Identifikasi dan mitigasi risiko melalui kebijakan keamanan yang kuat, pelatihan yang efektif, dan teknologi yang tepat sangat penting untuk melindungi data dan mengurangi kemungkinan kebocoran

Upaya Mencegah Kebocoran Data

Dampak kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial, merusak reputasi, menjadi tersangka dan dituntut secara hukum akibat kebocoran data karena tidak mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Penyelenggara Sistem Elektronik (UU PSE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta menjadi ancaman data privasi seseorang yang dimungkinkan disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh institusi sebagai penyelanggara, pengelola dan pengguna sistem informasi adalah:

Penyelenggara sistem informasi.

- **Menerapkan kebijakan keamanan data.** Menyusun dan menerapkan perlindungan data yang jelas, termasuk prosedur untuk penanganan data sensitif, pengaturan akses, dan pemantauan aktivitas serta patuh terhadap peraturan dan standar perlindungan data yang tertuang dalam UU PDP.
- **Pengamanan infrastruktur dan teknologi.** Mengenkripsi data saat transit, disimpan dan berbagi dengan pihak lain, mengimplementasikan firewall, sistem deteksi intrusi (IDS) dan sistem pencegahan intrusi (IPS) untuk melindungi komunikasi data dalam jaringan serta melakukan pembaharuan rutin sistem aplikasi *(patching)* dan backup data.
- **Kontrol akses dan otentikasi.** Menerapkan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan bahwa hanya user yang mempunyai peran yang dapat mengakses dan mengimplementasikan otentikasi multi faktor untuk meningkatkan keamanan akses pada sistem.
- **Pengecekan sistem kerja keamanan aplikasi.** Melakukan pengecekan keamanan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan prosedur perlindungan data.
- **Pelaporan insiden.** Menetapkan prosedur pelaporan insiden kebocoran data untuk memastikan penanganan yang cepat dan transparan.

Pengelola sistem informasi.

- **Manajemen risiko dan kepatuhan.** Melakukan identifikasi dan memahami potensi ancaman terhadap data dan sistem serta memastikan bahwa kebijakan keamanan data diterapkan dan dipatuhi.
- **Pengelolaan akses dan hak istimewa.** Menerapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hak istimewa diberikan sesuai dengan kebutuhan peran pengguna dan melakukan reviu rutin terhadap hak akses peran pengguna serta mencabut hak akses yang tidak lagi diperlukan.
- **Keamanan data dan infrastruktur.** Melakukan *backup* data secara berkala dan memastikan bahwa rencana pemulihan data tersedia dan dapat diuji serta pastikan bahwa semua sistem dan aplikasi dilindungi dengan baik, termasuk

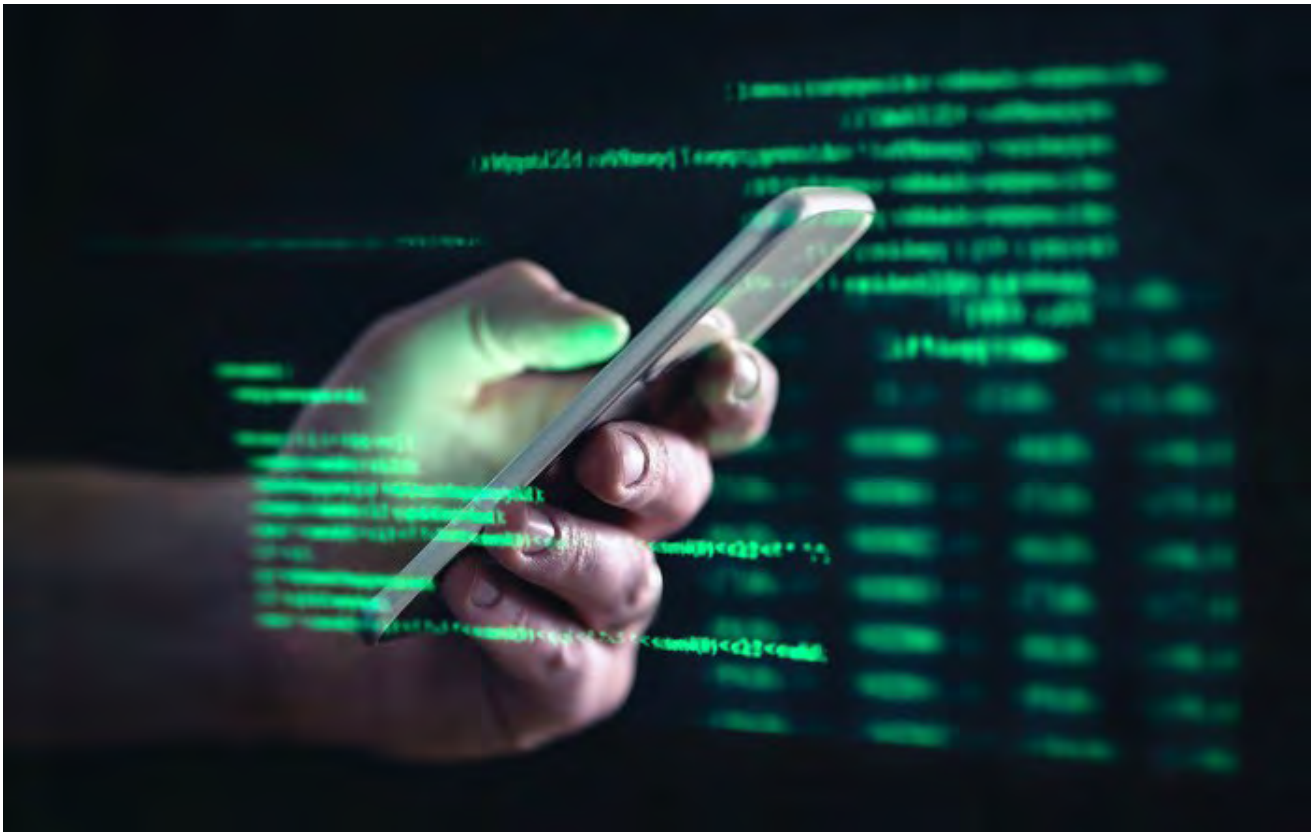

penerapan antivirus, firewall, dan sistem deteksi intrusi (IDS).

- **Pelatihan.** Memberikan pelatihan kepada personel tentang praktik keamanan terbaik, risiko kebocoran data, dan cara melindungi data sensitif.

Pengguna sistem informasi.

- **Keamanan pribadi.** Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta menggantinya secara berkala dan mengaktifkan *Otentikasi Multi-Faktor* (MFA) pada akun yang mendukung untuk meningkatkan keamanan akses.
- **Kesadaran dan pendidikan.** Memahami tanda-tanda phishing dan penipuan untuk menghindari membuka email atau tautan yang mencurigakan serta menjaga perangkat pribadi dengan perangkat lunak keamanan yang mutakhir dan melakukan pembaruan rutin.
- **Kelola data sensitif.** Tidak membagikan informasi sensitif secara sembarangan atau di tempat yang tidak aman dan menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif yang disimpan di perangkat pribadi.
- **Pelaporan insiden.** Melaporkan setiap insiden atau kecurigaan terhadap kebocoran data kepada pihak yang berwenang atau tim TI dan mengganti kata sandi segera jika ada kecurigaan bahwa kata sandi telah bocor.

Dalam upaya pencegahan terjadinya kebocoran data, memerlukan pendekatan yang menyeluruh melibatkan penyelenggara, pengelola, dan pengguna sistem informasi. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kuat, pengelolaan akses yang efektif, pelatihan dan kesadaran, serta tindakan tanggap darurat yang tepat, risiko kebocoran data dapat dikurangi secara signifikan. Pencegahan dan respons yang efektif adalah kunci untuk melindungi informasi sensitif dan meminimalkan dampak dari kebocoran data yang mungkin terjadi.

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL TNI AD

MELALUI PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR TERAPAN DI POLTEKAD

Oleh: Brigjen TNI Dr. Rachmat S., S. Si., M.M., M.Tr. (Han).
(Danpoltekad)

Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi persenjataan yang pesat, tantangan di bidang militer kini melampaui sekadar persenjataan konvensional. Teknologi canggih seperti sistem persenjataan modern, kecerdasan buatan, robotika, nano teknologi, serta alat telekomunikasi dan satelit telah secara drastis mengubah dinamika perang modern. Saat ini, hampir setiap negara berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata dan peluru kendali, kendaraan tempur tanpa awak, dan menghadapi ancaman perang nuklir, biologis, kimia, dan asimetris (CBRN).

Saat ini pergeseran signifikan dalam taktik, teknik, dan strategi militer, termasuk dalam pengembangan alat utama sistem senjata (Alutsista). Hal inilah yang menjadi tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi dunia militer saat ini. Ditengah kompleksitas persoalan tersebut, kesiapan dalam bidang pendidikan untuk menyiapkan SDM yang profesional dan berkualitas menjadi krusial, sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, pendidikan yang dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia khususnya di lingkungan TNI AD harus berorientasi pada tuntutan dan tantangan perkembangan zaman. Harapannya adalah ***"keterbatasan sumber daya manusia pada level manajerial di bidang riset dan teknologi dapat terata***si".

Apakah SDM TNI AD telah mampu dan siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya sejauh mana pendidikan spesialisasi yang dilaksanakan di Lemdik TNI AD saat ini telah mampu menghasilkan prajurit yang siap menghadapi perubahan, dan apakah TNI AD telah mengembangkan lembaga pendidikan yang mampu menjawab perubahan serta menerapkan sistem pendidikan sesuai standar Sisdiknas atau sesuai peraturan badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan pendidikan tinggi khususnya pendidikan vokasi.

Strategi pengembangan sumber daya manusia unggul TNI AD menjadi alasan atau pertimbangan perlunya pengembangan sumber daya manusia unggul TNI AD, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan Lemdik TNI AD untuk menciptakan sumber daya manusia unggul TNI AD.

Dari berbagai perspektif permasalahan tersebut, diharapkan akan dirumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi perubahan yang ada. Saat ini, lulusan D-4 poltekad berada pada level KKNI 6 dan 7. Berdasarkan kriteria tersebut, lulusannya dituntut memiliki kemampuan yaitu : pertama mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan keahliannya serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, kedua, menguasai konsep teoretis berupa pengetahuan tertentu secara umum dan bagian khusus secara mendalam, ketiga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dan terakhir betanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Adapun profil lulusan Poltekad adalah sebagai instruktur, teknisi, dan asisten peneliti.

Meskipun kualifikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan dasar, namun untuk menghadapi tantangan teknologi yang semakin modern, diperlukan SDM yang berada pada level yang lebih tinggi yaitu pada level 8 dan 9 sebagai manajerial pada bidang riset & teknologi, dimana kreteria pada level 8 (tingkat magister) dituntut mampu mengembangkan, memecahkan permasalahan dan mengelola riset serta pengembangan pengetahuan, teknologi, di bidang keilmuannya. Sedangkan untuk level KKNI 9 (tingkat doktoral) dituntut mampu mengembangkan, memecahkan permasalahan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya.

Pendidikan spesialisasi yang dilaksanakan di Lemdik TNI AD diselenggarakan untuk menghasilkan prajurit yang siap menghadapi perubahan yang berkembang di masa mendatang. Apabila kita melihat dari standar KKNI yang merupakan standar nasional kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia yang menjadi rujukan standar nasional dalam pengembangan karir berbasis pelatihan kerja dan pengalaman kerja bahwa tingkat pendidikan spesialisasi setingkat Tamtama dan Bintara yang dilaksanakan di lembaga pendidikan militer berada pada level 1 sampai 4 atau setingkat operator.

Politeknik Angkatan Darat merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi vokasi yang dimiliki TNI AD yang berorientasi pada pengembangan teknologi dalam bidang Alutsista matra darat. Fokus utama Poltekad adalah pada pendidikan vokasional untuk mendukung berbagai kesenjataan atau kecabangan yang ada di TNI AD. Poltekad memiliki kekhasan atau sui generis dalam pendidikan vokasi bidang militer, yang secara langsung mendukung pengembangan teknologi alutsista matra darat. Kurikulum Poltekad

didesain khusus sesuai dengan kebutuhan dan standar TNI Angkatan Darat. Sehingga diharapkan bahwa lulusan Poltekad memiliki kemampuan yang sesuai dalam menghadapi tantangan di lapangan, baik dalam tataran teknis maupun operasional. Berbeda dengan Politeknik umum yang memiliki cakupan yang lebih luas dan berorientasi kepada kebutuhan industri. Poltekad secara khusus mengarahkan pendidikan vokasionalnya dengan berorientasi pada kebutuhan industri militer termasuk dalam pengembangan keterampilan pada sistem pertahanan, keamanan, dan teknologi Alutsista Matra Darat. Poltekad menghasilkan lulusan yang setara dengan KKNI pada level 6 dan 7 sehingga lulusan siap untuk langsung berkontribusi di satuan-satuan operasional TNI Angkatan Darat.

Perkembangan pendidikan tinggi kedinasan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Berbagai perguruan tinggi kedinasan di bawah berbagai kementerian telah berhasil menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang Doktoral (S-3). Beberapa diantaranya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) memiliki program studi Magister (S-2) dengan beragam spesialisasi seperti intelijen medik, kimia dan bahaya nuklir, bahaya biologis, teknologi dan cyber, serta intelijen ekonomi. STIN juga menawarkan program Doktoral dalam Studi Analisis Strategi Intelijen. Pendekatan yang diangkat terkait peran penting intelijen dalam mendukung keamanan nasional. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK): menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang kepolisian dengan berbagai program studi, termasuk yang berfokus

pada manajemen kepolisian, kriminologi, dan strategi keamanan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): fokus pada pengembangan SDM di bidang pemerintahan daerah, mempersiapkan kader-kader yang kompeten untuk mengelola dan memimpin pemerintahan. Politeknik STIA LAN Jakarta: dengan program di bidang administrasi negara dan manajemen publik, dengan pendekatan vokasional yang relevan dengan tuntutan administrasi pemerintahan. Perguruan tinggi kedinasan tidak hanya menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional melalui penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan negara.

Apakah saat ini TNI AD telah mengembangkan lembaga pendidikan yang mampu menjawab perubahan tersebut? Saat ini TNI AD memiliki tiga lembaga perguruan tinggi diantaranya Akademi Militer (Akmil) yang melaksanakan pendidikan pertama dengan jenjang pendidikan Diploma 4/ sarjana terapan, lembaga pendidikan tinggi berikutnya adalah Sekolah Tinggi Hukum Militer atau yang biasa disebut STHM dimana perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan pada jenjang S-1 dan magister sedangkan Poltekad saat ini menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma 4/sarjana terapan dan Program Magister Terapan Strategi Operasi Darat (Seskoad).

Untuk Akmil saat ini menyelenggarakan pendidikan Diploma-4 yang lebih mengarah ke Pendidikan Pertama Militer (Dikma), sedangkan STHM menyelenggarakan pendidikan S1 dan S2 yang berorientasi dan fokus pada di bidang hukum militer. Disisi lain, Poltekad sebagai perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan pendidikan untuk berbagai disiplin ilmu sangat berpotensi dikembangkan untuk membuka progam studi lain setingkat Diploma 4/Sarjana Terapan untuk bisa mengakomodir kebutuhan berbagai kesenjataan dan kecabangan serta program magister dan doktoral terapan untuk memenuhi kebutuhan tingkat managerial dalam bidang riset dan teknologi.

Poltekad juga telah mencoba menyusun dan merumuskan konsep rencana pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai standar BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta penyelenggaraan program pendidikan melalui jalur Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mensertifikasi lulusan kursus kursus tertentu di kecabangan sesuai dengan skema yang ada untuk kepentingan RPL.

Saat ini TNI AD belum menerapkan sistem pendidikan sesuai standar Sisdiknas atau sesuai peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dan Pendidikan Tinggi khususnya pendidikan Vokasi. Di era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap pendidikan sangat terkait dengan standar pendidikan nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka referensi yang digunakan untuk mengatur dan mengukur kualifikasi pendidikan dan pelatihan di indonesia, yang

memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan kerangka kualifikasi internasional. Lembaga pendidikan tinggi di jajaran TNI AD yang saat telah menerapkan Sisdik sesuai standar nasional DIKTI adalah Akmil, STHM maupun Poltekad

Politeknik Angkatan Darat telah memperoleh sertifikat Akreditasi Baik Sekali pada 9 Agustus 2022 yang berlaku sampai dengan 5 tahun kedepan. Sedangkan status akreditasi untuk enam prodi yang dioperasionalkan di Poltekad diantaranya Progam Studi Teknik Elektronika Sistem Senjata dengan Status Unggul, Program Studi Otomotif Kendaraan Tempur dan Program Studi Teknik Telekomunikasi Militer status baik sekali, untuk Program Studi Teknik Rekayasa Keamanan Siber dan Teknik Rekayasa Persenjataan Militer menyandang predikat baik, begitu juga dengan Prodi Magister Terapan Strategi Operasi Darat (Seskoad) dengan Predikat Baik. Selanjutnya dalam era perang modern yang semakin kompleks dan dinamis, TNI Angkatan Darat dihadapkan pada tugas yang menuntut kesiapan dan kemampuan yang tinggi. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan SDM dengan kualifikasi minimal pada level KKNI 8, yang mampu tidak hanya menjalankan tugas-tugas rutin, tetapi juga mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru yang relevan dalam bidang keilmuannya.

Kualifikasi SDM pada level KKNI 8 menuntut kemampuan untuk melakukan riset yang mendalam dan menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Ini mencakup pengembangan teknologi Alutsista yang mandiri, sesuai dengan amanat dari Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan untuk mencapai kemandirian teknologi. Program Magister dan Doktor menjadi tulang punggung dalam mencetak SDM dengan kualifikasi KKNI 8 dan KKNI 9 (Doktor/Doktor Terapan). Program ini tidak hanya menyediakan pendalaman ilmu yang dibutuhkan, tetapi juga mendorong inovasi melalui penelitian yang terfokus pada solusi-solusi teknologi untuk kebutuhan pertahanan nasional guna tercapainya kemandirian industri pertahanan nasional, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) maupun technology readiness level (TRL).

Tugas TNI AD dalam menghadapi perubahan lanskap perang modern tidak hanya memerlukan SDM yang terlatih, tetapi juga mampu menghasilkan karya inovatif yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Melalui program magister dan doktor dengan fokus pada teknologi Alutsista, kita dapat memastikan bahwa setiap lulusan dapat menjadi SDM unggul TNI AD yang siap untuk menghadapi tantangan kompleks dalam mengembangkan, menguji, dan menerapkan teknologi Alutsista yang mandiri .

Pada peran sebagai peneliti ahli madya dan inovator bidang Litbang di satuan-satuan TNI AD, lulusan berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang mendukung kemajuan militer. Keahlian khusus lulusan meliputi teknologi militer, strategi pertahanan, manajemen sumber daya manusia militer, dan keamanan nasional. Melalui penelitian yang mendalam dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya profil lulusan sebagai dosen bidang inovasi dan teknologi militer di lembaga pendidikan di satuan-satuan TNI, lulusan memiliki kewajiban untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang inovasi dalam teknologi militer.

Sebagai perwira perencana strategis bidang teknologi alutsista di satuan-satuan TNI AD, bertugas menganalisis situasi keamanan yang kompleks dan mendalam. Mengembangkan strategi pertahanan yang efektif dan adaptif untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin timbul saat ini dan masa depan. Selanjutnya secara rinci tentang profil lulusan Doktoral (S-3) terapan yang akan dihasilkan bila Poltekad membuka program doktor terapan sebagai berikut: pertama adalah peneliti ahli utama di bidang Litbang teknologi militer, sebagai peneliti ahli utama, fokus utama lulusan adalah mengawal arah strategis dan keberhasilan keseluruhan program penelitian yang berkaitan dengan litbang teknologi militer di TNI AD. Diantaranya mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi militer canggih serta

merancang dan mengimplementasikan inovasi-inovasi dalam sistem alutsista. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk industri dan lembaga penelitian, untuk menciptakan solusi holistik dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Kedua adalah sebagai dosen dan peneliti di bidang inovasi dan teknologi militer yang mampu mendorong pengembangan keilmuan di bidang inovasi dan teknologi militer di lembaga pendidikan TNI. Mengajarkan dan menginspirasi para peneliti generasi muda di bidang peneliti dalam mengeksplorasi potensi teknologi untuk kepentingan pertahanan nasional. Memastikan bahwa standar pendidikan tinggi yang ketat diterapkan untuk mencetak para pemimpin masa depan di bidang ini. Ketiga adalah sebagai perwira perencana strategis di bidang teknologi alutsista yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan kebijakan pertahanan yang efektif, khususnya terkait dengan teknologi alutsista. Memastikan integrasi yang mulus antara pengembangan teknologi dengan strategi pertahanan nasional yang lebih luas. Dengan spesialisasi tingkat lanjut dalam teknologi militer, kebijakan pertahanan, dan strategi keamanan nasional, lulusan berkomperensi untuk memberikan konstribusi yang optimal bagi TNI AD.

Dari uraian di atas disimpulkan:

- Sumber Daya Manusia TNI AD yang dihasilkan dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di jajaran TNI AD saat ini masih berada pada level KKNI 1 s.d. 7 sehingga diperlukan wadah atau lembaga pendidikan tinggi yang dapat mencetak SDM yang berada pada level KKNI 8 dan 9.
- Lembaga pendidikan di jajaran TNI AD yang menyelenggarakan pendidikan spesialisasi khususnya setingkat tamtama dan bintara saat ini masih berada pada level KKNI 1 s.d. 4.
- Poltekad memiliki potensi untuk mengembangkan Prodinya sesuai dengan kebutuhan kecabangan dan kesenjataan yang ada di TNI AD sampai dengan program magister bahkan sampai Program Doktoral dengan multi disiplin ilmu, membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi berstandar BNSP serta menyelenggarakan program RPL.
- Tiga lembaga pendidikan tinggi TNI AD diantaran Akmil, STHM dan Poltekad saat ini sudah sesuai dengan standar nasional/Dikti, sedangkan untuk Lemdik jajaran TNI AD perlu dilaksanakan standarisasi lulusan melalui program LSP maupun RPL yang akan yang dimungkinkan dan berpotensi dilaksanakan di Poltekad.

Saran yang dapat disampaikan:

- Perlu adanya pengembangan Program Studi Diploma-4 sesuai kebutuhan kecabangan atau kesenjataan di lingkungan TNI AD dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam bidang riset dan teknologi.
- Perlu adanya pengembangkan Program Magister dan Doktoral terapan untuk menghasilkan lulusan yang nantinya diharapkan dapat mengisi posisi pada level manajerial di bidang riset dan teknologi.
- Perlu adanya pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dalam rangka mewadahi sertifikasi profesi di lingkungan TNI AD di bidang teknologi dalam rangka pembentukan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
- Dengan pertimbangan bahwa dengan status poltekad sebagai sebuah perguruan tinggi vokasi yang dimiliki TNI AD yang bisa menyelenggarakan pendidikan multi dimensi ilmu sampai setingkat Magister dan Doktoral, poltekad berpotensi dan memungkinkan dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM TNI AD berkualitas guna menghadapi tantangan tugas kedepan.

MENGHIDUPKAN LAHAN MATI: REVOLUSI *URBAN FARMING* BAWANG MERAH DI KOREM 051/WIJAYAKARTA

Oleh : Brigjen TNI Riyanto, S.I.P,
(Danrem 051/Wijayakarta)

Ketahanan Pangan dalam Bayang-Bayang Urbanisasi

Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi yang terus bertambah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan. Urbanisasi yang pesat telah menyusutkan lahan pertanian produktif, meningkatkan kebutuhan pangan, dan memperumit distribusi pangan di wilayah perkotaan. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga tentang akses yang merata dan stabilitas pasokan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Masalah ketahanan pangan diperparah oleh perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian dalam produksi pertanian. Ketergantungan pada impor pangan semakin meningkat, mencerminkan ketidakmampuan produksi domestik untuk mengimbangi permintaan yang terus bertambah. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga akhir 2023, impor pangan Indonesia mencapai US$ 13,8 miliar atau sekitar Rp 215,42 triliun, seiring dengan inflasi pangan yang terus membayangi. Pada tahun 2022, inflasi pangan Indonesia mencapai 7,38%, jauh di atas target pemerintah. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah menjadi salah satu pendorong utama inflasi. Hal ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga stabilitas harga.

Urbanisasi yang tidak terkendali juga mempersempit lahan pertanian, memaksa banyak petani untuk meninggalkan lahan mereka dan berpindah ke kota. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang semakin besar pada impor pangan, terutama di wilayah perkotaan yang

Lahan Urban Farming Korem 051/Wijayakarta dikawasan Industri Jababeka Bekasi

"Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan Panen Bawang Merah di lahan Urban Farming Korem 051/Wijayakarta Kodam Jaya/Jayakarta"

populasinya terus bertambah. Kodam Jaya mencoba menawarkan alternatif solusi untuk membantu mengatasi persoalan diatas melalui Program *Urban Farming*,berawal dari inisiatif Pangdam Jaya saat itu, Mayjen TNI Mohamad Hasan, SH, MH, yang melihat potensi besar lahan kosong di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta, yang kemudian ditindaklanjuti oleh satuan satuan jajaran. Salah satu solusi yang kini menarik perhatian adalah Urban Farming atau pertanian perkotaan, yang mengubah lahan-lahan tidak produktif di perkotaan menjadi area pertanian yang subur. Di wilayah Korem 051/Wijayakarta, program *Urban Farming* difokuskan pada budidaya bawang merah, sebuah komoditas strategis yang sering kali menjadi penentu stabilitas harga dan inflasi di Indonesia.

Program *Urban Farming* ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembinaan teritorial TNI dalam memperkuat hubungan antara militer dan masyarakat. Bawang merah, salah satu komoditas strategis yang sering terabaikan, dipilih sebagai fokus utama program ini.

Urban Farming: Mengubah Lahan Perkotaan menjadi Penyangga Ketahanan Pangan

Urban Farming bukanlah konsep baru di dunia, tetapi di Indonesia, gagasan ini masih dalam tahap pengembangan. Di banyak negara maju, *Urban Farming* telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan. *Urban Farming* menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan produksi pangan tanpa harus mengorbankan lahan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur. Namun, di Indonesia, *Urban Farming* bukan hanya tentang menambah pasokan pangan, tetapi juga tentang menjaga dan meningkatkan keterampilan bertani di tengah masyarakat perkotaan. *Urban Farming* memanfaatkan lahan-lahan kecil yang tidak produktif di perkotaan untuk budidaya tanaman pangan, ternak, dan bahkan perikanan. Konsep ini, juga mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah pedesaan, yang sering kali membutuhkan transportasi jarak jauh. Dengan mengurangi jejak karbon dari distribusi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, *Urban Farming* juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan menjadi laboratorium hidup bagi masyarakat untuk mengembangkan serta menerapkan teknologi baru dalam pertanian. *Urban Farming* menyediakan ruang bagi warga untuk belajar dan berlatih menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju danmemungkinkan transfer teknologi ke daerah pedesaan.

Di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, *Urban Farming* telah berkembang pesat dengan berbagai teknologi canggih seperti hidroponik, akuaponik, dan vertikultur yang memungkinkan produksi pangan di lahan yang sangat terbatas. Singapura, misalnya, telah mengembangkan *Sky Greens,* sebuah pertanian vertikal yang hemat lahan dan ramah lingkungan. *Sky Greens* menggunakan sistem vertikal yang memungkinkan penanaman berbagai sayuran dalam ruang yang sangat terbatas, memberikan solusi bagi negara yang hampir tidak memiliki lahan pertanian.

Di Indonesia, *Urban Farming* mulai mendapatkan perhatian serius sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan urbanisasi yang pesat. Di bawah bendera Korem 051/ Wijayakarta, program ini fokus pada budidaya bawang merah, sebuah komoditas yang sering kali menjadi penentu stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia. “Kalau pangan terganggu, negara terganggu, dunia terganggu, tidak ada pangan, tidak ada negara dan tidak ada peradaban”, kata Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman disela sela kunjungan panen bersama dengan Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di lahan *Urban Farming* Korem 051/Wijayakarta Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi.

Bawang Merah: Komoditas Strategis yang Kerap Terabaikan

Bawang merah mungkin tampak sederhana, tetapi perannya dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Bawang merah adalah salah satu bahan pokok dalam masakan Indonesia, dengan permintaan yang tinggi dan stabil sepanjang tahun. Namun, fluktuasi harga bawang merah sering kali berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas langsung terasa pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.Indonesia adalah salah satu produsen bawang merah terbesar di dunia, tetapi tantangan dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi tetap ada. Ketergantungan pada pola cuaca yang tidak menentu, serangan hama, serta ketidakstabilan harga pasar menjadi beberapa faktor yang sering kali mengguncang pasar bawang merah domestik. Dalam wawancara dengan para pakar ekonomi pertanian, mereka menegaskan pentingnya menjaga stabilitas produksi bawang merah untuk menghindari gejolak harga yang dapat memicu inflasi. “Bawang merah adalah salah satu bahan pokok dalam diet masyarakat Indonesia. Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak, dampaknya bisa sangat luas,” ujar Dr. Hasanuddin, ekonom pertanian dari Universitas Indonesia.

Menurut data BPS, produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 1,5 juta ton, tetapi kebutuhan domestik yang terus meningkat menyebabkan kesenjangan antara pasokan dan permintaan. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor bawang merah untuk menutupi kekurangan ini. Impor bawang merah ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga membuat harga bawang merah di pasar domestik sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Bagi banyak petani, bawang merah adalah sumber pendapatan utama yang menopang kesejahteraan keluarga mereka. Namun, dengan berkembangnya urbanisasi, lahan pertanian di pedesaan semakin berkurang.Urban Farming memberikan peluang bagi masyarakat perkotaan untuk turut serta dalam produksi komoditas ini,

“Upaya mendukung program ketahanan pangan nasional Kementan RI dan KASAD panen raya bawang merah di lahan Wanajaya”

sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari daerah pedesaan.

Program Urban Farming di Korem 051/Wijayakarta memberdayakan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan di tingkat lokal. Melalui program ini, lahan-lahan kosong di sekitar perkotaan yang sebelumnya tidak produktif diubah menjadi lahan pertanian yang subur. Urban Farming juga berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat perkotaan tentang pentingnya pertanian dan kemandirian pangan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah tekanan urbanisasi.

Strategi Pelaksanaan Urban Farming di Korem 051/Wijayakarta

Setelah lahan diidentifikasi, perencanaan strategi pembukaan lahan dan memastikan ketersediaan air, karena setiap wilayah memiliki masalah air yang berbeda. Wilayah Korem 051/Wijayakarta, yang mencakup area rawan banjir dan kekeringan, memberikan tantangan unik dalam hal pengelolaan air. Wilayah Wanajaya yang menjadi lokasi demplot bawang merah pertama, masalah utama adalah air yang berlebihan selama musim hujan. Untuk mengatasi tantangan ini, diterapkan teknologi *“Canal bloking system,”* Dimana distribusi air dapat diatur secara merata ke setiap petak lahan, sekaligus mencegah kelebihan air melalui sistem drainase yang efisien, untuk memastikan kelebihan air saat musim hujan dapat dialirkan ke petak lahan yang membutuhkan sesuai dengan level yang diharapkan, sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak

banyak volume air yang terbuang. Sebaliknya, di wilayah dengan sumber air terbatas, seperti di Kodim 0508/Depok yang juga berada di bawah Korem 051/Wijayakarta, tantangan air yang minim diatasi dengan teknologi embung, penggunaan mulsa, dan sistem irigasi tetes. Embung berfungsi sebagai penampung air yang dapat digunakan selama musim kering, sementara mulsa membantu menjaga kelembaban tanah. Irigasi tetes menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tetes air dimanfaatkan secara optimal.

Setelah strategi air yang terintegrasi diterapkan, barulah proses persiapan tanah dimulai. Pembedengan lahan dilakukan, diikuti dengan pemupukan awal menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik tidak hanya memperkaya tanah dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bawang merah, tetapi juga meningkatkan kesehatan tanah dalam jangka panjang. Pupuk organik membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tanah.

Program ini juga mengintegrasikan teknologi pemantauan kelembaban tanah dan cuaca, yang memungkinkan para petani untuk melakukan penyesuaian *real-time* terhadap sistem irigasi berdasarkan kondisi lapangan. Teknologi ini membantu mencegah kegagalan panen akibat kekurangan atau kelebihan air, serta memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Teknologi dan Inovasi dalam *Urban Farming*

Penerapan *Canal bloking system*, sebuah metode pengelolaan air, dirancang untuk mengatasi masalah kerendam dan rebutan air yang sering terjadi di lahan pertanian. Dengan teknologi ini, lahan-lahan yang sebelumnya sering tergenang air kini dapat dioptimalkan. Hasilnya luar biasa; produksi bawang merah di lahan yang menggunakan teknologi ini meningkat menjadi 9-10 ton per hektar. Secara ekonomi, nilai lahan sawah yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar Rp 60 juta per tahun, kini berpotensi menghasilkan Rp 300 hingga Rp 600 juta per tahun.

Teknologi lain yang diperkenalkan dalam program ini termasuk hidroponik dan vertikultur. Hidroponik, yang memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah menggunakan larutan nutrisi yang dikelola dengan cermat, sangat cocok diterapkan di lahan perkotaan yang terbatas. Meskipun investasi awal untuk teknologi ini cukup besar, manfaat jangka panjangnya dalam hal efisiensi dan keberlanjutan sangat menjanjikan.

"Hasil panen produksi bawang merah di lahan Urban Farming mencapai 9-10 ton per Hektar"

"Canal bloking system merupakan strategi pembukaan lahan dan memastikan ketersediaan air"

Inovasi teknologi lainnya termasuk penggunaan sensor untuk pemantauan kelembaban tanah, drone untuk pemantauan kesehatan tanaman, dan analitik data untuk perencanaan produksi. Dengan demikian, program Urban Farming di Korem 051/Wijayakarta tidak hanya mengandalkan teknik budidaya tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang lebih maju untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan tangguh.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari *Urban Farming*

Seiring berjalannya waktu, program Urban Farming bawang merah di Korem 051/Wijayakarta mulai menunjukkan hasil yang nyata dan membawa dampak

ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar.Dari segi ekonomi, telah memberikan kontribusi yang substansial terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Setiap hektar lahan yang dibuka mampu menyerap tenaga kerja dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Sebagai contoh, pembukaan lahan saja membutuhkan anggaran sebesar Rp 20-25 juta, yang melibatkan sekitar 10-15 pekerja laki-laki. Ini adalah tahapan awal yang tidak hanya memberi pekerjaan tetapi juga memutar roda ekonomi lokal. Proses penanaman bawang merah, memerlukan tenaga kerja dari kalangan ibu-ibu, menyerap biaya sekitar Rp 4-5 juta per hektar. Dalam tahap ini, 15-20 orang ibu-ibu setempat dilibatkan, yang tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi mereka tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan memberikan kontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan, yang sering kali menjadi masalah serius di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Perawatan tanaman, mulai dari pemupukan, penyemprotan, hingga pembersihan gulma, juga membuka lapangan pekerjaan yang signifikan. Dalam satu periode tanam, sekitar Rp 20-30 juta didistribusikan untuk upah 10 pekerja yang bertugas menjaga kualitas tanaman.Ketika masa panen tiba, dampak ekonomi dari *Urban Farming* ini semakin terasa. Biaya tenaga kerja untuk panen hingga bawang merah siap dijual mencapai sekitar Rp 15 juta per hektar, dengan mayoritas pekerja adalah ibu-ibu. Mereka tidak hanya mendapatkan upah dari hasil kerja keras mereka tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam proses produksi pangan yang kritis ini.

Dari sisi sosial, program Urban Farming ini juga berhasil mempererat hubungan sosial di antara warga. Keterlibatan aktif dalam setiap tahapan budidaya bawang merah menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. “Kami tidak hanya belajar menanam bawang merah, tetapi juga bagaimana bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya mencapai tujuan bersama,” kata Karsan, salah satu petani yang terlibat dalam program ini. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana *Urban Farming* telah menjadi alat yang efektif untuk memperkuat ikatan sosial di antara warga, memperbaiki kualitas hidup, dan menciptakan peluang ekonomi yang merata.

Selain itu, *Urban Farming* juga berfungsi sebagai alat pembinaan teritorial yang efektif. Melalui program ini, Korem 051/Wijayakarta dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pertanian, TNI tidak hanya berperan sebagai pengaman tetapi juga sebagai pembina dan fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, *Urban Farming* juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, telah membantu mengurangi polusi, meningkatkan kualitas udara, dan memperbaiki estetika lingkungan. Selain itu, *Urban Farming* juga berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman hayati di perkotaan, dengan menyediakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan mereka serta terlibat dalam upaya pelestarian alam melalui pertanian berkelanjutan dan membantu menciptakan kota yang lebih hijau dan sehat.

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan

Meskipun program ini telah menunjukkan hasil yang positif, namun salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja, teknologi, maupun pendanaan. Untuk mengatasi tantangan ini, Korem 051/Wijayakarta telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta.

Perubahan iklim juga menjadi tantangan yang signifikan. Ketidakpastian cuaca dapat mempengaruhi hasil panen dan mengancam keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, adaptasi teknologi

dan inovasi terus dikembangkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan pengelolaan air yang lebih efisien.

Selain itu, tantangan dalam hal distribusi dan pemasaran juga harus diatasi. Meskipun produksi bawang merah telah meningkat, akses ke pasar yang lebih luas masih menjadi hambatan. Kerjasama dengan sektor swasta, membuka akses pasar dan jaringan distribusi yang lebih efisien, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik oleh pasar. Tanpa akses pasar yang memadai, hasil panen berisiko tidak terjual. Mempertahankan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang, membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Prospek dan Pengembangan di Masa Depan

Melihat keberhasilan yang telah dicapai, Korem 051/Wijayakarta berencana untuk terus memperluas lahan dan cakupan komoditas lain yang juga memiliki nilai strategis, seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Urban Farming dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, keberhasilan tanaman bawang merah di masa depan juga menghadirkan tantangan baru. Seperti yang telah dialami oleh wilayah-wilayah sentra bawang merah seperti Brebes, Bima, Nganjuk, dan Kulon Progo, tanpa rotasi tanaman yang tepat, lahan pertanian bisa mengalami penurunan kesuburan yang signifikan, kerusakan tanah karena peningkatan residu pestisida, dan risiko gagal panen yang lebih besar akibat serangan hama yang meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan rotasi tanaman secara teratur, dengan memilih tanaman yang tidak satu keluarga dengan bawang merah, seperti cabai, jagung, atau komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dampak yang besar terhadap inflasi atau potensi kenaikan harga yang membebani masyarakat.

Korem 051/Wijayakarta juga berencana untuk mengembangkan teknologi pertanian yang lebih maju, seperti pertanian vertikal dan penggunaan energi terbarukan dalam produksi pangan. Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengintegrasikan Urban Farming ke dalam rencana pembangunan kota, dengan menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan dan dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang lebih luas.

Kolaborasi dan Sinergi untuk Ketahanan Pangan

Keberhasilan program Urban Farming di Korem 051/Wijayakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak. Tidak hanya TNI, tetapi juga pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan akademisi memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.Kolaborasi dengan sektor swasta, misalnya, dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi yang sangat dibutuhkan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari berbagai perusahaan dapat diarahkan untuk penyediaan infrastruktur, pelatihan, atau dukungan lainnya.Dukungan dari pemerintah juga sangat penting, terutama dalam hal kebijakan insentif seperti subsidi bibit, pupuk, atau peralatan pertanian dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan kelompok tani. LSM dan akademisi berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Melalui penelitian dan pengembangan, akademisi dapat memberikan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan program *Urban Farming*. LSM juga dapat membantu dalam

"Danrem 051/Wkt menerima kunjungan Direktur PT. Hinsa Sejahtera Indonesia Ibu Lulu dan Bapak Ricky di lahan bawang Urban Farming Korem 051/Wijayakarta"

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Sinergi antara berbagai pihak ini akan menjadi kunci keberhasilan *Urban Farming* sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, *Urban Farming* dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di Indonesia.

Menuju Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Program *Urban Farming* bawang merah di Korem 051/Wijayakarta telah membuktikan bahwa lahan kosong di perkotaan dapat diubah menjadi sumber pangan yang produktif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan pembinaan teritorial yang lebih kuat. Dengan sinergi yang kuat, inovasi teknologi, dan kebijakan yang mendukung, *Urban Farming* dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi tantangan pangan di masa depan.

Urban Farming adalah salah satu jalan di mana setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya sebuah impian, tetapi kenyataan yang dapat diraih.

ANCAMAN JUDI ONLINE TERHADAP PERSONEL TNI AD DI ERA DIGITAL : TINJAUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KODAM III/SILIWANGI

Oleh : Brigadir Jenderal TNI Sugiyono
(Kapok Sahli Pangdam III/Siliwangi)

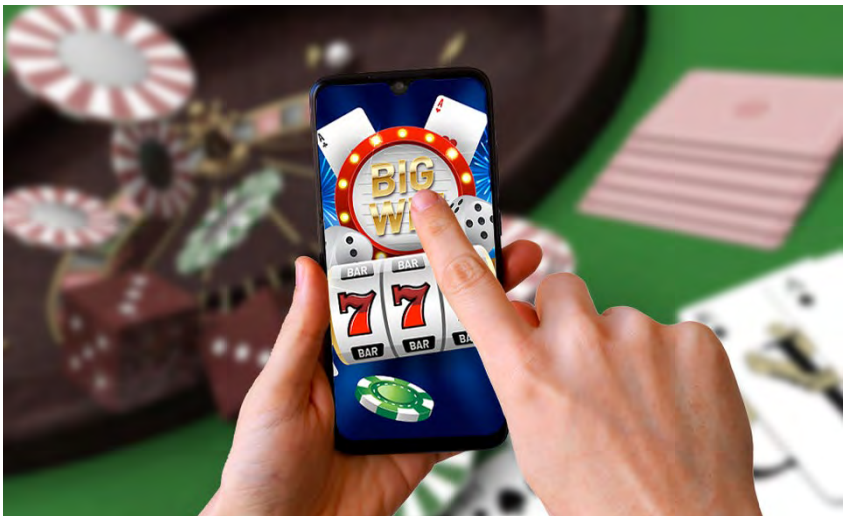

Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini memaksa kepada pemerintah sebagai regulator dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas digital yang berpeluang melahirkan bentuk ancaman terhadap negara. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan realitas virtual (VR) yang dirasakan saat ini telah membawa banyak kemudahan dan inovasi dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membuka pintu bagi berbagai ancaman yang serius terhadap kedaulatan bangsa. Salah satu dampak negatif yang dihadapi dari perkembangan teknologi adalah transformasi kejahatan dari konvensional menjadi digital termasuk salah satunya praktik perjudian. Dengan pemanfaatan teknologi, perjudian menjadi semakin canggih dan tertutup, karena dilaksanakan pada ruang digital *(digital space)*.

Saat ini, praktek perjudian di Indonesia dilakukan secara modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Melalui gawai yang sudah menjadi kebutuhan utama manusia saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas perjudian. Perjudian dengan pemanfaatan gawai lebih dikenal dengan istilah "Judi *Online*". Praktik judi online saat ini menjadi musuh bersama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan secara tegas oleh Presiden Indonesia terkait larangan dalam aktifitas perjudian baik secara *offline* maupun *online*. Dalam kesempatannya presiden menyampaikan dampak negatif dari judi online mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga dan lingkungan, hingga meningkatnya kejahatan dan kekerasan serta fenomena yang terjadi di masyarakat.

"Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar gim iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan

keluarga, dan masa depan anak-anak kita, (Presiden RI, Joko Widodo)"[1]

Komitmen Presiden dalam memberantas praktik judi online ditindak lanjuti dengan serangkaian tindakan tegas yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan melakukan pemblokiran terhadap situs judi online dan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan praktik judi online. Langkah tersebut diambil mengingat Indonesia menjadi negara dengan pemain judi terbanyak di Asean.

Sumber : Sindonews.com, 2024

Dari gambar data tersebut, menjadi sangat relevan bahwa saat ini Pemerintah menetapkan kondisi darurat untuk fenomena judi online. Judi online saat ini sudah merambah pada semua kalangan tidak hanya orang dewasa. Berikut disampaikan jumlah pemain judi online di Indonesia.

Dalam perkembangnnya, praktik judi online tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga telah merambah pada institusi pertahanan dan keamanan negara. Praktik judi online yang terjadi di lingkungan institusi pertahanan dan keamanan negara tentunya menjadi pukulan nyata bagi marwah institusi, hal ini bisa melunturkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Panglima TNI menyampaikan akan menindak tegas kepada prajuritnya yang terbukti melakukan praktik judi online bahkan sampai sanksi pemecatan[2]. Hal tersebut juga selaras dengan komitmen Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap prajurit TNI AD sampai pada tingkatan paling bawah terkait dengan penanganan judi online yang sudah masuk di lingkungan TNI AD[3].

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan ini mencoba memberikan pandangan terkait dengan fenomena judi online di lingkungan Kodam III/ Siliwangi sekaligus menyampaikan komitmen Pangdam III/Siliwangi terkait dengan penanganan judi online di wilayah Kodam III/Siliwangi. Tulisan ini diharapkan mampu menggambarkan mengenai prevalensi, demografi pengguna, dampak sosial dan ekonomi, serta langkah-langkah penegakan hukum yang diambil dalam mengatasi masalah judi online khususnya di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Komitmen pemerintah dalam mengatasi fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan dengan pembentukan satgas judi online. Satgas ini dibentuk oleh Presiden RI pada tahun 2024 dengan tujuan untuk menekan lonjakan pengguna aplikasi yang mengarah pada aktifitas judi online di Indonesia. Satgas ini merupakan gabungan dari berbagai unsur salah satunya TNI dan Polri. Pelibatan TNI sendiri merupakan upaya nyata yang dilaksanakan untuk menekan praktik judi

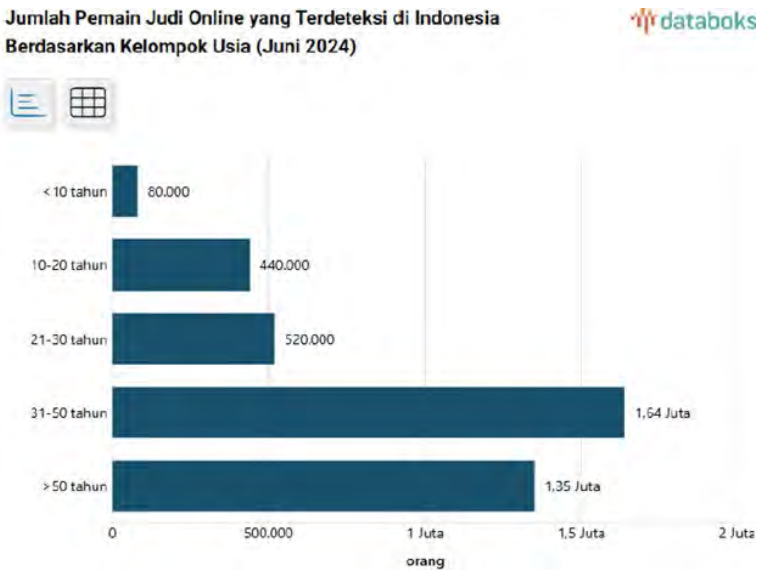

[1]https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-ajak-masyarakat-bersatu-berantas-judi-online/
[2]https://nasional.kompas.com/read/2024/07/05/16255441/panglima-tni-sebut-prajurit-yang-terlilit-judi-online-bisa-dipecat
[3]https://nasional.tempo.co/read/1883619/cegah-judi-online-di-internal-tni-ad-dan-masyarakat-kasad-lakukan-ini

online yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagai bentuk menjaga marwah institusi pertahanan negara.

Kodam III/Siliwangi merupakan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Luasnya wilayah teritorial Kodam III/Siliwangi berimbas pada serangkaian kompleksitas permasalahan yang dihadapi, salah satunya berkaitan dengan judi online. Secara nasional Jawa Barat menjadi wilayah dengan aktifitas judi online tertinggi di Indonesia. Menjadi wilayah dengan praktik judi online tertinggi secara nasional tentunya meningkatkan potensi keterlibatan prajurit Kodam III/ Siliwangi yang terjerat dengan praktik judi online.

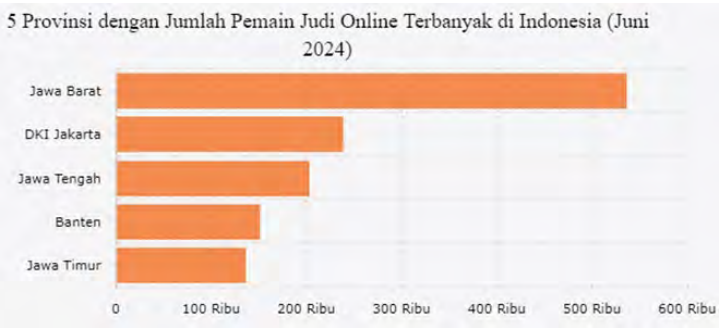

Mengacu pada data di atas, dapat dijelaskan bahwa provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah teritorial Kodam III/ Siliwangi berada pada lima besar provinsi dengan jumlah pemain online terbanyak di Indonesia. Di Indonesia sendiri, judi online tidak hanya menyasar pada masyarakat secara luas, namun juga menyasar pada beberapa institusi pemerintahan, salah satunya TNI/Militer. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas Judi Online disebutkan profesi yang terlibat judi online diantaranya TNI, Polri, ASN, Jurnalis dan Anggota Legislatif.

Data tersebut merupakan beberapa institusi dengan potensi terjadinya praktik judi online yang tinggi disamping profesi lainnya seperti guru/pendidik, dokter dan lain sebagainya. Praktik judi online sendiri merupakan sebuah praktik yang pengendaliannya cukup sulit. Hal ini dikarenakan aktifitas yang dilaksanakan berada pada lingkungan privat dan

Sumber : Satgas Pemberantasan Judi Online RI, 2024

terselubung dalam bentuk aplikasi permainan atau *platform* media sosial, sehingga kehadirannya kemudahan bagi para pelaku untuk terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas. Ketersediaan judi online selama 24 jam sehari dan sifatnya yang anonim membuatnya semakin berbahaya, karena dapat dengan mudah terjebak dalam kebiasaan ini tanpa pengawasan yang memadai.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Kodam III/Siliwangi dalam menangani judi online yang menjerat prajuritnya. Kodam III/Siliwangi berkomitmen dalam penanganan judi online sebagai bentuk upaya nyata menjaga marwah institusi TNI AD. Kodam III/Siliwangi menyadari bahwa keterlibatan prajurit dalam judi online berdampak serius. Sehingga penanganannya perlu dilaksanakan secara serius dan fokus. Berikut beberapa dampak yang dihadapi oleh prajurit yang terlibat pada aktifitas judi online di wilayah Kodam III/Siliwangi, diantaranya:

Pertama, menimbulkan masalah keuangan yang parah, yang berpotensi memicu tindakan koruptif atau penyalahgunaan wewenang dalam upaya menutupi kerugian finansial.

Kedua, dapat menurunkan konsentrasi dan fokus prajurit, sehingga mengganggu kinerja dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.

Ketiga, merusak reputasi pribadi dan institusi, serta menodai citra Kodam III/ Siliwangi yang dikenal dengan disiplin dan kehormatan yang tinggi.

Keempat, memicu ketergantungan, yang pada akhirnya merusak kehidupan sosial dan psikologis prajurit. Ketergantungan ini dapat mengarah pada isolasi sosial, stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya, yang semuanya berdampak negatif pada stabilitas dan keandalan prajurit

Dalam menghadapi dampak tersebut, Kodam III/Siliwangi perlu mengambil langkah-langkah proaktif, salah satunya dengan memberikan edukasi, pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku prajurit khususnya dalam penggunaan gawai, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran terkait judi online. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh Kodam III/Siliwangi dalam mengatasi judi online di wilayah Kodam III/Siliwangi.

- **Melaksanakan pendataan.**

Pendataan dilakukan untuk menggali, informasi terkait dengan para prajurit yang terlibat/ terjerat judi online, tujuannya adalah melakukan penanganan secara dini terhadap kondisi prajurit yang terlibat judi online. Pendataan diperlukan untuk mengetahui pola dan metode judi online yang dilakukan untuk kemudian diambil langkah-langkah strategis dalam penanganan dan antisipasi praktik judi online dilingkungan Kodam III/Siliwangi.

- **Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan.**

Pembinaan dan penyuluhan dilakukan kepada seluruh prajurit di wilayah Kodam III/Siliwangi. Kegiatan bertujuan untuk mencegah prajurit yang belum terlibat kegiatan judi online untuk tidak masuk ke dalam jeratan judi online juga untuk membina para prajurit yang terlibat judi online untuk keluar dari jeratan judi online.

- **Pendidikan dan Kesadaran.**

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan kampanye edukasi kepada Prajurit untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko perjudian online dan cara melindungi diri.

- **Meningkatkan Kerjasama/ kolaborasi.**

Dalam mengatasi fenomena judi online yang menjerat prajurit, diperlukan kerjasama, sinergitas dan soliditas dengan institusi pemerintah lainnya.

- **Melaksanakan penelitian lebih lanjut.**

Perkembangan teknologi akan berdampak pada pola kejahatan judi online yang semakin canggih, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan kegiatan penelitian dan pengkajian dalam melihat metode, dampak dan langkah penanganan sebagai upaya preventif mengatasi judi online.

- **Mengoptimalkan pengawasan/ *controlling*.**

Salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan adalah dengan pemberian kewenangan kepada pimpinan setiap bagian/divisi/unit di lingkungan Kodam III/ Siliwangi dalam memeriksa gawai prajurit dan melaporkan hasil pengawasan kepada Komandan sebagai bentuk evaluasi kegiatan kedepannya.

Beberapa upaya yang dapat diambil

oleh oleh Kodam III/Siliwangi dalam mengatasi judi online oleh prajuritnya perlu dilaksanakan secara terencana terukur dan berkelanjutan guna menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas prajurit Kodam III/ Siliwangi di tengah gempuran teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi pedang bermata dua, di mana akses mudah terhadap internet dan aplikasi digital berpotensi mengancam moral dan disiplin prajurit. Sehingga pembinaan menjadi hal yang terus ditingkatkan untuk menjaga Kesehatan mental dan psikologis prajurit dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi salah satunya terkait ancaman judi online.

Praktik judi online yang dilaksanakan oleh prajurit di wilayah Kodam III/Siliwangi merupakan ancaman serius yang berpotensi melahirkan berbagai masalah kehidupan prajurit yang berimbas pada penurunan kinerja. Kehadiran teknologi yang semakin canggih memungkinkan akses mudah ke platform perjudian digital, yang pada gilirannya menciptakan potensi risiko tinggi bagi prajurit dan keluarganya. Disiplin, integritas, dan loyalitas adalah fondasi utama yang harus dijaga oleh setiap prajurit agar tidak terjerat pada praktik judi online.

Permasalahan ekonomi, rasa penasaran, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan instan menjadi alasan pembenaran oleh prajurit yang terlibat dalam judi online. Sehingga mereka yang terlibat sering mengabaikan terhadap dampak yang ditimbulkan baik bagi individu maupun institusi. Judi online dapat menjerumuskan prajurit ke dalam hutang, menyebabkan gangguan psikologis, dan bahkan merusak reputasi TNI AD khususnya Kodam III/Siliwangi di mata publik.

Sebagai bagian dari institusi yang memegang teguh nilai-nilai kedisiplinan dan kehormatan TNI AD, Kodam III/ Siliwangi telah mengambil langkah tegas dalam menangani ancaman judi online baik secara persuasif maupun represif sebagai bentuk pelaksanaan arahan Komando Atas. Upaya pencegahan dan penegakan hukum diperkuat, termasuk pembinaan yang berkelanjutan mengenai bahaya judi online. Selain itu, pengawasan internal dan pembinaan mental prajurit juga ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh prajurit Kodam III/Siliwangi terhindar dari godaan judi online.

Guna mendukung keberhasilan penanganan Kodam III/Siliwangi dalam penanganan judi online oleh Prajurit, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Pertama, perlunya dilakukan pembinaan dan penguatan sampai pada level keluarga prajurit untuk bersama menjadi benteng dalam menghadapi godaan judi online secara terencana, fokus dan berkelanjutan.

Kedua, perlunya dibentuk pusat informasi dan rehabilitasi yang khusus menangani permasalahan judi online di tingkat Kodam.

Ketiga, diperlukan sosialisasi hukum kepada prajurit Kodam III/Siliwangi terkait dengan resiko hukum yang ditimbulkan akibat judi online.

Keempat, perlunya dilaksanakan *reward and punishment* kepada prajurit terkait dengan judi online.

Selain itu, upaya nyata yang perlu dilaksanakan adalah melalui peningkatan kolaborasi dengan komponen bangsa lainnya seperti memperbanyak kegiatan bersama yang positif yang dapat menghindarkan parajurit dari jeratan judi online. Karena sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, bahwa penanganan judi online tidak bisa diatasi secara parsial, melainkan perlu dilaksanakan secara bersama-sama, oleh karena itu Sinergi dari semua pihak, termasuk peran aktif masyarakat, menjadi kunci keberhasilan untuk memberantas judi online1. Demikian tulisan ini dibuat semoga menjadi masukan dan pandangan dalam mengatasi permasalahan judi online khususnya di Kodam III/Siliwangi, umumnya di seluruh satuan TNI AD.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN

DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI ANGKATAN DARAT

Oleh: Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si.
(Aster Kasdam XV/Pattimura)

"Media adalah entitas paling kuat di dunia. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat yang tidak bersalah menjadi bersalah dan membuat yang bersalah menjadi tidak bersalah, dan itulah kekuatan." *– Malcolm X*

Perkembangan media sosial yang sangat signifikan menjadi suatu hal yang berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perang Informasi yang menggunakan *platform* media massa dan media sosial sebagai alat propagandanya telah menjadi tren tersendiri dalam perang modern saat ini. Peran media sosial dalam membentuk lanskap politik nasional dan global muncul ke permukaan setelah Pemilihan Umum di Iran pada tahun 2009, dan kemudian dalam pemberontakan rakyat di Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2011. Insiden ini dan lainnya mengindikasikan bahwa media sosial dapat memainkan peran penting dalam konflik berbasis informasi di masa depan. Peran media sosial dalam gangguan sipil, keamanan strategis, dan operasi militer untuk mengembangkan model dalam menggambarkan peran potensial media sosial pada perang informasi berkelanjutan dan dalam konflik informasi.[1]

Secara umum kiprah Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam pemanfaatan media sosial dalam mendukung tugas-tugas TNI AD, menunjukkan hasil positif namun demikian masih ada beberapa hal permasalahan yang perlu untuk dibenahi, diantaranya adalah : ***Pertama;*** *Produk peranti lunak tentang pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD terbatas;* ***Kedua;*** *Metode untuk memacu pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD belum optimal;* ***Ketiga;*** *Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD terbatas.*

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas maka dapat ditemukan pokok permasalahan yaitu ***bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka mendukung Tugas Pokok TNI AD?***. Penguasaan dan pemahaman pada pelaksanaan pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD harus dimiliki oleh seluruh personel yang mengawakinya, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna.

[1]Brett van Niekerk, Manoj Maharaj, (2012). *Social Media and Information Conflict. International Journal of Communication.* University of KwaZulu-Natal. Hal.8

Nilai guna, maksud dan tujuan yang dapat ditarik dari tulisan esai ini adalah sebagai gambaran tentang optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka mendukung Tugas Pokok TNI AD serta sebagai bahan masukan bagi pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Adapun ruang lingkup dan tata urut dalam tulisan ini terbagi dalam pendahuluan, pembahasan dan penutup. Sebagai acuan maka penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran sebagai berikut, diantaranya Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, Kep Panglima TNI No.Kep/1024/XII/2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; Petunjuk Induk tentang Penerangan, Kep Kasad No.Kep/1059/XII/2018; Petunjuk Penyelenggaraan tentang Penerangan Media, Kep Kasad No.Kep/713/VIII/2018; Petunjuk Teknis Publikasi TNI AD di Media Massa, Kep Kasad No.Kep/313/IV/2020. Dalam penulisan esai ini, Penulis menggunakan metode deskripsis analisis dan pendekatan secara empiris serta studi kepustakaan.

Pembahasan.

Penggunaan media sosial merupakan hal yang terus berevolusi dan berkembang selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Pandemi *COVID-19* yang berkepanjangan telah mendorong bertambahnya konsumsi media sosial secara signifikan oleh para penggunanya. Menurut laporan *Smart Insights* dari Inggris, pada awal 2022 ini 4,6 miliar orang di dunia menggunakan media sosial atau lebih dari separuh populasi dunia (58,4%) dan 424 juta dari angka tersebut adalah pengguna media sosial yang baru saja bergabung dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu sekitar dua setengah jam setiap hari untuk mengkonsumsi media sosial. Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial ke-4 terbesar setelah China, India dan Amerika pada tahun 2021. Lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, perusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik data konsumen dan pemasaran.[2]

Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet semakin berlipat ganda, seiring dengan pertumbuhan penjualan telepon seluler pintar *(smart phone)* yang dapat mengakses internet bergerak *(mobile)* sehingga khalayak dapat mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Situs *(website)* yang paling banyak dikunjungi pengguna internet di Indonesia adalah situs-situs media sosial, seperti *facebook.com, twitter.com,* dan *youtube.com*. Pengguna internet di Indonesia sebagian besar menggunakan media sosial dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Selain itu, masyarakat juga banyak mengunjungi portal berita, seperti *detik.com, kompas.com, vivanews.com, okezone.com,* dan *kapanlagi.com*. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/*online*).[3]

Di era digital ini, penggunaan media sosial tidak hanya merambah kehidupan sosial namun juga mempengaruhi kehidupan prajurit TNI AD beserta keluarganya, pengaruh teknologi ini juga telah merambah dalam sendi-sendi kehidupan prajurit, bahkan media sosial yang saat ini marak telah menjadi ancaman dalam mendegradasi tata nilai dan sistem kehidupan prajurit, jika seorang prajurit tidak bijak menyikapinya.[4]

[2]https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-penggunaan-media-sosial/6631266.html, diakses pada 23 September 2022, pukul 20.00 WIB.
[3]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, hal.1-2.
[4]Rumadi & Dian Nur Huda (2021).Implementasi Peran Prajurit Dalam Menyikapi Perkembangan Media Sosial Berdasarkan Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat Mengenai Penekanan Dan Kewaspadaan Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Prajurit. Jurnal MAKSIGAMA: Vol. 15 Nomor 2 periode November 2021,hal.135.

Sesuai data dan fakta yang penulis dapatkan bahwa produk peranti lunak tentang pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD masih terbatas dan terindikasi belum adanya konsep, peraturan, strategi atau doktrin yang relevan terkait pemanfaatan media sosial yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI AD. Hal tersebut melatarbelakangi permasalahan pertama yang akan dibahas terkait produk peranti lunak yang masih terbatas.

Pembahasan permasalahan kedua adalah metode untuk memacu pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD belum optimal. Hal ini didasarkan dengan beberapa fakta dilapangan, seperti contohnya dalam konten-konten publikasi kegiatan TNI AD maupun kontra opini yang dilakukan oleh Satuan Komando Kewilayahan apabila terindikasi terdapat upaya *'framing media sosial'* oleh pihak-pihak tertentu untuk mereduksi citra positif TNI AD di media sosial yang tersedia saat ini masih terbatas secara kuantitas dan kualitasnya.

Kemudian fakta selanjutnya dalam hal kuantitas dan kualitas SDM personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD pada kegiatan pemanfaatan media sosial masih terbatas, menjadi permasalahan ketiga yang menjadi pembahasan berikutnya. Hal ini menyorot pada bidang pengetahuan dan keterampilan serta pelatihan personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam pemanfaatan media sosial dirasakan masih kurang optimal karena kuantitas dan kualitas personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang terbatas.

Ketiga permasalahan diatas, menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, dikaji dan dicarikan solusinya. Diharapkan apabila ketiga permasalahan tersebut dapat segera teratasi maka pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD akan lebih optimal dan lebih berdampak positif pada pencapaian Tugas Pokok TNI AD.

Menganalisa dan mencermati pada permasalahan pertama yaitu produk peranti lunak tentang pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD masih terbatas dan terindikasi belum adanya konsep, peraturan, strategi atau doktrin yang relevan terkait pemanfaatan media sosial yang lebih efektif dan efisien sehingga masih saja ada kelompok-kelompok masyarakat maupun kalangan internal TNI AD *(asumsi penulis; bahwa ada pendapat mengatakan 'kegiatan positif yang dilakukan oleh prajurit TNI AD cukup diketahui oleh kalangan internal saja dan tidak perlu digembar-gemborkan ke media sosial karena hal yang dilakukan adalah berdasarkan ketulusan dan keikhlasan bukan sekedar pencitraan atau adanya misinterpretasi bahwa semua kegiatan militer itu adalah "Rahasia" dan tidak boleh diketahui oleh khalayak')* mempertanyakan peran aktif dari TNI AD dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun *'stakeholders'* terkait, melalui media sosial. Hal ini disebabkan belum adanya suatu bentuk regulasi/ peraturan yang jelas dan tegas secara *"letterlijk"* (berasal dari bahasa Belanda yang berarti memahami sesuatu secara tepat seperti tertulis, tanpa interpretasi lain) dalam bunyi pasal, ayat atau aturan tertulis lainnya sampai penjelasan pada pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD secara mendetail sehingga tidak menimbulkan multi tafsir oleh kalangan internal TNI AD maupun pihak lainnya.

Menyikapi permasalahan tersebut diatas maka diperlukan suatu rangkaian upaya dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD guna mendukung pencapaian Tugas Pokok TNI AD. Implementasinya adalah melaksanakan kegiatan secara masif dengan menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* di tingkat Kotama guna menjaring saran masukan untuk dimuatnya aturan-aturan pelibatan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang lebih efektif dan efisien pada kegiatan pemanfaatan media sosial.

Kegiatan FGD hendaknya mengundang dan melibatkan kalangan akademisi, praktisi, pakar komunikasi maupun pihak lain yang terkait.

Setelah menghasilkan draf usulan dari masing-masing Kotama dalam kegiatan FGD, selanjutnya pada tingkat Mabes TNI AD dilakukan penyaringan dari draf usulan tersebut. Draf usulan yang telah disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) selanjutnya disampaikan kepada Panglima TNI sebagai bahan usulan pembuatan Peraturan Panglima TNI (Perpang TNI) yang memuat secara jelas dan lugas aturan pelibatan pada kegiatan pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan di jajaran TNI khususnya TNI AD. Namun demikian, apabila dirasa cukup sampai pada tingkat pimpinan TNI AD saja, maka dapat dilahirkan aturan tersebut melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad).

Kemudian pada permasalahan kedua, yaitu metode untuk memacu pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD belum optimal. ***Menganalisa dan mencermati pada permasalahan kedua*** maka secara sederhana dapat dilakukan ***dengan metode People-Objectives-Strategy-Technology (POST)*** yang merupakan empat tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial.

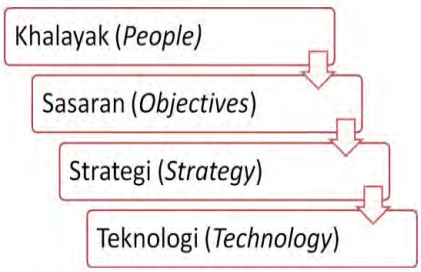

Gb. Metode POST (sumber : Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah)

Adapun keterangan dalam gambar di atas adalah: Pertama; **Khalayak *(People)*** adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku *online* khalayak, yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial. Kedua; **Sasaran *(Objectives)*** adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi (mendengarkan aspirasi khalayak dalam memperoleh masukan, mensosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak). Ketiga; **Strategi *(Strategy)*** adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak. Keempat; **Teknologi *(Technology)*** adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.[5]

Metode *POST* dapat diaplikasikan pada Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dengan terlebih dahulu memperhatikan ***Tujuan Instansi dalam Pemanfaatan Media Sosial*** adalah: *Pertama;* ***Menyimak (Listening)***, yaitu instansi menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan khalayak; *Kedua;* ***Berbicara (Talking)***, yaitu instansi menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan dan informasi;. *Ketiga;* ***Menyemangati (Energizing),*** yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong khalayak menyebarluaskan pesan melalui percakapan dari mulut ke mulut *(word-of-mouth)* dan komunikasi viral (melalui internet); *Keempat;* ***Mendukung (Supporting)***, yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membantu khalayak agar saling mendukung sehingga tercipta dukungan yang lebih besar; *Kelima;* ***Merangkul (Embracing)***, yaitu instansi menggunakan media sosial untuk melibatkan khalayak ke dalam kegiatan instansi, termasuk dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata.[6]

[5]Permen PAN RB,Loc.Cit, hal.16.
[6]Permen PAN RB,Loc.Cit, hal.17-18.

Gb. Tujuan Instansi Dalam Pemanfaatan Media Sosial (sumber : Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah)

Berdasarkan Metode *POST* tersebut maka diharapkan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD hendaknya mulai menetapkan tujuan-tujuan yang dapat menguatkan citra TNI AD pada masyarakat sehingga dapat mendukung Tugas Pokok TNI AD. Hal-hal yang urgen untuk dilakukan adalah sebagai berikut: ***Pertama;*** Menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis; ***Kedua;*** Memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran; ***Ketiga;*** Membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging; ***Keempat;*** Memantau percakapan; ***Kelima;*** Menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan khalayak; ***Keenam;*** Menganalisis dan menyarikan seluruh masukan khalayak *(wisdom of the crowd)* sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan; ***Ketujuh;*** Memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak; ***Kedelapan;*** Menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.[7] Penetapan tujuan strategis Satuan Komando Kewilayahan TNI AD hendaknya dapat tertuang dalam suatu aturan tertulis yang tentunya telah ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku pimpinan TNI AD selaras dengan kebijakan dalam visi dan misi selama kepemimpinannya.

Selanjutnya pada permasalahan ketiga, yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD. ***Menganalisa dan mencermati pada permasalahan ketiga,*** diperlukan suatu kebijakan pimpinan TNI AD terutama dalam menentukan prioritas bahwa pemenuhan kuantitas personel Satuan Komando Kewilayahan menjadi urgen dilakukan. Tentunya dalam pemenuhan kuantitas personel Satuan Komando Kewilayahan diharapkan dibarengi dengan kualitasnya yang mumpuni.

Kita mengenal istilah *"the man behind the gun"*, yaitu menempatkan manusia/prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran (perang). Namun ke depan, seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, selain Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang paling dominan, maka teknologi persenjataan yang dimiliki juga sangat menentukan dalam memenangkan pertempuran.[8] Berubahnya tren perang mendorong kekuatan pertahanan Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan penguasaan senjata saja, tapi lebih lanjut berupa penguasaan teknologi dan keahlian khusus lainnya. Misalnya **dalam menghadapi *asymetric warfare* maka diperlukan keahlian penguasaan teknologi informasi yang canggih, berupa *skill hacker* dan *cracker*.** Selain itu, bentuk ancaman terus bermunculan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda misalnya *Electronic Warfare, Information Warfare, Cyber Warfare,* dan *Psychological Warfare*.[9]

Pada dasarnya peran prajurit dalam menyikapi perkembangan media sosial ini dapat dianalogikan sebagai posisi aktor dalam teater (sandiwara). Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan

[7]Permen PAN RB,Loc.Cit, hal.19.
[8]Subekti, "Modernisasi Alutsista TNI AD Untuk Mencapai Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum", Jurnal Angkatan Darat Yudhagama, Vol.32,No.1, Maret 2012.
[9]Elly Sebastian,"Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat", Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1.

aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.[10]

Peran prajurit dalam menyikapi media sosial secara interpersonal prajurit memerlukan keterampilan khusus dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, selain itu dalam menyikapinya diperlukan keterampilan Prajurit dalam penggunaan media sosial merupakan tuntutan bagi prajurit untuk menunjukkan eksistensi satuannya dengan *platform* yang tersedia. Bentuk nyata dari peran informasional yang dilakukan prajurit Satuan Komando Kewilayahan diantaranya secara kontinu melakukan pemantauan informasi yang beredar di media sosial dilaksanakan sebelum berita dipublikasikan kepada masyarakat, dalam peran sebagai pembagi informasi, maka informasi yang disajikan biasanya berisi pemberitaan mengenai hal positif untuk meningkatkan citra TNI AD di mata masyarakat melalui media sosial.

Huntington memandang profesionalisme militer meliputi tiga hal pokok yaitu: keahlian *(expertise)*, tanggungjawab sosial *(social responsibilty)*, dan organisasi yang mengikat *(corporateness)*.[11] Dari sisi keahlian, profesionalisme militer dipandang sebagai keahlian spesifik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta tidak dikuasai sembarang orang. Profesionalisme menuntut tanggungjawab sosial yang tinggi kepada warga negara secara keseluruhan.

Keterbatasan dalam pemenuhan kuantitas maupun kualitas dari SDM personel Satuan Komando Kewilayahan tentunya akan berdampak pada pencapaian Tugas Pokok TNI AD. ***Solusi yang ditawarkan kepada pimpinan TNI AD*** adalah mengubah *mind set* Pembinaan Personel (Binpers) dan berani mengimplementasikan dari kebijakan sebelumnya yaitu *Zero Growth Personnel Policy* (kebijakan pertambahan personel sebesar nol persen) menjadi *Right Sizing and Proportional Growth Personnel Policy* (kebijakan pertambahan personel dengan jumlah yang tepat dan sesuai pengembangan Satuan) khususnya pada Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dengan mempertimbangkan aspek prioritas organisasi TNI AD secara keseluruhan. Proses rekrutmen prajurit TNI AD maupun PNS TNI AD dapat mengusulkan kepada Panglima TNI atau Menteri Pertahanan agar merekrut personel yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi publik maupun mahir dapat mengoperasionalkan perangkat berbasis teknologi informatika yang diprioritaskan untuk menjadi prajurit/PNS TNI AD.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas personel yang mengawaki Satuan Komando Kewilayahan diperlukan suatu pelatihan-pelatihan atau penataran maupun kursus/sekolah yang diselenggarakan secara terprogram dan terpadu dengan stakeholder terkait.

Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas personel Satuan Komando Kewilayahan hendaknya dapat terus dikembangkan dengan melibatkan para pakar teknologi informatika maupun pakar komunikasi dari instansi eksternal. Diharapkan para personel Satuan Komando Kewilayahan tingkat Kotama yang telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut dapat memberikan pembelajaran pada personel lain di Satuan Komando Kewilayahan di tingkat bawahnya, melalui metode ***Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM)*** disesuaikan dengan sarana dan prasarana di Satuannya masing-masing.

Penutup.

Problematika pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD akan berdampak pada pencapaian Tugas Pokok TNI AD. Hal Ini menjadi sangat urgen karena tingkat kepercayaan masyarakat pada TNI khususnya TNI AD sangat bergantung pada pemanfaatan media sosial yang efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pencapaian tugas-tugas TNI AD sebagai pertanggungjawaban institusi yang kredibel, transparan dan

[10]Sarwono, Sarlito (1995). Psikologi Lingkungan. Jakarta : Grasindo, hal.209.
[11]Samuel Huntington, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil, Edisi Terjemahan,Jakarta: Grasindo, 2003, hlm. 4-6.

akuntabel. Pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan juga merupakan salah satu tolok ukur kekuatan TNI AD dalam mengantisipasi maupun menghadapi perang informasi.

Dapat disimpulkan bahwa TNI AD memiliki organisasi yang tertata dengan baik. Gelar Satuan Komando Kewilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diawaki para personel yang berdedikasi tinggi serta dilengkapi peralatan yang tergolong memadai, maka upaya TNI AD melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD dapat terealisasi dengan hasil yang gemilang, tatkala semua pihak terkait serta masyarakat turut mendukung sepenuhnya.

Adapun ***saran yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)*** agar optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD dapat berdaya dan berhasil guna maka; **Pertama;** dibutuhkan suatu ketetapan dari Kasad terkait peranti lunak/peraturan yang jelas dan tegas secara *"letterlijk"* dalam bunyi pasal, ayat atau aturan tertulis lainnya sampai penjelasan pada pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD secara mendetail sehingga tidak menimbulkan multi tafsir oleh kalangan internal TNI AD maupun pihak lainnya melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* di tingkat Kotama guna menjaring saran masukan untuk dimuatnya aturan-aturan pelibatan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang lebih efektif dan efisien. **Kedua;** mengaktualisasikan metode *People-Objectives-Strategy-Technology (POST)* untuk memacu pemanfaatan media sosial oleh Satuan Komando Kewilayahan dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan strategis yang dapat menguatkan citra TNI AD pada masyarakat sehingga dapat mendukung Tugas Pokok TNI AD.

Ketiga; mengimplementasikan kebijakan *Right Sizing and Proportional Growth* Personnel dalam upaya pemenuhan kuantitas personel yang mengawaki Satuan Komando Kewilayahan dengan memvalidasi organisasi pada tingkat Komando Distrik Militer (Kodim) Tipe A, berupa penambahan Satuan Penerangan Kodim (Pendim). Adapun pertimbangan pembentukan Satuan Penerangan Kodim (Pendim) di Satuan Kodim Tipe A adalah untuk mendukung tugas-tugas satuan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat maupun stakeholder terkait melalui media massa terutama di media sosial mengingat keberadaan Satuan Kodim Tipe A tergelar di daerah perkotaan, memiliki jumlah penduduk cukup banyak dengan tingkat rata-rata penggunaan media sosial juga relatif tinggi sehingga dinamika yang terjadi tentunya sangat bervariatif dan kompleks. Diharapkan apabila Satuan Penerangan Kodim (Pendim) sebagai salah satu unsur atau eselon pembantu pimpinan terealisasi maka Satuan Kodim Tipe A akan memiliki kemampuan membangun opini publik sekaligus kontra opini di wilayahnya masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi sokoguru/tiang penyangga utama dalam penguatan citra TNI AD guna mendukung Tugas Pokok TNI AD.

Pemanfaatan media sosial diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi TNI AD, khususnya Satuan Komando Kewilayahan dalam menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis antara instansi dan pemangku kepentingan maupun terpeliharanya Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat demi kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NAPAK TILAS MAKAM PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA

SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN KEPADA LELUHUR DAN UNTUK MEMBANGKITKAN SEMANGAT JUANG PRAJURIT SANGGAMARA

Oleh: Kolonel Inf Ali Imran
(Danrem 011/Lilawangsa)

Di Hutan belantara Aceh, bersemayam sosok wanita tangguh Aceh yang tidak gentar sedikit pun menghadapi gempuran sekutu penjajah Belanda pada masa itu. Darah, air mata dan jasadnya telah "menyuburkan" Pertiwi, walau kondisi makamnya dihiasai belaian alam, jauh dari keramaian. Perjalanan ke Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia, di kawasan pedalaman Aceh Utara, yang berjarak sekitar 68 Km dari Lhokseumawe ke lokasi tersebut, ternyata membutuhkan adrenalin dan semangat juang yang tinggi. Betapa tidak, karena kawasan yang dituju tidak semulus yang dibayangkan, melewati jalan setapak dan menelusuri sungai hingga sampai ke makam pahlawan yang merupakan salah satu Srikandi Pahlawan Nasional Indonesia yang memiliki andil dalam memperjuangkan Republik Indonesia.

Medan yang berat, harus melintasi hutan belantara dan menyebarangi sungai bebatuan, dengan mengandalkan kekuatan betis kaki. Bagi mereka yang tidak terbiasa berjalan jauh dan medan yang berat ini sulit untuk menjangkaunya. Padahal rakyat ingin ziarah ke makam syuhada yang telah berjuang mengorbakan segala-galanya demi pertiwi, bahkan telah mengorbankan nyawa, darah, harta dan air mata. Namun karena medanya berat, niat untuk menjenguk makam pahlawan di tengah hutan belantara ini terpaksa ditunda.

Jalan berbatu yang sukar dilalui kendaraan, ditengah lebatnya pepohonan hutan belantara Desa Alue Rime, kawasan Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pagi itu, terlihat napak tilas para prajurit TNI menunggangi kuda besi melaju beriringan menuju Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia. Walaupun terdapat jalan aspal, namun hanya sekitar 4 KM dari perkampungan, berbeda dikala musim penghujan, cuaca cerah sedikit mendukung para serdadu melanjutkan perjalanan yang masih jauh kedepan, kuda-kuda besi mereka terus mencakar

kerasnya badan jalan tanah dan berbatu, membuat fokus pandangan terganggu akibat menerobos tebalnya debu.

Teriknya matahari dikawasan itu tidak menyurutkan semangat para prajurit Sanggamara, walaupun pakaian loreng kebanggannya basah kuyub dari kucuran keringat menahan lelah panjangnya perjalanan dibawah pancaran sinar matahari yang seakan kian mengamati. Timbul rasa kekuatiran terlihat dari raut wajah para serdadu yang sedang menunggangi kuda besinya saat melintas di ruas jalur berbukit terjal. Medan terjal dan menantang seakan menguji kesabaran, tak heran diantara mereka sampai ada yang tergelincir hingga terjatuh bersama kuda besinya, tak terasa sekitar dua jam lebih rombongan berjibaku, kuda besi mereka pun hanya mampu mengantar sampai di penghujung jalan buntu yang terdapat jembatan gantung terbentang di atas sungai di daerah itu.

Sejarah lampau saat terjadinya konflik Aceh pada masa itu, wilayah Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara dinilai daerah Abu-abu, tidak ada warga yang berani mengunjungi di kawasan sekitar, bahkan warga lokal sendiri sungkan beraktivitas, dan terdapat sejumlah pos TNI ditugaskan untuk melindungi masyarakat. Namun setelah pasca masa damai, mulailah nampak kehidupan, aktivitas masyarakat di daerah itu perlahan membaik, TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil Pirak Timu bersama masyarakat mulai membangun kemajuan daerah sekitar. Begitupun para pendatang saat ini berkunjung untuk berziarah.

Perjuangan belum usai, keberadaan sungai, seakan tidak memberi harapan kepada para serdadu TNI itu, membutuhkan waktu sekitar dua jam lagi untuk bisa sampai ke lokasi makam Cut Meutia, namun para prajurit tak kunjung menyerah, ilmu dasar militer infanteri pun diandalkan, yaitu napak tilas atau berjalan kaki sesuai moto prajurit TNI Angkatan Darat. Mereka menapak menelusuri jalur sungai menempuh jarak 2 KM dari jembatan gantung menuju ke lokasi makam. Kicau burung terdengar seakan menyambut kedatangan rombongan, wajah lesu menilik kebawah, kiri dan kanan ditepian sungai, sesekali pandangan menatap ke atas menatap lebatnya hutan, diiringi rasa kekuatiran jika bertemu hewan buas. Suasana sejuk seram menyelimuti hutan belantara itu. Sebatang kayu digenggaman masing-masing sebagai tongkat penuntun jalan, sepatu hitam menapak perlahan mengarungi arus sungai berbatu licin dibalut lumut, tak heran bila ada yang terjatuh sambil tersenyum bercampur cemas.

Ditengah perjalanan, juru kunci Makam Pahlawan Cut Meutia bernama Mudawali yang akrab disapa Bang Ted, yang turut ikut dalam rombongan, menunjukan tempat lokasi syuhada Cut Meutia yang ditembak oleh kolonial belanda, tepatnya berada di sekitar pohon

besar di atas ketinggian tepian sungai yang mereka lalui. Hutan selain ditumbuhi semak belukar dan berbagai jenis pohon besar menjulang tinggi, juga terdapat dua muara sungai seperti melingkar mengelilingi bukit tempat keberadaan makam pahlawan Cut Meutia. Kadang terlihat dua hewan buas harimau dan rusa besar nampak akur seakan sebagai penjaga makam pahlawan syuhada.

Keheningan menyelimuti keberadaan makam syuhada Cut Meutia yang terletak jauh ke pedalaman pelosok hutan belantara puncak Bukit Alur Dua Pucok, Krueng Kerto, setelah puluhan tahun tidak terawat, bahkan kondisinya kini sangat memperihatinkan dikarenakan sulitnya jalur akses menuju makam.

Setiba di lokasi makam, dengan napas terengah - engah para serdadu itu seakan tak menyangka, daerah dikelilingi hutan belantara ini terdapat salah satu Makam Pahlawan Tokoh Nasional Cut Meutia. Suasana hening seketika, rombongan mendekat dan duduk di samping pusara Makam Cut Meutia bermunajat menyampaikan doa, selara menyirami air dan bunga di atas pusara makam Cut Meutia yang tak terawat, dan sangat memperihatinkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, sebab, kemerdekaan Republik Indonesia tak terlepas dari perjuangan para pahlawan, termasuk pahlawan nasional Cut Nyak Meutia atau dikenal Cut Meutia adalah tokoh pejuang perempuan dari Aceh ikut berperang melawan para penjajah pada masa itu.

Sejatinya keberadaan lokasi Makam Pahlawan di berbagai daerah begitu diperhatikan dan terawat, bahkan dilestarikan sebagai wisata sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), tak sedikit pengunjung maupun peziarah silih berganti hadir untuk berziarah, namun sangat jauh berbeda dengan kondisi Makam Pahlawan Cut Meutia berada di Aceh belum memadai, ada apakah gerangan?

Mengulas sedikit sejarah perang dan perjuangan panjang masyarakat Aceh pada masa itu menentang penjajahan belanda, melahirkan banyak kisah-kisah kepahlawanan yang menggetarkan, di Aceh Utara misalnya, muncul nama Cut Nyak Meutia atau dikenal Cut Meutia seorang Pahlawan perang perempuan yang tak hanya dikagumi masyarakat dan bangsanya, namun juga disegani musuhnya.

Diketahui, Cut Meutia adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia, Cut Meutia adalah seorang putri dari pasangan Teuku Ben Daud Pirak dengan Cut Jah. Kedua orang tua Cut Nyak Meutia merupakan masyarakat asli Aceh, seorang Uleebalang di Desa Pirak, berada dalam daerah Kehulubalangan Keureuto. Tjoet Nyak Meutia atau yang dikenal Cut Meutia

lahir pada tahun 1870 di Aceh, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh semangat perlawanan terhadap penjajah. Meutia menjadi tokoh penting dalam perlawanan terhadap Belanda selama perang Aceh. Ia dikenal karena keberaniannya dan memiliki strategi perang yang luar biasa dalam pertempuran dan kepemimpinannya dalam memimpin pasukan perlawanan dimasa itu. Cut Meutia, pejuang asal Aceh yang berperang melawan penjajah Belanda pada awal abad ke-20.

Keberanian dan keteguhan hati Cut Nyak Meutia dalam melawan penjajah Belanda telah menginspirasi banyak orang, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Keterampilan dan strategi Cut Meutia dalam mengelabui pasukan sekutu Belanda yang semakin memburunya, usaha Cut Meutia menghindar dari pengepungan belanda, dengan cara berpindah tempat bersama pasukannya dari gunung ke gunung di hutan belantara dalam melawan penjajah.

Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, di Alue Kurieng, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Cut Meutia dan pasukan Belanda, menyebabkan gugurnya Cut Meutia. Cut Meutia gugur terkena tembakan belanda berjarak sekitar 300 meter dari lokasi makamnya saat ini, walaupun berulang kali kolonial Belanda dan sekutunya mencari, namun jasad Cut Meutia tidak dapat ditemukan, seketika ditutupi tumpukan rayap di atas bukit hutan belantara Keureuto Desa Pirak, walaupun tidak sebanyak dulu, namun sampai saat ini rayap-rayap itu masih ada diantara rangka kayu rubung makam Syuhada Cut Meutia.

Sejak saat itulah Cut Meutia dikenal salah satu ikon Pahlawan Perempuan Nasional Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia hingga akhir hayatnya, pemerintah dan masyarakat setempat saat menghormati sekaligus mengenang jasa-jasa yang dilakukan Cut Meutia pahlawan perempuan Indonesia dari Aceh yang berjuang sepanjang hayatnya untuk membela tanah air tercinta. Atas pengabdiannya, Cut Meutia diakui sebagai Pahlawan Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964

pada tahun 1964. Pemerintah Indonesia juga mengabadikannya dalam pecahan uang rupiah pada tahun 2016, begitulah sekilas sejarah.

Namun Pahlawan Cut Meutia yang dikenal pemberani, dan memiliki strategi perang luar biasa serta kehebatannya tidak diragukan di masa itu, kini wanita Aceh pejuang Indonesia yang dikagumi pengikutnya hanya tinggal kenangan. Jasad dan darahnya terkubur di dalam bumi berada jauh di pelosok hutan belantara Aceh Utara, seperti dalam pepatah, habis manis sepah dibuang. Mana balas budi yang ditujukan kepadanya?

Setelah mengetahui kondisi yang tak layak tersebut, Korem 011/LW tergugah kepeduliannya akan menghargai jasa-jasa para Pahlawan pendahulu berinisiatif akan melakukan renovasi. Hal demikian dilaporkan kepada Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal mengenai keadaan kondisi Makam Pahlawan Cut Meutia, selanjutnya Pangdam memerintahkan kepada Danrem untuk melakukan pemugaran merenovasi.

Perintah Pangdam selanjutnya ditindaklanjuti oleh Korem 011/LW dengan mengerahkan dua alat berat exavator untuk membuka jalur akses baru hingga tembus sampai ke Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia. Dengan keyakinan, para prajurit Kodim 0103/Aceh Utara jajaran Korem 011/Lilawangsa, berupaya melakukan pekerjaan pembukaan jalan baru menuju ke makam dapat terselesaikan dalam jangka waktu satu minggu. Walaupun hanya dengan berbekal keyakinan demi menghargai jasa-jasa para Pahlawan Nasional Indonesia, impian warga pun terwujud.

Betapa prihatinnya, puluhan tahun akses jalan yang sulit dan makam pun tidak terawat. Namun kini setelah dibukanya jalur akses baru, para peziarah dapat dengan mudah sampai ke makam Cut Meutia. Bahkan saat ini sudah dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat karena tidak melintasi sungai lagi. Pembukaan akses jalan baru yang semula berjarak 2 KM dari jembatan sungai di kawasan Kecamatan Pirak Timu menuju Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia, kini hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 15 atau 20 Menit. Korem 011/ Lilawangsa bersama para prajuritnya telah membantu masyarakat Aceh, khususnya kami warga disini, dan mempermudah bagi siapa saja yang akan berziaran ke makam Cut Meutia.

Mudawali juru kunci berharap, agar para pemegang tampuk kepemimpinan baik pusat maupun daerah akan tergugah memperhatikan pembangunan akses jalan dan merenovasi perbaikan makam pahlawan nasional yang kondisinya setelah puluhan tahun sangat memperihatinkan.

Hutan belantara ini sudah memeluk erat sosok pahlawan Aceh Cut Muetia, banyak pihak yang ingin berkunjung ke sana, namun akses jalan sangat sulit menyebabkan makam wanita tangguh Aceh ini tetap sepi.

Korem 011/Lilawangsa yang prihatin ketika melihat area makam pahlawan yang sangat berjasa ini, berupaya mendekati berbagai pihak agar akses jalan ke sana dapat dilalui kendaraan, sehingga pahlawan Aceh ini tidak sulit dikujungi generasi penerusnya.

Sebuah cita - cita mulia, semoga dimudahkan Tuhan dalam menggapai, karena di hutan belantara ini ada sosok pejuang Aceh, wanita tangguh yang tidak pernah menyerah menghadapi gempuran penjajah. Istirahatlah dengan damai pahlawan ku.....

INOVASI KORPS PERALATAN DALAM MENJAGA DAN MELESTARIKAN ALAM

Oleh: Kolonel Cpl Daniel Cristof Hutubessy, S.Sos.
(Kabengpuspal Puspalad)

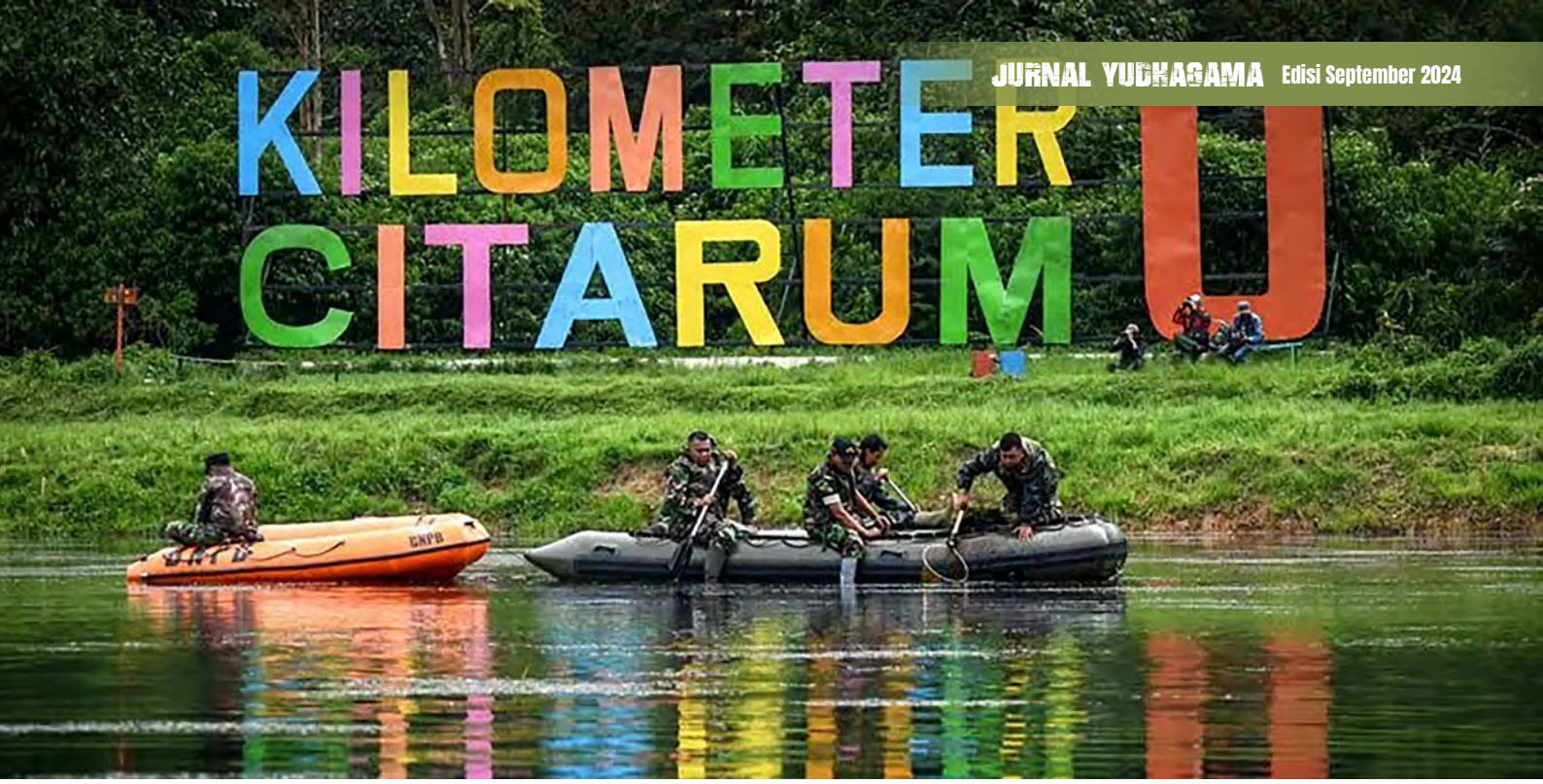

Lokasi Kilometer "0" Sungai Citarum

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keindahan alamnya, hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat banyak keberagaman akan alamnya. Di tahun 2022, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat pertama sebagai negara dengan keindahan alam di dunia versi Media Inggris (Money.co.uk). Akan tetapi dengan semakin banyaknya penduduk di Indonesia dan berkurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam, menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin lama semakin tidak terpelihara. Seperti contoh pembuangan limbah hasil pabrik, masalah sampah rumah tangga yang semakin menggunung dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Itu semua akan mengakibatkan alam Indonesia yang indah akan menjadi tidak terpelihara dan semakin rusak. Seperti contohnya kerusakan lingkungan dan alam yang ada di kota Bandung yaitu semakin banyaknya volume sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Sungai Citarum ini merupakan sungai terpanjang di wilayah Jawa Barat, yang memiliki panjang sekitar 270 KM yang melewati 701 desa (Sumber: BBC News, 2023), sehingga keberadaan DAS Citarum ini sangat perlu dijaga kelestarian alamnya dari sampah dan limbah pabrik. Karena jika hal ini tidak dipelihara dan dijaga, maka akan berdampak kepada masyarakat luas. DAS yang bersih dari sampah dan limbah dapat digunakan untuk mengairi sawah, pasokan air bersih, budidaya ikan tawar, bahkan sekarang dijadikan bendungan di Saguling untuk memasok Listrik oleh PLN.

Penanganan Sampah dan limbah oleh Tim Satgas Citarum Harum di wilayah Jawa Barat yang dimulai pada tahun 2018 sudah terlihat hasilnya, yaitu dengan berkurangnya sampah dan limbah yang ada di Sungai Citarum dan semakin baiknya nilai IKA (Indeks Kualitas Air) yang sebelumnya hanya 33,43 poin pada tahun 2018 menjadi 50,13 poin pada tahun 2022. Meskipun sudah mulai berangsur- angsur teratasi masalah sampah di sungai, akan tetapi masih ada beberapa titik yang terdapat sampah. Atas permasalahan yang ada di masyarakat itulah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempunyai ide dan gagasan untuk menginisiasi pembuatan sistem pengolahan sampah terintegrasi. Sesuai dengan semboyan TNI AD yaitu "TNI AD bersama Rakyat bersatu dengan Alam untuk NKRI".

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berupaya untuk mengatasi kesulitan rakyat dengan membuat pengolahan sampah terintegrasi di sungai dengan biaya yang terjangkau dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun sistem pengolahan sampah terintegrasi tersebut dengan membuat:

- Perahu Ponton Penarik Sampah,
- Konveyor Darat,
- Pemilah dan Pencacah Sampah
- Alat Pembakar Sampah *(Incenerator)*.

Selain mempunyai gagasan untuk penangan sampah, Kasad juga menginisiasi pembuatan modifikasi kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) hasil hibah dari Negara Jepang menjadi kendaraan Tanki Air. Sehingga dapat berguna untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan krisis air bersih (kekeringan) di beberapa wilayah terpencil.

Pembersihan sampah oleh Alat Berat

Atas dasar gagasan dan ide tersebut, Kepala Pusat Peralatan TNI AD (Kapuspalad) Mayjen TNI R.D. Epi Setiadi memerintahkan Kepala Bengkel Pusat Peralatan (Kabengpuspal) Kolonel Cpl Daniel C.H. agar berinovasi dalam membuat alat untuk menangani permasalahan sampah dan kebakaran hutan. Harapan dari KASAD yaitu dengan adanya alat yang dibuat oleh Prajurit TNI AD, maka dapat menekan biaya operasional Satgas Citarum dalam membersihkan sampah di sungai. Karena jika sebelumnya pembersihan sampah menggunakan alat berat (Beko) yang melibatkan puluhan sampai ratusan orang, dari aspek pelaksanaan sampai biaya operasional kurang efektif dan efisien.

Adapun data hasil inovasi Bengpuspal Puspalad dari proses pembuatan hingga uji coba dijelaskan sebagai berikut.

Perahu Ponton Penarik Sampah

Perahu Ponton Penarik Sampah ini berfungsi sebagai perahu pengambil sampah yang berada di Sungai dan Danau. Proyek pembuatan Perahu Ponton Penarik Sampah ini di Komandoi oleh Litbang Puspalad yang proses pembuatannya oleh Personel Bengpuspal Puspalad. Data Spesifikasi Teknis, prototype dan gambar nyata Perahu Ponton Penarik Sampah sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Dimensi	Panjang: , Lebar: , Tinggi:
3	Rangka Kapal	Besi Hollow Stainles 6 x 3 x 3
4	Deck Kapal	Plat Bordes 3 mm
5	Pagar	Aluminium ? 3
6	Berat Kapal	±1500 Kg
7	Luas Deck	121.300 Cm²
8	Daya Tampung Sampah	300 Kg
9	Jumlah operator	3 Orang
10	Jenis Mesin Boat	Yamaha Boat
11	Type Pengerak Kapal	Kapal Tempel
12	Type Pengerak Conveyor	Motor Dinamo
13	Daya Gerak Dinamo	1 HP 3 Phase
14	Putaran Dinamo	Max. 100 RPM
15	Rasio Kecepatan Putar Gear Box	1:40
16	Frequensi Listrik AC	*AC 220 Volt Single Phase 50 Hz (Hertz)*

Prototype Perahu Ponton Penarik Sampah tampak Belakang

Prototype Perahu Ponton Penarik Sampah tampak Depan

Uji Coba Perahu Ponton Penarik Sampah

Konveyor Darat

Awal mula pembuatan Konveyor Darat yaitu untuk membantu memindahkan sampah yang diambil oleh Perahu Ponton Penarik Sampah ke daratan sehingga proses pemindahan sampah dari sungai ke daratan menjadi lebih efektif dalam pengerjaan dan efisien dalam penggunaan operator. Adapun spesifikasi teknis dari Konveyor Darat sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Panjang: 10 m, Lebar: 70 Cm, Tinggi: bisa diatur menyesuaikan kontur tanah	Bahan *Stainles steel,* besi UNP ukuran 10 x 5 Cm, Tebal: 3 Mm
2	Bahan sabuk Konveyor	Karet berserat
3	Sudut kemiringan	Maksimal 45^0
4	Motor Induksi	3 Phasa
5	Putaran dinamo Konveyor	Maksimal 1500 Rpm
6	Tegangan	380 Volt
7	Arus listrik	5, 18 Ampere
8	Ratio gear	1 : 30
9	Kecepatan putaran Konveyor	Dapat diatur
10	Daya angkut	100 Kg
11	Jumlah Operator	3 Orang

Konveyor Darat

Proses pemindahan sampah dari sungai ke darat

Pemilah dan Pencacah Sampah

Pemilah dan Pencacah Sampah berfungsi untuk memilah antara sampah organik dengan sampah non organik. Untuk sampah non organik seperti plastik dapat dibakar, sedangkan sampah organik (eceng gondok) akan dicacah dan digunakan untuk kompos organik. Adapun spesifikasi teknis dari Pemilah dan Pencacah Sampah sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Panjang: 2,4 m, Lebar: 800 Cm, Tinggi: 1, 7 m	Besi UNP ukuran 10 x 5, Tebal: 5 Mm
2	Plat besi	Tebal: 3 Mm
3	Besi Nako	1 x 1, Tebal: 5 Mm
4	Besi Siku	Ukuran 4, Tebal: 3 Mm
5	Besi A3 untuk poros	2, 5 Inc
6	Plat strip	Ukuran 5, Tebal: 5 Mm
7	Mesin stasioner	Solar 10 Pk
8	Jumlah Operator	3 Orang

Alat pembakar sampah (incinerator)

Modifikasi Kendaraan Damkar menjadi Kendaraan Tanki Air

Kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) ini merupakan hasil hibah dari negara Jepang, yang diupayakan oleh KASAD. Modifikasi Damkar ini dengan merubah fungsi yang sebelumnya tidak menyimpan air (tidak memiliki tanki) menjadi dapat menyimpan air, sehingga dapat mengatasi kesulitan masyarakat akan kebutuhan air bersih di daerah terpencil serta dapat digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan. Adapun Spesifikasi Teknis dari Modifikasi Damkar menjadi Tanki Air adalah sebagai berikut:

Proses pembakaran sampah

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Kapasitas tanki air	3000 Liter
2	Mesin pompa	Pompa hisap dan dorong
3	Daya semprot	100 Meter
4	Jumlah Operator	3 Orang

Proses pembakaran sampah

Proses pembakaran sampah

Dengan Produk Inovasi hasil karya Korps Peralatan dalam menjaga dan melestarikan alam, diharapkan dapat membantu serta mengatasi kesulitan rakyat. Ini merupakan wujud nyata partisipasi TNI Angkatan Darat dalam menjaga dan melestarikan alam. Diharapkan kedepannya ada Produk Inovasi lain dari Korps Peralatan TNI Angkatan Darat. Sesuai semboyan TNI Angkatan Darat, yaitu **"TNI AD bersama Rakyat bersatu dengan Alam untuk NKRI"**

PERAN KODAM V/BRAWIJAYA DALAM PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2024 DI JAWA TIMUR

Oleh: Kolonel Kav Donan Wahyu
(Kapendam V/Brawijaya)

Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti yang tercantum di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai alat pertahanan, TNI, memiliki tugas pokok sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU TNI yakni, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan, salah satunya di huruf b yakni operasi militer selain perang (OMSP), termasuk di dalamya melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman lancar dan tertib

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia akan menjalani babak baru dalam praktik berdemokrasi dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selain Pilkada Provinsi yang akan memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebanyak 38 daerah di Jawa Timur juga akan melaksanakan Pilkada pada 27 November 2024 untuk memilih pasangan Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota. Ada 29 Kabupaten di Jawa Timur yang akan mengikuti Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di antaranya, Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Sedangkan pemilihan wali kota dan wakil

wali kota pada Pilkada Serentak di Jawa Timur terdapat di 9 Kota, di antaranya di Kota Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki keragaman budaya dan potensi konflik yang perlu diantisipasi. Untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis, peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi sangat vital. Kesiapan aparat keamanan dinilai sangat penting agar gelaran Pilkada ini berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan. Untuk itu, keterlibatan Kodam V/Brawijaya, dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan memegang peran penting. Kerja sama yang baik antara Kodam V/ Berawijaya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan membawa Pilkada ini berjalan secara kondusif, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang akan dihadapi dalam Pilkada terutama dalam menghilangkan potensi konflik yaitu layanan peran Kodam V/Brawijaya dalam menjaga keamanan pelaksanaan pilkada Jawa Timur. Diindentifikasikan persoalan sebagai berikut; pertama, yang sering dihadapi oleh Kodam V/Brawijaya dalam menghadapi Pilkada adalah potensi terjadinya konflik antar pendukung calon kepala daerah.

Persaingan politik yang sengit seringkali memicu ketegangan antar kelompok pendukung, yang dapat berujung pada bentrokan fisik dan kerusuhan. Kodam V/Brawijaya perlu memiliki 3 strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani konflik. Strategi yang pertama adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap daerah-daerah rawan konflik. Pemetaan ini mencakup identifikasi faktor-faktor pemicu seperti isu sosial, ekonomi, dan politik, analisis dinamika sosial politik,

serta pemetaan kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi terlibat. Dengan data yang akurat, Kodam dapat merancang langkah-langkah preventif yang tepat, seperti dialog antar kelompok, penyuluhan, dan patroli rutin.

Peran TNI dalam hal ini Kodam V/ Brawijaya dalam pengamanan Pilkada yang utama tentu memperkuat tiga pilar. Caranya, dengan melakukan optimalisasi penyelesaian permasalahan dengan mengoptimalkan peran komunitas inteligen daerah (Kominda), optimalissai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), optimalisasi peran Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB), serta optimalisasi pembinaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Demi peran di atas, meski hanya bersifat bantuan, keberadaan Kodam V/Brawijaya tetap memegang peran penting dalam setiap Pilkada. Ingat kesuksesan penyelenggaraan Pilkada sangat bergantung pada keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung.

Untuk menjamin hal tersebut, strategi yang kedua adalah Penyiapan kekuatan untuk tugas perbantuan. Hal ini bertujuan untuk menghadapi eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah kesiapan personel, logistik, dan materiil. Elemen ini saling terkait dan memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran tugas pengamanan Pilkada dana harus disiapkan secara matang. Khusus untuk pengamanan, Kodam V/Brawijaya telah menyiapkan pengamanan pasukan gelaran Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur. Dalam kesiapan pengamanan Pilkada ini Kodam V/Brawijaya menyiapkan kekuatan prajurit sebanyak 17.355 personel, terdiri kekuatan personel Satpur/Satbanpur 2.310 personel, Satkowil 11.519 personel dan Satbalak/Lemdik 3.526 personel. Sedangkan kekutan materiil Satpur ada Rantis Anoa 21 unit, Ranri 50 unit, dam Alkap PHH 740 Set. Kemudian, Satbanpur teridiri dari Rantis Anoa 2 unit, Ranri 18 unit, dan Alkap PHH 345 set.

Berbagai ancaman yang terus mengintai mendekati hari pemilihan Pilkada, baik ancaman militer maupun nirmiliter, harus segera ditangkal oleh Kodam V/Brawijaya melalui Binter beserta komponen masyarakat dan Forkopimda. Ancaman nirmiliter, seperti kampanye negatif dalam pelaksanaan pemilu, pasti akan muncul dari salah satu peserta pilkada. Hal ini wajar dalam kontestasi untuk mendapatkan suara. Kodam V/ Brawijaya memahami pentingnya melawan kampanye negatif. Oleh karena itu, semua unsur harus menjaga agar pilkada tetap jujur dan adil. Ancaman lainnya adalah ketidakstabilan politik yang

bisa terjadi akibat konflik antar partai. Kodam V/Brawijaya berperan sebagai mediator dalam konflik internal partai politik. Strategi ketiga yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi Binter dalam mendukung tugas-tugas lainnya. Dengan meningkatkan kemampuan intelijen, komunikasi, dan koordinasi Binter, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada satuan tugas. Penguatan hubungan Binter dengan tokoh masyarakat juga akan mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kodam V/Brawijaya juga melakukan penyuluhan dan patroli siber untuk mengantisipasi bahaya berita hoaks atau kampanye hitam, serta memberikan edukasi tentang cara mengenali informasi palsu. Monitoring media sosial akan dilakukan untuk melacak konten yang merugikan, sementara penyuluhan kebangsaan akan memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Monitoring situasi politik juga akan dilakukan secara terus-menerus.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan mengoptimalkan peran Kodam V/Brawijaya dalam menghadapi pengamanan pilkada serentak 2024 yaitu: pertama, pemetaan yang cermat dan komprehensif, kita dapat mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi konflik tinggi, serta faktor-faktor penyebabnya. Hal ini memungkinkan pengembangan strategi mitigasi yang lebih efektif dan terfokus, seperti peningkatan dialog antar kelompok, penegakan hukum yang lebih baik, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengurangi ketegangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih kondusif dan harmonis, mengurangi risiko terjadinya konflik dan dampaknya terhadap masyarakat; Kedua, melakukan persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 secara intensif. Dengan Menyiapkan personel, logistik, dan materiil yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada; Ketiga, memaksimalkan fungsi Binter dalam mendukung tugas-tugas lainnya. Dengan meningkatkan kemampuan intelijen, komunikasi, dan koordinasi Binter, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada satuan tugas. Selain itu, penguatan hubungan Binter dengan tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kodam V/Brawijaya.

AKTUALISASI DOKTRIN OPERASI MILITER MATRA DARAT DI ERA MODERN

Oleh: Letkol Inf Roberth Ngadiran, S.E.
(Pbdy-2/Matfasjasa/Bmn Spabanlog Sdirum Kodiklatad)

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, TNI Angkatan Darat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. TNI AD di era modern ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, seperti ancaman terorisme, perang hibrida, cyber warfare, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, TNI AD perlu terus melakukan inovasi dan adaptasi khususnya doktrin operasi militer Matra Darat untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan baik. Terdapat tiga variabel pertahanan yang akan mengubah doktrin pertempuran khususnya pada pelaksanaan operasi militer matra darat di masa yang akan datang yakni: Paradigma Ancaman, Kondisi Lingkungan Strategis dan Teknologi Pertahanan (Andi Widjajanto (2022). Ketiga variabel tersebut telah mengubah karakter perang mulai dari peperangan generasi pertama hingga kelima. Perkembangan teknologi komputer (kecerdasan buatan), komunikasi (operasi serangan siber dan *internet of things*) dan robotika akan mengakibatkan perubahan di masa yang akan datang dan dapat mengubah pola serta bentuk peperangan matra darat.

Untuk itu, TNI AD perlu terus melakukan aktualisasi doktrin operasi militer Matra Darat secara terukur, terprogram, adaptif dan masif agar dapat mengetahui apakah doktrin operasi matra darat yang ada saat sudah adaptif, kekinian dan diketahui kekurangan serta kelemahannya bila dihadapkan dengan hakekat ancaman, dinamika lingkungan strategis dan perkembangan taktik dan strategi musuh/lawan, teknologi militer dan alutsista canggih (teknologi informasi dan komunikasi, drone, dan peralatan militer modern lainnya). Selain itu, menjadi faktor kunci dalam aktualisasi doktrin operasi militer Matra Darat adalah peningkatan kualitas SDM seperti aspek pendidikan perorangan, aspek latihan satuan sesuai metodanya, pelatihan simulasi tempur berbasis IT dan latihan bersama dengan negara-negara sahabat agar diperoleh kesiapan personel yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok.

Namun demikian betapa bagusnya doktrin operasi yang dimiliki tidak akan diketahui kekurangan dan kelemahan, apabila tidak diaktualisasikan dengan optimal dan sesuai caranya. Bahwa realita saat ini dan menjadi persoalan dalam aktualisasi doktrin yaitu, bahwa tidak semua doktrin matra dapat diaktualisasikan karena adanya keterbatasan dalam kemampuan dalam menyelenggarakan berbagai latihan yang bersekala besar, sarana prasarana berbasis IT yang terbatas dalam mensimulasikan doktrin, minimnya aktualisasi doktrin melalui *study* banding/ seminar/ Dik LN dalam kerangka kerjasama Army to Army, dan belum optimalnya aktualisasi doktrin operasi matra darat pada Latma dengan negara sahabat yang ada saat ini. Berangkat dari persoalan diatas maka ditarik sebagai rumusan masalah dalam esai ini adalah bagaimana aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat di Era Modern.

Maksud tulisan ini untuk memberi

gambaran bagaimana aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat TNI AD di Era Modern dengan Tujuan untuk memberikan masukan dan saran terkait Doktrin Operasi Militer Matra Darat di Era Modern. Adapun metode penulisan ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dimana pencarian data dan fakta lapangan, pengalaman-pengalaman bertugas selama berdinas, serta berdasarkan referensi/doktrin dan kepustakaan yang belaku untuk kemudian dianalisa dalam menjawab permasalahan yang terjadi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bernilai guna. Nilai guna tulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai bahan ide atau gagasan dalam mengaktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat di Era Modern. Batasan penulisan ini hanya terkait tentang aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat.

Definisi operasi militer matra darat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satuan TNI di wilayah daratan berikut ruang di atasnya dengan TNI AD sebagai pengendali pelaksanaan operasi. Latar belakang pemikiran operasi militer matra darat didasarkan pada sejarah operasi militer, paradigma ancaman dan konflik, lingkungan operasional TNI AD, tingkatan perang dan bentuk kemampuan operasi militer TNI AD.

Penjelasan latar belakang pemikiran doktrin operasi militer matra darat adalah pertama, bahwa sejarah operasi milliter mencatat TNI AD telah melaksanakan berbagai macam operasi militer, baik yang bersifat tempur maupun non tempur sejak jaman kemerdekaan hingga sekarang. Pengalaman operasi tersebut menjadi bahan pembelajaran guna menyusun doktrin operasi militer. Berangkat dari pengalaman sejarah bahwa para pejuang di perang kemerdekaan melakukan perlawanan terhadap agresor Belanda/ sekutu Inggris dengan mengandalkan persenjataan ala kadarnya, tanpa didasari taktik strategi maupun sistem operasi yang sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari pertempuran 8 (delapan) palagan dan pola operasi militer matra darat “Kartika Yudha”, 2022.

Pada perkembangan selanjutnya metode operasi militer matra darat mengalami perkembangan menjadi lebih moderen seperti yang diperlihatkan pada operasi pembebasan Irian Barat dan Operasi Seroja (Sejarah TNI AD, Kep 2020). Hal ini sejalan dengan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) yang mengedepankan pentingnya pertahanan pulau-pulau besar yang esensinya akan dipenuhi dengan penerapan operasi militer matra darat. Sebagai contoh, Indonesia, dengan wilayah geografis yang terdiri dari ribuan pulau, mengembangkan doktrin yang menekankan mobilitas tinggi dan kemampuan untuk beroperasi di berbagai jenis medan, termasuk hutan, pegunungan, dan daerah perkotaan.

Kedua, bahwa adanya teori paradigma ancaman dan konflik yaitu evolusi ancaman. Dalam teori ini terdapat 2 (dua) paradigma dalam teori hubungan sosial politik antar negara yang melahirkan pendekatan dalam pembentukan postur militer negara dalam menghadapi ancaman, yakni paradigma negara eksterjajah (ekskoloni) dan paradigma eks penjajah (ekskolonialis). Yang lainnya adalah spektrum konflik yaitu situasi yang menjadi dasar bagi militer untuk beroperasi. Elemen untuk mengidentifikasi spektrum konflik antara lain dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi dan karakter konflik. Berbagai jenis ancaman konvensional, ancaman asimetris seperti terorisme dan pemberontakan dalam hal bentuk ancaman negara kepulauan seperti Indonesia diantaranya adalah pelanggaraan wilayah dari darat, laut, udara, siber dan ruang angkasa. Kemudian ancaman terbuka terhadap serangan di wilayah Alki 1, Alki 2 dan Alki 3 serta ancaman negara adidaya dalam memperebutkan sumber daya alam (SDA) dan pasar industri.

Tren lingkungan strategis saat ini meliputi fenomena perang dan militerisasi kawasan dengan kehadiran kekuatatan militer dunia pada titik pada situasi siap perang. Timbulnya konflik militer dan potensi perang saudara, tren menguatnya kembali politik blok barat dan blok timur yang mendorong ancaman baru dapat

muncul sewaktu-waktu.

Ketiga, bahwa adanya lingkungan operasional TNI AD yang memberikan pemahaman doktrinal tentang bagaimana TNI AD melakukan pembinaan dan penggunaan kekuatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghadapi kemungkinan perubahan lingkungan operasi dari lini masa damai hingga terjadi situasi, konflik maupun perang melalui pendekatan lingkungan operasional tempur dan non tempur.

Lingkungan Operasional TNI AD memberikan pemahaman doktrinal tentang bagaimana TNI AD melakukan pembinaan dan penggunaan kekuatan sesuai tugas dan fungsinya dalam menghadapi kemungkinan perubahan lingkungan operasi dari lini masa damai hingga terjadinya situasi krisis, konflik maupun perang melalui pendekatan lingkungan operasional tempur dan nontempur. Lingkungan Operasional TNI AD dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi serta musuh/lawan sesuai dengan spektrum konflik yang terjadi. Terdapat 4 (empat) kondisi lingkungan operasional yang akan dihadapi oleh TNI AD untuk mengubah masa krisis, konflik dan perang menuju masa damai.

Penjelasan 4 (empat) kondisi lingkungan operasional sebagai teori yang berkorelasi dengan aktualisasi doktrin operasi matra darat, yaitu kondisi pertama adalah ancaman aktual menghadapi disintegrasi, perpecahan bangsa dan ketegangan antar negara. Konflik yang dihadapi adalah konflik internal *(Intra-state conflict)* seperti: vertikal dan horizontal dan konflik antar negara *(inter-state conflict)*. Kondisi kedua adalah ancaman potensial agresi berupa usaha pendudukan wilayah dari negara asing dengan perbandingan relatif kita lebih kuat dari negara agresor atau seimbang (relatif sama kuat). Pada kondisi ini terjadi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Contoh penindakannya adalah trouble spot yang terjadi di wilayah teritorial NKRI. Kondisi ketiga adalah ancaman potensial agresi negara asing dengan perbandingan relatif musuh lebih kuat dari kita. Pada kondisi lingkungan operasi di mana kekuatan TNI AD lebih inferior dibandingkan kekuatan lawan maka operasi matra darat yang dilakukan didesain menggunakan gerilya modern. Kondisi keempat adalah ancaman non tempur terjadinya krisis alam dan non alam. Kondisi ini aktual dihadapi TNI AD, terutama oleh satuan-satuan pada strata taktis seperti satuan setingkat Kodim dan Batalyon. Ancaman juga dapat dilihat dari eksistensinya dalam mengancam pertahanan negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman yang bersifat faktual yaitu ancaman hibrida sebagaimana yang sudah terjadi dan berkembang, cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain: klaim wilayah NKRI oleh pihak asing; pelanggaran wilayah perbatasan; intervensi asing; separatisme; pemberontakan bersenjata; perompakan; pembajakan dan penyanderaan warga negara Indonesia; terorisme dan radikalisme; serangan siber; ancaman intelijen atau spionase; ancaman perang

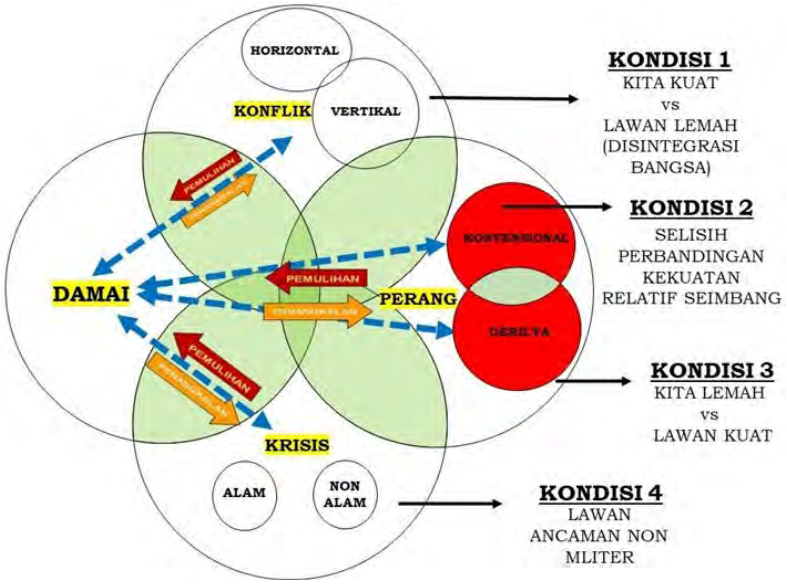

Gambar diagram hubungan pendekatan lingkungan operasional TNI AD
(Sumber : Doktrin Operasi Militer Matra Darat "Kartika Yudha", 2022)

psikologis; bencana alam dan lingkungan; pencurian kekayaan alam; wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba; konflik SARA serta dampak negatif dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0; ataupun krisis ekonomi.

Latar belakang Keempat, mengenai tingkatan perang yaitu perspektif doktrinal yang memperjelas hubungan antara tujuan strategis hingga tindakan taktis yang saling terkait dan tergantung satu sama lain terbagi 3 (tiga) strata yakni strata strategis, operasional dan taktis. Kelima, adanya bentuk kemampuan operasi militer TNI AD yang merupakan pengelompokkan operasi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD dalam melaksanakan tugas Operasi. Bentuk kemampuan ini merupakan operasi-operasi di strata taktis yang akan didesain menciptakan suatu kondisi yang dibutuhkan/dikehendaki untuk mencapai sasaran dan melakukan usaha/kegiatan untuk melawan dan menggagalkan penyenggaraan operasi intelejen musuh, meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan oleh satuan intelejen TNI AD.

Dari latar belakang pemikiran diatas paling dominan adalah kegunaan dipahaminya lingkungan operasional TNI AD, karena kapabilitas penggunaan kekuatan ini akan menjadi pertimbangan pihak eksternal Angkatan Darat ketika memberikan panduan bagi perumusan/ perancangan strategi militer maupun strategi pembangunan kekuatan militer. Selain itu, penggambaran lingkungan operasional dapat menjadi referensi dan panduan bagi TNI AD dalam melakukan komunikasi strategis dengan P/I/K/L untuk menyusun kerangka kerja sama yang setara (keterpaduan) melalui pelibatan kekuatan TNI AD (pemberdayaan, keterpaduan, pengamanan dan perlawanan) pada masa damai maupun masa transisi (pada tahap penangkalan atau penindakan) dalam rangka menyiapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta maupun sebagai mitra pembangunan. Pemahaman tentang lingkungan operasional akan berdampak

pada penyusunan doktrin, pendidikan, latihan, postur, dan gelar kekuatan TNI AD. Dengan adanya perumusan lingkungan operasional ini maka penyusunan doktrin, pendidikan, dan latihan TNI AD tidak lagi didominasi pada pendekatan lingkungan operasional kedua yaitu musuh lebih inferior dari kita atau kekuatan berimbang.

Doktrin operasi matra darat merupakan fondasi yang sangat penting dalam strategi pertahanan suatu negara. Doktrin ini merujuk pada prinsip-prinsip, strategi, dan metode yang digunakan oleh angkatan darat dalam menjalankan operasi militer. Sebagai bagian integral dari kekuatan militer, angkatan darat memiliki peran utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga stabilitas dalam negeri, dan merespons ancaman dari luar. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan doktrin yang efektif sangat penting untuk memastikan kesiapan dan keefektifan angkatan darat dalam berbagai situasi (Doktrin Operasi Militer Matra Darat "Kartika Yudha", 2022).

Salah satu aspek penting dari doktrin operasi matra darat adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen kekuatan militer. Ini mencakup tidak hanya angkatan darat itu sendiri, tetapi juga interoperability angkatan udara, angkatan laut, serta elemen non-militer seperti intelijen dan logistik. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa operasi militer dapat dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.

Selain itu, doktrin sistem operasi matra darat juga harus mempertimbangkan faktor manusia. Sumber daya manusia

merupakan elemen kunci dalam setiap operasi militer, dan keberhasilan doktrin ini sangat bergantung pada kemampuan, disiplin, dan moral prajurit. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan personel menjadi komponen penting dari doktrin ini. Pelatihan yang baik tidak hanya mencakup keterampilan teknis dan taktis, tetapi juga pengembangan karakter dan kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu terkait operasi matra darat penting untuk dipertimbangkan konsep pertahanan negara dalam hal ini negara kepulauan sesuai dengan Undang-Undang TNI NO 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal I ayat yang menegakkan kedauluan negara, mempertahankan kedaultan NKRI dari ancaman dan gangguan serta mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Tentara Amerika Latih Pasukan Raider TNI AD Gundakan Black Hornet, Drone Ukuran Serangga

Pada era modern, teknologi juga menjadi faktor krusial dalam doktrin sistem operasi matra darat. Kemajuan teknologi militer, seperti sistem persenjataan canggih, teknologi informasi dan komunikasi, serta kendaraan tempur modern, memberikan keunggulan yang signifikan dalam pertempuran. Namun, teknologi juga membawa tantangan baru, seperti perlunya adaptasi terhadap sistem persenjataan baru dan pengelolaan informasi yang semakin kompleks. Terkait bagaimana langkah-langkah aktualisasi doktrin operasi matra darat, maka hal ini dapat dilakukan sebagai berikut, pertama aktualisasi doktrin operasi militer matra darat dapat dicapai melalui Pendekatan teori Transformasional yang dikemukakan oleh James Mac Gregor Burns (2012). Teori ini menekankan pada pentingnya kepemimpinan yang visioner dan inspiratif dalam mendorong perubahan yang mendasar. Dalam konteks TNI AD, kepemimpinan transformasional berarti para pemimpin di semua tingkatan harus mampu mengartikulasikan visi yang jelas tentang bagaimana doktrin operasi militer harus disesuaikan dengan tantangan era modern Visi ini harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi seluruh anggota TNI AD untuk terlibat aktif dalam proses aktualisasi doktrin dengan komunikasi yang efektif dan keterbukaan terhadap ide-ide baru dimana setiap prajurit merasa nyaman untuk menyampaikan pemikiran dan masukannya terkait dengan pengembangan doktrin.

Dengan menerapkan pendekatan kepemimpinan transformasional, TNI AD dapat mencapai aktualisasi doktrin operasi militer secara efektif. Para pemimpin yang visioner dan inspiratif akan mampu membimbing seluruh anggota TNI AD untuk bergerak bersama menuju tujuan yang sama, yaitu mewujudkan matra darat yang adaptif dan siap menghadapi segala tantangan di era modern.

Kedua adalah bahwa aktualisasi doktrin dapat diterapkan pada ke semua penyelenggaraan latihan-latihan baik latihan tingkat perorangan maupun latihan tingkat satuan. Saat ini, spektrum ancaman telah meluas, mencakup perang hibrida, terorisme, bencana alam, hingga perang siber. Oleh karena itu, TNI AD harus mampu melaksanakan OMP dan OMSP secara efektif. Modernisasi alutsista dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam aktualisasi doktrin ini. Penggunaan teknologi canggih seperti drone, kendaraan tempur otonom, dan sistem informasi terintegrasi akan meningkatkan kemampuan tempur dan mobilitas pasukan.

Sejalan dengan lingkup doktrin operasi matra darat yang terdiri dari OMP dan OMSP. Khususnya latihan materi OMP, faktanya untuk TNI-AD latihan tingkat satuan tertinggi yang dapat dilakukan

saat ini pada latihan satuan tingkat Brigade Tim Pertempuran. Untuk latihan yang lebih tinggi pada tingkat divisi tempur ke atas diakomodir pada latihan operasi gabungan, dimana TNI-AD melibatkan Divisi Infanteri pada Kogasgablinud dan Kogasgabrat. Adapun pada OMP, latihan satuan sudah berjalan sebagai media uji doktrin, perbaikan doktrin dan munculnya teori baru dalam doktrin. Sebagaimana pada doktrin OMP sudah diterapkan latihan terintegrasi antar kesenjataan/kecabangan mulai YTP (Yon Tim Pertempuran) maupun BTP (Brigade Tim Pertempuran) dimana pada latihan tersebut sekaligus diuji juga selain teknis dan taktis adalah alutsista yang digunakan seluruh kesenjataan/kecabangan.

Adapun untuk OMSP yang terdiri dari 9 operasi tempur dan 5 operasi non tempur, ada latihan yang dapat dilaksanakan maupun latihan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, aktualisasi doktrin operasi matra darat harus dilakukan agar dapat dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan validitas, adaptif dan relevansinya. Aktualisasi doktrin operasi matra darat melalui penggelaran latihan secara terprogram, terukur dan masif menjadi kunci untuk memastikan kesiapan matra darat dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di era modern. Kolaborasi dan interoperabilitas dengan matra lain serta lembaga non-militer juga menjadi elemen penting.

Ketiga, langkah berikutnya adalah aktualisasi doktrin operasi matra disimulasikan dalam simulasi tempur berbasis IT, yaitu simulasi tempur OMP maupun simulasi tempur OMSP. Langkah ini dijadikan solusi mengingat begitu banyak latihan lapangan tingkat satuan yang lebih besar belum sanggup diselenggarakan oleh TNI maupun TNI AD karena besarnya anggaran yang dibutuhkan dihadapkan keterbatasan anggaran negara. Terkait latihan simulasi tempur berbasis IT tentunya membutuhkan perangkat/fasilitas simulasi yang memadai. Saat ini untuk TNI-AD Pussimpur Kodiklatad baru memiliki perangkat simulasi tempur OMP gabungan kecabangan pada tingkat Brigade Tempur OMP gabungan kecabangan pada tingkat Brigade Tempur. Jika aktualisasi doktrin dilakukan melalui Pussimpur, maka harus disiapkan perangkat paket simulasi untuk OMP sampai pada tingkat Divisi Tempur maupun yang lebih tinggi lagi. Saat ini untuk dapat mengaktualkan doktrin tempur yang lebih tinggi dari Brigade Tempur haruslah menggunakan fasilitas yang ada di Sesko TNI, yaitu BMC *(Battle Management System)*. Terkait kepentingan doktrin operasi matra darat maka TNI-AD harus berupaya mengadakan fasilitas tersebut sebagai laboratorium aplikasi doktrin operasi matra darat yang berbasis IT.

Keempat, aktualisasi doktrin matra darat dapat dilakukan dengan dengan melaksanakan study banding, seminar-seminar AD internasional, maupun pendidikan Pa di luar negeri dengan membekali para Perwira siswa Dik LN dengan materi ceklist yang telah didesign oleh TNI-AD dalam hal ini Kodiklatad untuk menjawab hal-hal yang akan dikembangkan oleh semua kesenjataan/kecabangan TNI-AD. Semuanya ditempuh melaui jalur kerjasama militer dengan negara-negara yang AD nya sudah maju dan modern.

Kelima, aktualisasi doktrin matra darat pada penyelenggaraan Latma

dengan negara-negara sahabat yang sudah ada dan terselenggarakan selama ini bahkan telah ditingkatkan menjadi skala yang lebih besar. Contohnya latihan dengan US Pacomd, dimulai dari Garuda Shield (GS) sekarang sudah menjadi Super Garuda Shield (SGS) kegiatan Latma seperti ini harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan doktrin operasi matra darat yang sudah tercantum baik pada doktrin Tridek maupun KEP. Pada latihan bersama ini baik secara langsung maupun tidak langsung TNI AD dapat mengukur apakah doktrin yang ada saat ini sudah mumpuni untuk menghadapi ancaman dan mempelajari seksama tentang doktrin negara sahabat yang mungkin dapat diadopsi melengkapi doktrin yang ada. Selain itu, pengalaman pelatihan bersama prajurit dengan negara sahabat harus ditingkatkan untuk menghadapi perang modern yang semakin kompleks.

Aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat TNI AD di era modern menjadi sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Dunia yang terus berubah dengan pesat, ditandai oleh kemajuan teknologi yang eksponensial dan perubahan lanskap geopolitik yang dinamis, menuntut TNI AD untuk senantiasa adaptif dan relevan. Tanpa aktualisasi yang berkelanjutan, doktrin yang ada tidak akan teruji, tidak dikelahui kelemahannya dan menjadi tidak valid serta tidak mampu menjawab tantangan zaman. Pentingnya aktualisasi ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan TNI AD tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Doktrin yang teraktualisasi dengan baik akan dapat diperbarui menjadi panduan yang jelas dan komprehensif bagi TNI AD dan seluruh prajuritnya dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks, baik dalam rangka OMP maupun OMSP.

Selain itu, aktualisasi doktrin juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi militer. Dengan mengadopsi teknologi terkini dan taktik yang inovatif, TNI AD dapat memaksimalkan daya tempurnya dan meminimalkan risiko bagi prajurit. Lebih dari itu, aktualisasi doktrin juga mencerminkan komitmen TNI AD untuk terus belajar dan berkembang. Dalam dunia yang terus berubah, tidak ada tempat bagi stagnasi. TNI AD harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapabilitasnya agar tetap menjadi kekuatan yang disegani dan dihormati. Dengan demikian, aktualisasi Doktrin Operasi Militer Matra Darat di era modern bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah investasi strategis kejayaan bangsa demi tegaknya kedaulatan NKRI. Atas dasar tersebut aktualisasi doktrin operasi militer harus dilakukan secara berkelanjutan serta memastikan TNI AD akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

TMMD MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH BANTUL PROJOTAMANSARI

BERSATU MEMBANGUN BANTUL MAJU SEJAHTERA DAN BERBUDAYA

Oleh: Letkol Inf Muhidin, S.H., M.I.P.
(Dandim 0729/Bantul)

TNI memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini tertuang dalam UU TNI No 34 tahun 2004 dimana disebutkan bahwa Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.

Dari tugas pokok tersebut TNI AD bertanggungjawab terhadap operasi pertahanan di darat, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan di darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan Tugas Pokok TNI adalah meaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan kekuatan di darat, TNI AD menilai perlu gebrakan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dengan hadir langsung di tengah rakyat. Sehingga pada 1980, TNI mencetuskan program ABRI Masuk Desa (AMD) untuk mempererat hubungan dengan rakyat. Harapannya, kesejahteraan meningkat melalui pemerataan pembangunan infrastruktur. Setelah era reformasi, AMD dirubah namanya menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD),

Pelaksanaan TMMD tersebut merupakan penjabaran dari Tugas pokok TNI yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistim pertahanan Semesta dan Membantu Tugas Pemerintah di Daerah.

Kodim 0729/Bantul Korem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro sebagai bagian dari Angkatan Darat yang merupakan Satuan Teritorial memiliki tugas dalam pembinaan Teritorial di wilayah Kabupaten Bantul. Bantul merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki 17 kapanewon dan 75 kalurahan. Yogyakarta menggunakan Kapanewon yang berarti Kecamatan, dan Kalurahan yang berarti Kelurahan. Sebagian wilayah Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang terdiri dari perbukitan terutama wilayah Kecamatan Imogiri, Pundong dan Dlingo sehingga akses pembangunan diwilayah tersebut masih kurang, terutama akses pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dengan desa lainnya maupun desa dengan kecamatan.

Kodim sebagai satuan teritorial menyadari bahwa di daerah binaanya masih terdapat kesulitan rakyatnya terutama masalah pembangunan inspratuktur

Apresiasi Warga Masyarakat Adanya Program TMMD

berupa jalan dan jembatan maka Kodim terpanggil untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di wilayah maka Dandim 0729/Bantul melalui para Babinsa berkoordinasi dengan Lurah setempat mencari sasaran prioritas pembangunan yang harus segera dikerjakan melalui program TMMD.

Dari hasil survey dan koordinasi dengan pihak kalurahan dan Pemerintah Daerah Bantul, Kodim 0729/Bantul mengusulkan TMMD dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dlingo tepatnya di Kalurahan Muntuk. TMMD yang dilaksanakan adalah TMMD Reguler ke 119. Dimana sasaran TMMD Reg 119 tersebut merupakan pembuatan jalan tembus antara Desa Temuwuh dengan Desa Muntuk yang memang sudah dicita-citakan warga sejak 1982 dan baru dapat terealisasi pada tahun 2024, selama 42 tahun warga masyarakat harus menunggu pembangunan jalan tembus tersebut, sedangkan jalan tersebut merupakan akses penting untuk meningkatkan roda perekonomian warga masyarakat yaitu untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan yang akan dijual ke ibu kota kecamatan maupun ke wilayah lain. Dengan adanya akses jalan tembus tersebut sehingga dapat menghemat biaya tranportasi, bahkan akses jalan yang dibangun melalui TMMD Reguler tersebut tidak hanya melancarkan hubungan antara desa dengan kota kecamatan saja tetapi juga mempermudah akses jalan menuju kabupaten lain menuju ke Kabupaten Gunung Kidul.

TNI Manunggal Membangun Desa merupakan suatu program terpadu antara TNI AD khususnya Kodim 0729/Bantul dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan harapan kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat. Selain sasaran pokoknya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, TMMD juga bertujuan untuk pembinaan keamanan wilayah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang pembangunannya masih tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena di wilayah tersebut secara umum masyarakat hidup masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga perlu segera mendapat perhatian lebih dari Pemerintah.

Pembuatan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan 2 Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Bantul Yogyakarta di daerah perbukitan

Anggota Satgas TMMD Gotong Royong Bersama Warga

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah dan instansi lainnya sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan yang kelihatannya berat akan menjadi ringan karena dilaksanakan secara bersama-sama atau gotong-royong. Demikian juga dengan hasil yang capai juga sangat berkualitas dan menghemat anggaran. TMMD juga dijadikan wadah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dan ideologi Pancasila dengan gotong-royong menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, selain itu juga untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Wilayah yang menjadi sasaran program TMMD di Kodim 0729/Bantul merupakan daerah terisolir maupun terpencil dan masih kurangnya akses jalan maupun yang lainnya, baik jembatan, rumah warga yang tidak layak huni maupun pasilitas umum lainnya, sehingga dengan adanya program TMMD ini akan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah atau di daerah.

Dengan hasil yang dicapai dalam kegiatan TMMD tersebut kini warga atau masyarakat Desa Temuwuh dan Muntuk saat ini sudah merasakan manfaatnya, karena dahulu sebelum adanya jalan tembus yang dikerjakan melalui program TMMD ini masyarakat yang akan menuju ke Kota Kecamatan harus menempuh perjalanan selama 1 jam lebih, sekarang waktu tempuh hanya 15 menit saja.

Selain pembangunan sasaran fisik dalam pelaksanaan TMMD yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pompanisasi, penghijauan, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan fasilitas umum maupun fasilitas publik lainnya TMMD juga melaksanakan pembangunan

sasaran non fisik, berupa penyuluhan-penyuluhan. Seperti penyuluhan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, stunting, narkoba, keluarga berencana, pelayanan kesehatan gratis, edukasi wawasan kebangsaan, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga penyaluran bantuan sosial. Tujuan sasaran Non Fisik adalah untuk memberikan edukasi, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pemahaman tentang kesadaran hukum maupun membangun dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta mewujudkan bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi serta sejahtera.

Kegiatan Sosialisasi Program Non Fisik TMMD

Selain itu manfaat utama dari Program TMMD adalah peningkatan aksesibilitas. Dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, masyarakat desa dapat memiliki akses yang lebih baik ke kota-kota terdekat. Hal ini mempermudah mereka dalam mengakses fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Lebih lanjut lagi, akses yang lebih baik juga membuka peluang baru dalam perdagangan dan pariwisata.

Dalam pelaksanaan Program TMMD tentunya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini memberdayakan masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan memilih pilihan terbaik untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi mitra yang aktif dalam pembangunan daerah sehingga masyarakat juga akan merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. TMMD merupakan program yang sangat baik, karena dalam program tersebut mempunyai tujuan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Keunggulan dari program ini adalah melibatkan semua unsur yang ada mulai dari TNI, Polri, Pemda, Ormas dan instansi terkait lainnya sehingga kegiatan menjadi sangat sempurna.

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa. Melalui pembangunan infrastruktur dan partisipasi aktif masyarakat, program ini meningkatkan aksesibilitas, memperkuat keamanan, membantu mengatasi kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan adanya Program TMMD, masyarakat desa dapat merasakan perubahan positif dalam kualitas hidup dan pembangunan komunitas mereka. Diharapkan program ini terus berlanjut dan menjadi solusi bagi permasalahan pembangunan di desa-desa Indonesia, untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa-Desa terpencil dan terisolir.

Program TMMD merupakan wujud bakti TNI yang difokuskan dalam membantu pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat khususnya yang tinggal di daerah dan terpencil, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang telah dikerjakan dalam program TMMD ini, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga apa yang telah dikerjakan dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

PERAN KODIM 0615/KUNINGAN MELALUI CUTTER KHITAN SONIX

SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN UNTUK MASYARAKAT

Oleh: Letkol Arh Kiki Aji Wiryawan
(Dandim 0615/Kuningan)

Khitan, atau sirkumsisi, adalah prosedur medis penting yang juga merupakan bagian dari budaya dan agama di berbagai masyarakat, termasuk Indonesia. Selain sebagai ritual penting dalam kehidupan anak laki-laki, khitan juga diakui secara medis karena dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual. Namun, metode khitan tradisional sering menimbulkan masalah seperti rasa sakit, risiko infeksi, dan pemulihan yang lama, sehingga dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan prosedur ini.

Dengan perkembangan teknologi medis, muncul inovasi baru seperti Cutter Khitan Sonix. Alat ini menggunakan teknologi sonik untuk membuat khitan lebih nyaman, cepat, dan aman. Cutter Khitan Sonix juga merupakan bentuk pengabdian nyata dari anggota Kodim 0615/Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada bidang keamanan, tetapi juga di bidang kesehatan.

Penemuan Cutter Khitan Sonix oleh anggota Kodim 0615/Kuningan memperlihatkan komitmen TNI dalam membantu mengatasi masalah-masalah masyarakat. Alat ini tidak hanya mengubah cara khitan dilakukan, tetapi juga memperkuat peran TNI dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan Masalah

Prosedur khitan tradisional, meskipun telah lama digunakan dan bermanfaat, menghadapi sejumlah tantangan seperti rasa sakit yang signifikan, risiko infeksi yang tinggi, dan waktu pemulihan yang lama. Tantangan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan tenaga medis, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, dalam beberapa kasus, metode tradisional mungkin tidak memenuhi standar medis modern, yang bisa meningkatkan risiko komplikasi lebih lanjut.

Kemunculan Cutter Khitan Sonix bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Alat ini dikembangkan oleh seorang anggota Kodim 0615/Kuningan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan prosedur khitan, serta membuatnya lebih nyaman dan efisien bagi pasien dan tenaga medis. Cutter Khitan Sonix dirancang untuk menjawab pertanyaan kritis: Bagaimana alat ini dapat meningkatkan kenyamanan pasien, mempercepat proses pemulihan, dan mengurangi risiko komplikasi dalam prosedur khitan?

Tujuan dan Manfaat

Penggunaan Cutter Khitan Sonix memiliki beberapa tujuan utama yang memberikan manfaat signifikan bagi pasien dan masyarakat:

- **Meningkatkan Kenyamanan Pasien.** Alat ini dirancang untuk mengurangi rasa sakit selama prosedur khitan, sehingga pasien, terutama anak-anak, dapat menjalani khitan dengan lebih tenang dan nyaman, mengurangi trauma dan ketakutan.

- **Mempercepat Waktu Pemulihan.** Cutter Khitan Sonix mempercepat proses penyembuhan dengan meminimalkan trauma pada jaringan selama prosedur. Pasien dapat kembali ke aktivitas normal lebih cepat, yang memberikan keuntungan bagi keseharian mereka.

- **Mengurangi Risiko Infeksi.** Dilengkapi dengan teknologi pemotongan presisi tinggi, alat ini dirancang untuk mengurangi risiko infeksi pasca-operasi, yang secara signifikan berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik.

- **Meningkatkan Efisiensi Prosedur.** Alat ini dirancang untuk mempercepat prosedur khitan, sehingga lebih banyak pasien dapat dilayani dalam waktu yang lebih singkat, terutama bermanfaat dalam program khitan massal, meningkatkan efisiensi tenaga medis.

- **Memperkuat Pengabdian Kodim 0615/Kuningan.** Inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat medis tetapi juga memperkuat peran sosial Kodim 0615/Kuningan dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan, dengan memperlihatkan komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perbandingan Penggunaan Cutter Khitan Sonix dengan Metode Tradisional

Dalam membandingkan Cutter Khitan Sonix dengan metode tradisional, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

- **Kenyamanan.** Khitan tradisional sering menyebabkan rasa sakit karena alat-alat sederhana seperti pisau atau gunting. Sebaliknya, Cutter Khitan Sonix menggunakan teknologi sonik yang mengurangi gesekan dan panas, sehingga pasien, terutama anak-anak, merasa lebih nyaman dan kurang trauma.

- **Risiko Komplikasi.** Metode tradisional memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, seperti infeksi dan pendarahan. Cutter Khitan Sonix dilengkapi sistem pemantauan otomatis yang memastikan pemotongan lebih presisi, sehingga risiko komplikasi dan infeksi bisa ditekan.

- **Waktu Pemulihan.** Setelah khitan tradisional, pemulihan cenderung lebih lama karena luka yang lebih besar. Dengan Cutter Khitan Sonix, luka lebih kecil dan penyembuhan bisa 30% lebih cepat, memungkinkan pasien segera kembali beraktivitas.

- **Efisiensi Prosedur.** Khitan tradisional bisa memakan waktu lebih lama tergantung kemampuan medis. Cutter Khitan Sonix mempercepat proses khitan dengan hasil yang tetap akurat, sangat berguna untuk program khitan massal.

Fakta-fakta tentang Cutter Khitan Sonix

Cutter Khitan Sonix adalah produk inovasi yang memiliki berbagai keunggulan, didukung oleh teknologi mutakhir dan pengalaman medis. Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai alat ini:

- **Teknologi Sonik Presisi Tinggi.**

Cutter Khitan Sonix menggunakan gelombang sonik untuk memotong kulup dengan presisi yang sangat tinggi. Teknologi ini mengurangi gesekan dan panas, yang bisa menyebabkan rasa sakit dan memperlambat proses penyembuhan.

- **Desain Ergonomis dan Aman.**

Alat ini dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna dan pasien. Desain ergonomisnya memungkinkan kontrol yang lebih baik selama prosedur, serta dilengkapi dengan sistem pemantauan otomatis untuk mencegah komplikasi.

- **Efektivitas yang Teruji.**

Berdasarkan studi klinis, Cutter Khitan Sonix mampu mengurangi waktu prosedur hingga 30% dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, alat ini memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih aman dan efisien.

- **Kontribusi Sosial dan Ekonomi.**

Cutter Khitan Sonix tidak hanya menawarkan keuntungan medis tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks pengabdian masyarakat, alat ini memungkinkan lebih banyak anak-anak dan remaja mendapatkan pelayanan khitan yang aman dan nyaman.

Hubungan dengan Kodim 0615/ Kuningan

Inovasi Cutter Khitan Sonix adalah hasil dari dedikasi seorang anggota Kodim 0615/Kuningan yang memiliki perhatian mendalam terhadap kebutuhan masyarakat akan prosedur medis yang lebih baik. Sebagai satuan teritorial TNI, Kodim 0615/Kuningan memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga keamanan wilayah tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Penemuan Cutter Khitan Sonix oleh seorang anggota Kodim 0615/Kuningan adalah contoh nyata bagaimana prajurit TNI dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan inovasi ini, Kodim 0615/Kuningan memperluas peran pengabdiannya, tidak hanya dalam aspek keamanan tetapi juga dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Implementasi dan Dampak dalam Komunitas

Sejak diperkenalkan, Cutter Khitan Sonix telah digunakan dalam berbagai program khitan massal yang diselenggarakan oleh Kodim 0615/ Kuningan di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

- **Khitan Massal di Kuningan.**

Dalam salah satu program khitan massal, penggunaan Cutter Khitan Sonix berhasil meningkatkan jumlah anak yang dilayani dalam satu hari, tanpa mengurangi kualitas prosedur. Orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka pulih lebih cepat dan mengalami lebih sedikit rasa sakit.

- **Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Lokal.**

Kodim 0615/Kuningan juga bekerja sama dengan berbagai klinik dan rumah sakit di wilayah Kuningan untuk mengadopsi Cutter Khitan Sonix dalam prosedur rutin mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan tetapi juga mengurangi beban kerja tenaga medis.

Studi Kasus dan Pengalaman Empiris

Beberapa studi kasus yang melibatkan penggunaan Cutter Khitan Sonix menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam pelaksanaan prosedur khitan:

- **Studi Kasus 1: Khitan Massal di Desa Terpencil.**

Dalam sebuah program khitan gratis di desa terpencil di wilayah Kuningan, Cutter Khitan Sonix digunakan untuk melayani lebih dari 200 anak dalam waktu yang singkat. Semua pasien melaporkan pengalaman yang positif, dengan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan metode tradisional.

- **Studi Kasus 2: Testimoni Tenaga Medis di RSUD Kuningan.**

Tenaga medis di RSUD Kuningan yang menggunakan Cutter Khitan Sonix melaporkan bahwa alat ini memudahkan prosedur, meningkatkan akurasi pemotongan, mengurangi risiko komplikasi, dan membuat proses lebih aman bagi pasien. Dokter melaporkan peningkatan kepuasan pasien dan penurunan jumlah komplikasi pasca-operasi.

- **Studi Kasus 3: Khitan pada Anak dengan Kondisi Medis Khusus.**

Cutter Khitan Sonix juga menunjukkan keunggulannya dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, seperti pada anak-anak dengan kondisi medis khusus yang memerlukan perhatian ekstra. Seorang anak dengan hemofilia ringan menjalani prosedur khitan dengan Cutter Khitan Sonix di bawah pengawasan ketat. Meskipun ada kekhawatiran tentang risiko pendarahan berlebihan, prosedur ini berjalan lancar tanpa komplikasi.

- **Studi Kasus 4: Pengalaman di Klinik Swasta Kuningan.**

Seorang dokter di klinik swasta di Kuningan yang mulai menggunakan Cutter Khitan Sonix dalam praktik sehari-harinya melaporkan peningkatan kepuasan pasien dan penurunan jumlah komplikasi pasca-operasi. Pasien yang kembali untuk pemeriksaan pasca-operasi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih baik dengan rasa sakit yang jauh berkurang.

- **Studi Kasus 5: Implementasi di Program Khitan Massal Kuningan.**

Cutter Khitan Sonix digunakan dalam sebuah program khitan massal di Kuningan yang melayani lebih dari 300 anak dalam satu hari. Penggunaan alat ini memungkinkan tenaga medis menyelesaikan prosedur dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas, dengan anak-anak melaporkan pemulihan yang lebih cepat dan lebih sedikit rasa sakit.

Peran Kodim 0615/Kuningan dalam Pengembangan Teknologi

Sebagai institusi militer yang bertanggung jawab atas wilayah Kuningan, Kodim 0615/Kuningan berperan penting dalam mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan Kodim 0615/Kuningan terhadap pengembangan Cutter Khitan Sonix mencerminkan komitmen mereka dalam membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi.

Inovasi ini juga menunjukkan bagaimana anggota TNI dapat memainkan peran penting dalam bidang kesehatan, dengan menggabungkan pengetahuan dan disiplin militer dengan kreativitas dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Cutter Khitan Sonix adalah bukti bahwa teknologi yang dikembangkan dalam konteks militer juga dapat memiliki aplikasi yang luas dan bermanfaat dalam kehidupan sipil.

Cutter Khitan Sonix, yang ditemukan oleh seorang anggota Kodim 0615/ Kuningan, adalah sebuah inovasi penting dalam prosedur khitan yang membawa berbagai manfaat bagi masyarakat. Dengan teknologi sonik canggih, alat ini menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan metode tradisional, termasuk peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan.

Lebih dari sekadar alat medis, Cutter Khitan Sonix adalah simbol pengabdian seorang prajurit TNI kepada masyarakat. Penggunaan alat ini dalam berbagai program di wilayah tugas Kodim 0615/ Kuningan memperkuat peran TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam hal keamanan tetapi juga dalam bidang kesehatan. Inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat diterapkan untuk memperbaiki praktik-praktik medis tradisional, menjadikannya sebagai contoh yang baik dalam pengabdian masyarakat melalui inovasi.

Dengan terus mengadopsi Cutter Khitan Sonix, fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kodim 0615/Kuningan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih aman, meningkatkan kepuasan pasien, dan menunjukkan bagaimana pengabdian seorang prajurit TNI dapat membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa prajurit TNI, melalui inovasi dan dedikasi mereka, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam hal kesehatan maupun kesejahteraan secara keseluruhan.

PENGABDIAN TNI DI UJUNG TIMUR INDONESIA "KITORANG BASUDARA"

Satgas Pamtas Statis RI – PNG Yonif 111/KB Hadir di Ujung Timur Indonesia Untuk Melaksanakan Tugas Pengabdian Terbaik Bagi INDONESIA

Oleh: Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, S.I.P.
(Danyonif 111/Karma Bhakti)

Patroli Patok Perbatasan RI-PNG MM. 11.1

Batalyon Infanteri 111 /Karma Bhakti atau yang sering dikenal sebagai Yonif 111/KB, merupakan Batalyon Infanteri yang memiliki kualifikasi Raider yang berada di bawah Komando Brigif 25/Siwah Kodam Iskandar Muda yang bermarkas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Ds. Tualang Cut, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang. Saat ini Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti dibawah pimpinan Danyonif Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, S.I.P., Abituren Akademi Militer tahun 2003.

Tugas Pokok, Fungsi Dan Peran Yonif 111/KB

Tugas pokok TNI, yakni menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yaitu dengan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut , TNI AD yang merupakan bagian dari TNI melaksanakan 2 fungsi utama, yaitu fungsi pertempuran dan fungsi pembinaan teritorial. Satuan Batalyon Infanteri 111/ Karma Bhakti yang merupakan bagian dari jajaran TNI AD berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan, dengan menjalankan tugasnya berdasarkan perintah dari Komando Atas tersebut.

Pengabdian Satgas Pamtas Statis Yonif 111/Karma Bhakti

Berdasarkan perintah dari Panglima TNI bulan Februari tahun 2023, Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti diperintahkan untuk merencanakan dan menyiapkan personel serta perlengkapannya untuk melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Statis Republik Indonesia – Papua Nugini di Wilayah Kab. Boven Digoel, Papua Selatan selama 1 tahun penugasan.

Pelaksanaan Tugas Operasi di Wilayah Perbatasan Papua Selatan, Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti berpijak pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, dengan memberangkatkan sebanyak 450 personel dan menempatkan sebanyak 21 Pos tersebar, untuk melaksanakan operasi pengamanan di sepanjang Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG Mulai Hari "H", Jam "J" selama 12 bulan di wilayah perbatasan Papua Selatan dan mencegah pemindahan 14 patok batas di wilayah Kab. Boven Digoel dalam rangka mendukung tugas pokok Kolakops Korem 174/ Anim Ti Waninggap. Selain itu Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti juga melaksanakan operasi tempur dan operasi teritorial secara terpadu dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan operasi tempur, Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB melaksanakan kegiatan-kegiatan tempur diantaranya melaksanakan patroli patok batas negara di wilayah perbatasan RI-PNG, melaksanakan sweeping kendaraan, pengecekan pelintas batas negara, melaksanakan patroli keamanan, melaksanakan pertahanan pos, ambush dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat tempur, sedangkan di bidang teritorial, Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB melaksanakan operasi pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Satgas.

Kegiatan Keagamaan, Natal bersama di Kp. Wamena, Dist Jair.

Kunjungan Dankolakops Rem 174 ATW, Brigjend TNI Agus Widodo S IP MSi Dan Pj Gubernur Papua Selatan Prof Dr Ir Apolo Safanpo S T MT IPM

Program Unggulan Satgas

Dalam operasi teritorial Satgas Pamtas Statis Yonif 111/Karma Bhakti melaksanakan pembinaan teritorial memiliki program unggulan bertajuk "Kitorang Basudara", yang di dalamnya terdapat program-program sebagai upaya mendukung pemerintah daerah dalam rangka membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat sekitar khususnya yang tinggal di daerah terpencil di wilayah perbatasan, di dalam Program Unggulan Binter **"kitorang basudara"** tersebut terdapat beberapa program unggulan diantaranya;

Program Kampung Pancasila. Program ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, membantu dinas pendidikan setempat dalam memperlancar proses belajar mengajar, peningkatan motivasi belajar dan pemberian materi wawasan kebangsaan dengan tujuan meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya, memberikan bantuan tenaga pendidik, memberikan bantuan alat dan perlengkapan sekolah, membangun rumah baca dan menyediakan mobil pintar pustaka keliling untuk meningkatkan kualitas minat baca anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil perbatasan RI-PNG.

Program Kampung Sehat. Program ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu kesehatan dan mengajarkan masyarakat bagaimana pola hidup yang sehat. Kegiatan yang dilakukan diantaranya memberikan pelayanan kesehatan gratis, melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan (malaria, HIV AIDS, dll), melaksanakan fogging, mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan badan (sikat gigi, mandi, potong rambut dll).

Pembagian sembako kepada Masyarakat di Perbatasan Negara

Program Kampung Sejahtera. Program Kampung Sejahtera Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dimana Satgas memberikan ilmu pertanian dan perkebunan serta memberikan berbagai bibit sayuran seperti bibit bayam, bibit kangkung, bibit cabai, bibit terong, bibit

Mengajarkan Pola hidup sehat untuk menjaga kebersihan diri

Mengajarkan Wawasan Kebangsaan memupuk rasa cinta tanah air Indonesia

Pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat perbatasan RI-PNG

sawi dan bibit jagung untuk dikelola oleh masyarakat dilahan kosong sebagai milik mereka dan hasilnya bisa untuk dikonsumsi dan dapat dijual untuk membantu ekonomi masyarakat. Selain itu Satgas berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Boven Digoel untuk mendukung kegiatan Binter Satgas dalam mengelola budidaya ikan air tawar bagi masyarakat dengan pengawasan langsung oleh personel Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/ Karma Bhakti. Tidak hanya sampai disitu, Satgas juga melakukan kegiatan lainnya diantaranya pembukaan jalan penghubung antarkampung, membantu proses rehabilitasi rumah warga yang tidak mampu sekaligus memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai dan sembako bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung terpencil di wilayah perbatasan RI-PNG.

Program Kampung Damai. Program ini tidak kalah pentingnya di tengah masyarakat dalam rangka mempererat tali persaudaraan, memperkokoh rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui berbagai kegiatan seperti, kegiatan keagamaan bersama, olahraga bersama, Bakti Sosial dan Karya Bakti, serta melakukan perbaikan sarana tempat peribadatan.

Kehadiran Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti di ujung wilayah timur Indonesia ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat perbatasan serta mendapat respon positif dari berbagai kalangan diantaranya, Pj. Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo dan Bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo, S.Sos, dalam kesempatannya para pejabat daerah tersebut mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti yang telah membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan segala upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kab. Boven Digoel lebih kurang selama 12 bulan lamanya. Hal tersebut juga diungkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Boven Digoel, dr. Meily Manoppo, yang secara

3 Agustus 2023 Penyambutan Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111 KB, Pelabuhan Merauke

langsung memberikan apresiasi kepada Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/ Karma Bhakti karena telah mendukung pemerintah melalui Program Kesehatan yang tersebar di pos-pos perbatasan, menurutnya kegiatan yang dilakukan Satgas sangat bermanfaat dan juga sangat membantu dalam memberikan respon cepat membantu masyarakat khususnya yang tinggal di kampung-kampung terpencil di Wilayah Perbatasan RI-PNG.

Prestasi Satgas Yonif 111/Karma Bhakti

Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/Karma Bhakti dalam pelaksanaan tugas nya di Sektor Kolakops Korem 174/ Anim Ti Waninggap terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparatur daerah setempat, sehingga setiap kegiatan mendapat dukungan baik dalam pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan teritorial. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil yang didapat selama lebih kurang 12 bulan masa penugasan, Adapun hasil positif yang didapat selama bertugas sebagai berikut:

- Menangkap dan menggagalkan penyelundupan miras.
- Menerima penyerahan 1 pucuk senjata api rakitan dari masyarakat.
- Penangkapan pengedar ganja.
- Penemuan ladang ganja seluas ± 100 M2.
- Menemukan patok batas Negara RI – PNG M.M 11.A (Kondisi Rusak).
- Penyelamatan 2 orang warga Kampung Muting yang terseret arus banjir.
- Pemasangan 21 buah Pilar Patok tambahan di sepanjang perbatasan RI- PNG.

Didalam pelaksanaan tugas operasi di perbatasan RI-PNG diperlukan adanya sinergitas antara Instansi-Instansi yang ada di dalamnya, TNI sebagai unsur

penggerak terdepan di lapangan akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dansatgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB, Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, S.I.P., mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan, sehingga tugas pokok dapat tercapai, stabiltas keamanan dan kesejahteraan serta kedamaian masyarakat di tapal batas Kab. Boven Digoel Provinsi Papua Selatan juga tetap terjaga. Semoga pengabdian Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/ Karma Bhakti dapat dilanjutkan serta ditingkatkan sehingga dapat semakin berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Wilayah Perbatasan Papua Selatan RI-PNG.

Tetap Semangat
Karma Bhakti
Setia – Taqwa - Pemberani